

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI
DESA MEKAR JAYA KECAMATAN KAMPAR KIRI TENGAH
KABUPATEN KAMPAR**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu

Ilmu Pemerintahan

Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Islam Riau



Efi Sulastri

NPM: 177310050

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
PEKANBARU
2021**

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT diiringi shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Penulis menyadari berkat rahmat dan hidayahNya yang dilimpahkan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: **“Evaluasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Mekar Jaya Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar”**.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis telah banyak diberikan bantuan baik berupa waktu, saran dan kerjasama, diskusi dari pihak-pihak yang kompeten dan berdedikasi demi kesempurnaan penulisan sebuah karya ilmiah yang dimuat dalam sebuah skripsi. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang berpartisipasi kepada penulis terutama:

1. Bapak selaku Rektor Universitas Islam Riau Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH.,M.C.L yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Bapak DR. Syahrul Akmal Latif, M.Si
3. Bapak Dr. Rangi Ade Febrian, S.IP., M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau
4. Bapak Yendri Nazir, S. Sos., M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan waktu, bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penulisan usulan penelitian ini.
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen selaku Staf Pengajar khususnya pada Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau yang telah memberikan bekal Ilmu Pengetahuan yang dimiliki kepada penulis

6. Pemerintah Desa Mekar Jaya dan Pendamping PKH Desa serta Ketua Kelompok PKH Desa Mekar Jaya atas kemudahan yang telah diberikan kepada penulis selama melakukan pengumpulan data yang dibutuhkan dalam penyusunan usulan penelitian ini.
7. Persembahan teristimewa untuk Ayahanda Tercinta Bapak Kadir dan Ibunda Tercinta Ibu Rumsiyah. Terimakasih atas kasih sayang yang diberikan, semoga Ayah dan Ibunda diberikan tempat terbaik di sisi Allah SWT.
8. Persembahan untuk Abang dan Kakak Saniri, Meri, Hariri, Dewi Sumarni, Wiwik Purwanti yang telah memberikan kasih sayang, doa yang tiada henti serta dukungan baik moral maupun material kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman-teman seperjuangan jurusan Ilmu Pemerintahan Angkatan 2017 Terkhusus Silvia Ariska Yani, Alifia Desriani, Wanda Rannita, Asih Fitriani, Novitri Hartilena, Destriana Rahmadiani, Yendra Anando, Fikri Assidiky, Gandhi Mulya Desta, Ilham Yuri Nanda, Sulistia Wardani yang telah memberikan motivasi, saran, dan semangat kepada penulis.
10. Teman-teman seperjuangan yang selalu memberikan semangat berupa candaan Firda Ramadan, Fenny Khalilah, Zulfita Dian Ningrum, Dinnia Akhwany, Dwi Swarnita Darma, Silvia Rustiani, Retno Sari Damayanti, Aulia Aryani, Wahdah Indah Khuluqi.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu penulis mengharapkan masukan dan saran dari semua pihak demi menyempurnakannya. Akhir kata penulis berharap semoga semua kebaikan yang telah diberikan mendapat keridhaan dari Allah SWT dan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat, bagi penulis maupun pembaca sekalian, Aamiin.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh...

Pekanbaru, 2 Febuari 2021

Penulis

Efi Sulastri

NPM: 177310050



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR ISI

	Halaman
PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING	Error! Bookmark not defined.
PERSETUJUAN TIM PENGUJI	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
SURAT PERNYATAAN	xviii
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	19
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian.....	19
BAB II	21
STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN	21
A. Studi Kepustakaan.....	21
1. Ilmu Pemerintahan.....	21
2. Konsep Pemerintahan.....	22
3. Konsep Kebijakan Publik	24
4. Konsep Evaluasi	26
5. Konsep Program Keluarga Harapan.....	30
6. Konsep Manajemen.....	32
7. Konsep Tugas Pembantuan	34
8. Konsep Kesejahteraan Sosial	34
9. Efektivitas.....	36
10. Efisiensi	36
11. Kecukupan	36

12. Perataan.....	37
13. Responsivitas	37
14. Ketepatan	38
B. Kajian Penelitian Terdahulu.....	38
C. Kerangka Pikir.....	40
D. Konsep Operasional	41
E. Operasional Variabel.....	44
F. Teknik Pengukuran	45
BAB III.....	48
METODE PENELITIAN	48
A. Tipe Penelitian.....	48
B. Lokasi Penelitian.....	49
C. Populasi dan Sampel	49
D. Teknik Penarikan Sampel.....	50
E. Jenis dan Sumber Data.....	50
F. Teknik Pengumpulan Data.....	51
G. Teknik Analisis Data.....	52
H. Jadwal Kegiatan Penelitian	52
BAB IV	55
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	55
A. Keadaan Geografis Desa Mekar Jaya.....	55
B. Keadaan Penduduk Desa Mekar Jaya	56
C. Susunan Organisasi Desa Mekar Jaya.....	58
D. Program Keluarga Harapan Desa Mekar Jaya	58
BAB V.....	61
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	61
A. Identitas Responden	61
B. Evaluasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Di Desa Mekar Jaya Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar	64
C. Hambatan-hambatan Dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Di Desa Mekar Jaya Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar	129
BAB VI.....	118
PENUTUP.....	118

A. Kesimpulan.....118

B. Saran.....125

DAFTAR PUSTAKA118

LAMPIRAN-LAMPIRAN:



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Daftar Klasifikasi Jenis Desa Di Kecamatan Kampar Kiri Tengah	14
Tabel I.2	Data Masyarakat Miskin Penerima Bantuan Desa Mekar Jaya Tahun 2020	15
Tabel I.3	Data Jumlah Penerima Program Keluarga Harapan Masyarakat Desa Mekar Jaya Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar 16	
Tabel I.4	Data Jumlah Masyarakat Desa Mekar Jaya Yang Memperoleh Dan Tidak Memperoleh Bantuan PKH.....	17
Tabel II.1	Penelitian Terdahulu Yang Dijadikan Sumber Referensi Dalam Penelitian ini adalah sebagai berikut:	38
Tabel II.2	Operasional Variabel Penelitian Evaluasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Di Desa Mekar Jaya Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar	44
Tabel III.1	Populasi dan Sampel Tentang Evaluasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Mekar Jaya Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar	49
Tabel III.2	Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian Tentang Evaluasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Mekar Jaya Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar	52
Tabel IV.1	Jumlah Penduduk Desa Mekar Jaya Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2020	56
Tabel IV.2	Jumlah Penduduk Desa Mekar Jaya Berdasarkan Kepercayaan Tahun 2020	56
Tabel IV.3	Jumlah Penduduk Desa Mekar Jaya Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2020	57
Tabel IV.4	Susunan Pengurus Program Keluarga Harapan Desa Mekar Jaya Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar.....	59
Tabel V 1	Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	62
Tabel V 2	Distribusi Responden Berdasarkan Kelompok Umur	62
Tabel V 3	Distribusi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan	63
Tabel V 4	Distribusi Tanggapan Responden Ketua Kelompok PKH Desa Mekar Jaya Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar	65
Tabel V 5	Distribusi Tanggapan Responden Keluarga Miskin Penerima PKH Desa Mekar Jaya Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar	67

Tabel V 6	Distribusi Tanggapan Responden Keluarga Miskin Non Penerima PKH Desa Mekar Jaya Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar 69
Tabel V 7	Distribusi Tanggapan Responden Keluarga dengan Perekonomian Layak Penerima PKH Desa Mekar Jaya Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar.....71
Tabel V 8	Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Indikator Efektivitas Terhadap Evaluasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Di Desa Mekar Jaya Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar72
Tabel V 9	Distribusi Tanggapan Responden Ketua Kelompok PKH Desa Mekar Jaya Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar75
Tabel V 10	Distribusi Tanggapan Responden Keluarga Miskin Penerima PKH Desa Mekar Jaya Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar77
Tabel V 11	Distribusi Tanggapan Responden Keluarga Miskin Non Penerima PKH Desa Mekar Jaya Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar 79
Tabel V 12	Distribusi Tanggapan Responden Keluarga dengan Perekonomian Layak Penerima PKH Desa Mekar Jaya Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar.....81
Tabel V 13	Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Indikator Efisiensi Terhadap Evaluasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Di Desa Mekar Jaya Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar83
Tabel V 14	Distribusi Tanggapan Responden Ketua Kelompok PKH Desa Mekar Jaya Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar87
Tabel V 15	Distribusi Tanggapan Responden Keluarga Penerima Manfaat PKH Desa Mekar Jaya Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar88
Tabel V 16	Distribusi Tanggapan Responden Keluarga Miskin Non Penerima PKH Desa Mekar Jaya Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar 90
Tabel V 17	Distribusi Tanggapan Responden Keluarga dengan Perekonomian Layak Penerima PKH Desa Mekar Jaya Kecamatan ampas Kiri Tengah Kabupaten Kampar.....92
Tabel V 18	Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Indikator Efisiensi Terhadap Evaluasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Di Desa Mekar Jaya Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar93
Tabel V 19	Distribusi Tanggapan Responden Ketua Kelompok PKH Desa Mekar Jaya Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar96
Tabel V 20	Distribusi Tanggapan Responden Keluarga Miskin Penerima PKH Desa Mekar Jaya Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar98
Tabel V 21	Distribusi Tanggapan Responden Keluarga Miskin Non Penerima PKH Desa Mekar Jaya Kecamatan Kampar iri Tengah Kabupaten Kampar ...100
Tabel V 22	Distribusi Tanggapan Responden Keluarga dengan Perkonomian Layak Penerima PKH Desa Mekar Jaya Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar.....101
Tabel V 23	Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Indikator Perataan Terhadap Evaluasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Di Desa Mekar Jaya Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar103
Tabel V 24	Distribusi Tanggapan Responden Ketua Kelompok PKH Desa Mekar Jaya Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar106

Tabel V 25	Distribusi Tanggapan Responden Keluarga Penerima Manfaat PKH Desa Mekar Jaya Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar	108
Tabel V 26	Distribusi Tanggapan Responden Keluarga Penerima Manfaat PKH Desa Mekar Jaya Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar	110
Tabel V 27	Distribusi Tanggapan Responden Keluarga dengan Perekonomian Layak Penerima PKH Desa Mekar Jaya Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar.....	111
Tabel V 28	Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Indikator Responsivitas Terhadap Evaluasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Di Desa Mekar Jaya Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar	113
Tabel V 29	Distribusi Tanggapan Responden Ketua Kelompok PKH Desa Mekar Jaya Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar	116
Tabel V 30	Distribusi Tanggapan Responden Keluarga Penerima Manfaat PKH Desa Mekar Jaya Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar	118
Tabel V 31	Distribusi Tanggapan Responden Keluarga Miskin Non Penerima PKH Desa Mekar Jaya Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar	120
Tabel V 32	Distribusi Tanggapan Responden Keluarga dengan Perekonomian Layak Penerima PKH Desa Mekar Jaya Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar.....	121
Tabel V 33	Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Indikator Ketepatan Terhadap Evaluasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Di Desa Mekar Jaya Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar	123
Tabel V 34	Rekapitulasi Tanggapan Responden Tentang Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Mekar Jaya Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar.....	126

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

DAFTAR GAMBAR

- II.1 : Kerangka Pikiran Evaluasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Di
Desa Mekar Jaya Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten
Kampar.....39



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR LAMPIRAN

1. Daftar Kuisisioner.....	136
2. Daftar Wawancara.....	141
3. Data Rekapitulasi Telly.....	142
4. Surat Rekomendasi.....	148
5. Dokumentasi.....	152



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Peserta Ujian Seminar Usulan Penelitian yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Efi Sulastri
NPM : 177310050
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Evaluasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Mekar Jaya Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar

Atas naskah yang didaftarkan pada Ujian Skripsi ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa, naskah dalam skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa, seluruh persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas.
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya ternyata melanggar atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas seta Hukum Negara Republik Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 3 Febuari 2021

Efi Sulastri

EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI DESA
MEKAR JAYA KECAMATAN KAMPAR KIRI TENGAH KABUPATEN
KAMPAR

ABSTRAK

Efi Sulastri

Kata Kunci: Evaluasi, Program Keluarga Harapan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Mekar Jaya Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan. Dalam penelitian ini menggunakan teori William N Dunn, dimana terdiri dari beberapa indikator yang dapat dilihat seperti efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, serta ketepatan yang sejalan dengan tujuan Program Keluarga Harapan. Sedangkan perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Mekar Jaya Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar dan apa saja yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Mekar Jaya Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar. Tipe penelitian yang digunakan adalah metode campuran yaitu penggabungan antara kuantitatif dan kualitatif, dengan populasi Kepala Desa, Kasi Kesra Desa, Pendamping PKH, Ketua Kelompok PKH, Keluarga Penerima Manfaat PKH, Keluarga Miskin Non Penerima PKH, Keluarga dengan perekonomian layak penerima PKH dengan jumlah responden sebanyak 69 orang yang ditentukan dengan teknik sensus dan purposive sampling. Jenis data yang digunakan adalah data primer yang dikumpulkan melalui kuesioner, wawancara, dan observasi sedangkan data sekunder yang dikumpulkan melalui peraturan-peraturan, dokumentasi, laporan dan data lain yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif. Berdasarkan hasil analisis disimpulkan bahwa pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Mekar Jaya Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar dikategorikan “Kurang Baik”. Diharapkan kepada Pemerintah desa dan ketua kelompok PKH serta Pendamping PKH Desa Mekar Jaya untuk lebih selektif dalam menentukan penerima bantuan PKH agar sesuai dan tepat sasaran sehingga tidak terjadi kesenjangan sosial didalam masyarakat.

EVALUATION OF THE IMPLEMENTATION OF THE HOPE FAMILY PROGRAM IN MEKAR JAYA VILLAGE, KAMPAR KIRI TENGAH SUB-DISTRICT, KAMPAR DISTRICT

ABSTRACT

Efi Sulastri

Keywords: Evaluation, Hope Family Program

This study aims to determine the extent of the implementation of the Family Hope Program in Mekar Jaya Village, Kampar Kiri Tengah District, Kampar Regency based on the Regulation of the Minister of Social Affairs of the Republic of Indonesia Number 1 of 2018 concerning the Family Hope Program. In this study using William N Dunn's theory, which consists of several indicators that can be seen such as effectiveness, efficiency, sufficiency, leveling, responsiveness, and accuracy in line with the objectives of the Family Hope Program. Meanwhile, the formulation of the problem in this research is: How is the implementation of the Family Hope Program in Mekar Jaya Village, Kampar Kiri Tengah District, Kampar Regency and what are the obstacles in the implementation of the Family Hope Program in Mekar Jaya Village, Kampar Kiri Tengah District, Kampar Regency. The type of research used is mix method a combination of quantitative and qualitative, with the population of the Village Head, Kasi Kesra Desa, PKH Facilitators, PKH Group Heads, PKH Beneficiary Families, Non-PKH Recipient Poor Families, Families with economies worthy of PKH recipients with 69 respondents as determined by the technique. census and purposive sampling. The type of data used is primary data collected through questionnaires, interviews, and observations, while secondary data is collected through regulations, documentation, reports and other data obtained and then analyzed descriptively. Based on the results of the analysis, it is concluded that the implementation of the Family Hope Program in Mekar Jaya Village, Kampar Kiri Tengah District, Kampar Regency is categorized as "Not Good". It is hoped that the village government and PKH group leaders as well as PKH Facilitators in Mekar Jaya Village are more selective in determining recipients of PKH assistance so that they are suitable and right on target so that there is no social gap in the community.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki tujuan yang sangat mulia sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar kepada kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Kewajiban melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia bukan hanya tugas negara atau pemerintah. Peran serta warga negara juga termasuk point penting dalam melindungi bangsa, juga untuk mewujudkan tujuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Tujuan selanjutnya adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Berbicara mengenai kesejahteraan umum artinya tidak jauh kaitannya dengan unsur-unsur seperti sandang, pangan dan papan. Kemudian apabila ketiganya terpenuhi, maka masyarakat dapat dikatakan sejahtera. Kesejahteraan umum juga tidak hanya mencakup mengenai kesejahteraan ekonomi dan materi, melainkan juga kesejahteraan lahir dan batin.

Kemudian berbicara mengenai pencerdasan. Tujuan dari pencerdasan ini adalah untuk memastikan seluruh masyarakat Indonesia memperoleh kesempatan untuk

mengenyam pendidikan yang layak dan berkualitas. Mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan tugas daripada negara, pemerintah, dan masing-masing individu untuk berusaha meraih jenjang pendidikan yang terbaik. Karena dengan adanya masyarakat yang cerdas, maka pembangunan dan kemajuan negara akan semakin cepat dicapai. Selanjutnya tujuan Perdamaian diwujudkan oleh setiap warga Indonesia dengan menjaga perdamaian antar suku, antar umat beragama, saling menghargai, dan menghormati perbedaan-perbedaan yang ada.

Tujuan Negara Republik Indonesia adalah tanggung jawab negara, baik pemerintah maupun warga negaranya. Tujuan negara yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 diharapkan dapat diterapkan dalam pelaksanaan pemerintahan di Indonesia. Pemerintah dapat membuat kebijakan yang pro rakyat. Sehingga rakyat Indonesia dapat merasakan kesejahteraan di negara Indonesia dan benar-benar tercipta pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Tujuan negara tersebut merupakan landasan bagi bangsa Indonesia untuk melaksanakan kerja sama dengan negara lain yang dilandasi oleh nilai-nilai perdamaian dan keadilan sosial.

Dilihat dari cita-cita luhur bangsa Indonesia yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 untuk mensejahterakan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan, maka pemerintah terus membuat kebijakan dalam bentuk program-program bantuan sosial. Pemerintah selalu berusaha untuk melakukan upaya penanggulangan kemiskinan dari tahun ke tahun.

Kemiskinan merupakan masalah serius yang sampai saat ini masih menjadi fokus bagi setiap negara, salah satunya adalah Indonesia. Mendengar kata

kemiskinan sepertinya sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia. Kemiskinan adalah masalah yang sangat kompleks yang tidak bisa diselesaikan secara sendirian, harus ada keikutsertaan antara pemerintah juga masyarakat

Secara umum, kemiskinan didefinisikan sebagai suatu keadaan atau ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan juga adalah suatu kondisi ketidakmampuan seseorang dari pekerjaan yang dimiliki untuk menghasilkan uang yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemiskinan sangat erat kaitannya dengan sumber daya manusia. Juga kemiskinan diakibatkan karena rendahnya sumber daya manusia yang berkualitas.

Di Indonesia terutama di era seperti sekarang dapat dikategorikan masih banyaknya penduduk Indonesia yang hidup dibawah garis kemiskinan dan hidup dalam keadaan yang tidak selayaknya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) sampai pada maret 2019 jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 25,14 Juta jiwa atau sekitar 9,41% dari total penduduk.

Dengan demikian, dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan di bidang perlindungan sosial, Program Keluarga Harapan merupakan salah satu program percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengembangan sistem jaminan sosial melalui pemberian bantuan tunai bersyarat kepada rumah tangga sangat miskin untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, terutama dibidang kesehatan dan pendidikan.

Dengan adanya Program Keluarga Harapan dapat membuka akses kepada keluarga miskin terutama ibu hamil dan anak balita maupun anak usia sekolah untuk memanfaatkan berbagai fasilitas layanan pendidikan dan kesehatan yang tersedia di sekitar tempat tinggal mereka. Selain itu, dengan adanya Program Keluarga Harapan ini juga sangat mendatangkan manfaat bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia untuk dapat mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya.

Program Keluarga Harapan yang kemudian disingkat menjadi PKH menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi pelaksana sebagaimana terdapat dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pelimpahan Kewenangan Dekonsentrasi dan Penugasan Tugas Pembantuan Kepada Dinas Sosial Daerah Provinsi dan Dinas Sosial Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2020.

Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/walikota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.

Sedangkan Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.

Dalam Pasal 6 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pelimpahan Kewenangan Dekonsentrasi dan Penugasan

Tugas Pembantuan Kepada Dinas Sosial Daerah Provinsi dan Dinas Sosial Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2020 dijelaskan bahwa Rencana Program yang dibiayai melalui pendanaan Dekonsentrasi lingkup Kementerian Sosial meliputi:

- a. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya;
- b. Program pemberdayaan sosial;
- c. Program rehabilitasi sosial;
- d. Program perlindungan dan jaminan sosial;
- e. Program penanganan fakir miskin; dan
- f. Program pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan, dan penyuluhan sosial.

Sebagaimana terdapat dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan bahwa Sasaran PKH merupakan Keluarga dan/atau seseorang yang miskin dan rentan serta terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial.

Bantuan Program Keluarga Harapan terbagi atas 3 bidang, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Bantuan PKH bidang Pendidikan
- b. Bantuan PKH bidang Kesehatan
- c. Bantuan PKH Non Tunai

Dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan dijelaskan bahwa Sasaran PKH Akses merupakan keluarga dan/atau seseorang yang miskin dan rentan diwilayah

PKH Akses yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin yang memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial. Selanjutnya, dalam Pasal 4 ayat (2) juga dijelaskan bahwa PKH Akses sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas wilayah:

- a. Pesisir dan pulau kecil;
- b. Daerah tertinggal/terpencil; atau
- c. Perbatasan antarnegara.

Kemudian dalam Pasal 5 ayat (1) dijelaskan bahwa Kriteria komponen kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 meliputi:

- a. Ibu hamil/menyusui; dan
- b. Anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun.

Selanjutnya pada ayat (2) dijelaskan bahwa Kriteria Komponen pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 meliputi:

- a. Anak sekolah dasar/madrasah ibtdaiyah atau sederajat;
- b. Anak sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah atau sederajat;
- c. Anak sekolah menengah atas/madrasah Aliyah atau sederajat; dan
- d. Anak usia 6 (enam) sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 (dua belas) tahun.

Kemudian pada Pasal 5 ayat (3) dikatakan bahwa Kriteria komponen kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:

- a. Lanjut usia mulai dari 60 (enam puluh) tahun; dan
- b. Penyandang disabilitas diutamakan penyandang disabilitas berat.

Adapun besaran dana bantuan Program Keluarga Harapan dapat diklasifikasikan seperti berikut ini:

1. Ibu Hamil/nifas mendapatkan bantuan sebesar Rp. 250.000/bulan.
2. Anak usia dini 0-6 tahun mendapatkan bantuan sebesar Rp. 250.000/bulan.
3. Para penyandang disabilitas berat mendapatkan Rp. 200.000/bulan.
4. Lanjut usia mendapatkan Rp. 200.000/bulan.
5. Selain itu, untuk pendidikan anak SD/Sederajat mendapatkan bantuan sebesar Rp. 75.000/bulan.
6. Pendidikan anak SMP/Sederajat mendapatkan Rp. 125.000/bulan.
7. Dan pendidikan anak SMA/Sederajat mendapatkan Rp. 166.000/bulan.

Bantuan dana yang diberikan tersebut, maksimal untuk 4 orang dalam satu keluarga penerima bantuan. Peserta PKH harus masuk ke dalam kategori keluarga kurang mampu, keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Untuk bantuan Non tunai yang diperoleh berupa persediaan sembako selama satu bulan kedepan bagi Keluarga Penerima Manfaat PKH.

Adapun mekanisme pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dilaksanakan dengan beberapa tahapan sesuai dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan Pasal 32 sebagai berikut:

- a. Perencanaan;

- b. Penetapan calon peserta PKH;
- c. Validasi data calon penerima penerima manfaat PKH;
- d. Penetapan Keluarga Penerima Manfaat PKH;
- e. Penyaluran Bantuan Sosial PKH;
- f. Pendampingan PKH;
- g. Peningkatan Kemampuan Keluarga;
- h. Verifikasi Komitmen Keluarga Penerima Manfaat PKH;
- i. Pemutakhiran Data Keluarga Penerima Manfaat PKH; dan
- j. Transformasi Kepesertaan PKH.

Setelah dilaksanakan beberapa tahapan diatas mengenai Program Keluarga Harapan, para penerima bantuan Program Keluarga Harapan diseleksi pada saat dilakukan musyawarah desa yang dilakukan oleh pemerintah desa. Jadi penerima Program Keluarga Harapan saat ini berdasarkan perolehan data dari musyawarah desa yang dilakukan oleh pemerintah desa. Bagi masyarakat yang namanya sudah ditetapkan sebagai Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan, harus menyerahkan Kartu Keluarga (KK) dan juga Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai awal persyaratan penerima Program Keluarga Harapan.

Sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial bahwa Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Dan pada Pasal 1 ayat (9) UU No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial menyebutkan bahwa Perlindungan sosial adalah semua upaya yang

diarahkan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial.

Selanjutnya dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial menyebutkan bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial ditujukan kepada:

- a. Perseorangan;
- b. Keluarga;
- c. Kelompok; dan/atau
- d. Masyarakat.

Dan dalam Pasal 5 ayat (2) UU. No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial menyebutkan bahwa Penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial:

- a. Kemiskinan;
- b. Ketelantaran;
- c. Kecacatan;
- d. Keterpencilan;
- e. Ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku;
- f. Korban bencana; dan/atau
- g. Korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik menyebutkan bahwa jumlah penduduk miskin di Riau pada akhir bulan Desember 2019 khususnya di Kabupaten Kampar mencapai 66,81 ribu orang atau sekitar 7,71 persen. Oleh karena itu

pemerintah terus berupaya untuk mengurangi jumlah kemiskinan setiap tahunnya. Dengan memberikan bantuan-bantuan yang terus disalurkan kepada masyarakat miskin di Indonesia baik itu dibidang kesehatan, pendidikan, ataupun ekonomi.

Program Keluarga Harapan dilaksanakan secara serentak se-Indonesia pada tahun 2007. Sehubungan dengan hal tersebut diwilayah Kabupaten Kampar pelaksanaan Program Keluarga Harapan baru bisa dilaksanakan pada tahun 2011.

Kabupaten Kampar adalah salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Riau dengan Ibukota Bangkinang. Kabupaten Kampar memiliki luas wilayah yaitu 11.289,28 km². Kabupaten Kampar dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, yang kemudian masuk wilayah Provinsi Riau yang dikukuhkan oleh Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958. Kemudian untuk perkembangan Kota Pekanbaru, pemerintah daerah Kampar menyetujui untuk menyerahkan sebagian dari wilayahnya untuk keperluan perluasan wilayah Kota pekanbaru, yang kemudian ditetapkan melalui peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1987.

Sesuai dengan Surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor: KPTS. 318VIII1989 tanggal 17 Juli 1987, Kabupaten Kampar terdiri dari 19 Kecamatan. Yang kemudian Kabupaten Kampar memiliki 21 kecamatan sebagai hasil pemekaran 12 kecamatan yang sebelumnya terdiri dari 250 Desa atau Kelurahan. Kecamatan Kampar Kiri Tengah merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Kampar. Kecamatan Kampar Kiri Tengah memiliki penduduk sebanyak 28.328 jiwa.

Pada Kecamatan Kampar Kiri Tengah terdapat 11 Desa yang jenis dan status desanya juga berbeda-beda. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Pemerintah Desa disebutkan susunan organisasi pemerintah desa disesuaikan dengan tingkat perkembangan desa.

Berdasarkan klasifikasi desa, maka desa di Indonesia dibagi dalam 3 Jenis Desa yaitu:

- a. Desa Swadaya, adalah desa yang memiliki potensi tertentu tetapi dikelola dengan sebaik-baiknya. Adapun ciri-ciri desa swadaya, sebagai berikut:
 - Daerahnya terisolasi dengan daerah lainnya
 - Penduduknya jarang
 - Mata pencaharian homogeny yang bersifat agraris
 - Bersifat tertutup
 - Masyarakat memegang penuh adat
 - Teknologi masih rendah
 - Sarana dan prasarana sangat kurang
 - Hubungan antar manusia sangat erat
 - Pengawasan social dilakukan oleh keluarga.

- b. Desa Swakarya, adalah peralihan atau transisi dari desa swadaya menuju desa swasembada, dengan ciri-ciri sebagai berikut:
 - Kebiasaan atau adat istiadat sudah tidak mengikat penuh
 - Sudah mulai mempergunakan alat-alat dan teknologi

- Desa swakarya sudah tidak terisolasi lagi walau letaknya jauh dari pusat perekonomian.
 - Telah memiliki tingkat perekonomian, pendidikan, jalur lalu lintas dan prasarana lain.
 - Jalur lalu lintas antara desa dan kota sudah agak lancar.
- c. Desa Swasembada, adalah desa yang masyarakatnya telah mampu memanfaatkan dan mengembangkan sumber daya alam dan potensinya sesuai dengan kegiatan pembangunan regional. Ciri-ciri desa swasembada, adalah sebagai berikut:
- Kebanyakan berada di Ibukota kecamatan.
 - Penduduknya padat-padat
 - Tidak tertarik dengan adat istiadat
 - Telah memiliki fasilitas-fasilitas yang memadai dan lebih maju dari desa lain.
 - Partisipasi masyarakatnya sudah lebih efektif.

Kemudian menurut Permendesa PDTTrans Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun, dijelaskan bahwa Indeks Desa Membangun adalah Indeks Komposit yang dibentuk dari Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi Desa. Indeks Desa Membangun disusun untuk mendukung upaya Pemerintah dalam menangani pengentasan Desa Tertinggal dan peningkatan Desa Mandiri. Adapun tujuan penyusunan Indeks Desa Membangun adalah sebagai berikut:

- a. Menetapkan status kemajuan dan kemandirian Desa; dan

- b. Menyediakan data dan informasi dasar bagi pembangunan Desa.

Indeks Desa Membangun akan menentukan 5 status kemajuan dan kemandirian Desa, yang disebut dengan Klasifikasi Status Desa. Klasifikasi Status desa dalam Permendes PDTT Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun tersebut adalah:

- a. Desa Mandiri atau yang disebut Desa Sembada adalah Desa Maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan social, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan. Desa Mandiri atau Desa Madya adalah Desa yang memiliki Indeks Desa Membangun (IDM) lebih besar ($>$) dari 0,8155.
- b. Desa Maju atau yang disebut Desa Pra-Sembada adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya social, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan. Desa Maju atau Desa Pra-Madya adalah Desa yang memiliki IDM kurang dan sama dengan (\leq) 0,8155 dan lebih besar ($>$) dari 0,7072.
- c. Desa Berkembang atau yang disebut Desa Madya adalah Desa potensial menjadi Desa Maju, ekonomi dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan. Desa

Berkembang atau Desa Madya adalah Desa yang memiliki IDM kurang dan sama dengan (\leq) 0,7072 dan lebih besar ($>$) dari 0,5989.

- d. Desa Tertinggal atau yang disebut Desa Pra-Madya adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya social, ekonomi dan ekologi tetapi belum, dan kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya. Desa Tertinggal atau Desa Pra-Madya adalah Desa yang memiliki IDM kurang dan sama dengan (\leq) 0,5989 dan lebih besar ($>$) dari 0,4907.
- e. Desa Sangat Tertinggal atau yang disebut Desa Pratama adalah desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, guncangan ekonomi, dan konflik social sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya social, ekonomi, dan ekologi serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya. Desa Sangat Tertinggal atau Desa Pratama adalah Desa yang memiliki IDM kurang dan lebih kecil (\leq) dari 0,4907.

Dibawah ini akan dijelaskan mengenai jenis dan status desa yang ada di Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut:

Tabel I. 1 Daftar Klasifikasi Jenis Desa Di Kecamatan Kampar Kiri Tengah

No.	Nama Desa	IDM	Status Desa	Jenis Desa
1	2	3	4	5
1.	Penghidupan	0,5981	Tertinggal	Swadaya
2.	Simalinyang	0,6169	Berkembang	Swadaya
3.	Mayang Pongkai	0,5900	Tertinggal	Swadaya
4.	Lubuk Sakai	0,5604	Tertinggal	Swadaya
5.	Bina Baru	0,6127	Berkembang	Swadaya
6.	Hidup Baru	0,5546	Tertinggal	Swadaya

1	2	3	4	5
7.	Karya Bakti	0,5841	Tertinggal	Swadaya
8.	Koto Damai	0,5570	Tertinggal	Swadaya
9.	Utama Karya	0,5289	Tertinggal	Swakarya
10.	Bukit Sakai	0,5208	Tertinggal	Swadaya
11.	Mekar Jaya	0,5634	Tertinggal	Swadaya

(Sumber: lipatkain.desa.id, 13 Maret 2021, 22:23 WIB)

Berdasarkan Tabel I.1 diatas penulis tertarik untuk memilih Desa Mekar Jaya Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar, karena desa tersebut yang status Desanya masih dalam kategori Desa Tertinggal dan merupakan Desa Swadaya, juga pada Desa Mekar Jaya terdapat beberapa masalah yang mengakibatkan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan belum dapat di laksanakan secara merata kepada seluruh masyarakat di Desa Mekar Jaya dan juga tujuan yang diharapkan dari Program Keluarga Harapan belum bisa direalisasikan secara maksimal.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Desa Mekar Jaya bahwa standar kemiskinan masyarakat Desa Mekar Jaya adalah masyarakat yang memperoleh bantuan yang diberikan oleh pemerintah. Sehingga diperoleh data sebagai berikut:

Tabel I. 2 Data Masyarakat Miskin Penerima Bantuan Desa Mekar Jaya Tahun 2020

No.	Kategori Penerima Bantuan	Jumlah Penerima Bantuan
1	2	3
1.	PKH	79
2.	Non Penerima PKH	12
3.	BPNT	55
4.	BLT Pos	81
5.	BLT via BRI	16
6.	BLT Dana Desa	94

1	2	3
	Jumlah Keseluruhan Masyarakat Miskin	337

Sumber: Kantor Desa Mekar Jaya Tahun 2020

Dari tabel di atas diperoleh jumlah keseluruhan penduduk miskin penerima bantuan di Desa Mekar Jaya adalah 337 jiwa atau 17,47% dari total penduduk sebanyak 1929 jiwa.

Sedangkan untuk pelaksanaan Program Keluarga Harapan wilayah Desa Mekar Jaya mulai dilaksanakan pada tahun 2015. Terbagi menjadi tiga periode yaitu periode satu, dua dan periode ketiga. Sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel I. 3 Data Jumlah Penerima Program Keluarga Harapan Masyarakat Desa Mekar Jaya Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar

No.	Periode	Tahun	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH
1	2	3	4
1.	1	2015	8 KPM PKH
2.	2	2017	17 KPM PKH
3.	3	2018-2020	54 KPM PKH
	Jumlah		79 KPM PKH

Sumber: Ketua Kelompok Program Keluarga Harapan 2020

Dilihat dari tabel di atas bahwa Program Keluarga Harapan terbagi menjadi tiga periode, periode 1 tahun 2015 terdapat 8 Keluarga Penerima Manfaat PKH, periode 2 tahun 2017 terdapat 17 Keluarga Penerima Manfaat PKH, dan pada periode ke 3 tahun 2018 sampai 2020 terdapat 54 Keluarga Penerima Manfaat PKH, hingga tercatat jumlah keseluruhan adalah 79 Keluarga Penerima Manfaat PKH.

Tabel I. 4 Data Jumlah Masyarakat Desa Mekar Jaya Yang Memperoleh Dan Tidak Memperoleh Bantuan PKH

No.	Kategori	Jumlah
1.	Keluarga Penerima Manfaat PKH	79 KPM PKH
2.	Keluarga Dengan Perekonomian Layak Penerima PKH	12 KPM PKH
3.	Keluarga Yang Seharusnya Menerima Bantuan PKH Tetapi Belum Menerima Bantuan	27 KPM PKH

Sumber: Kantor Desa Mekar Jaya Tahun 2020

Tujuan khusus dari Program Keluarga Harapan sebagaimana terdapat dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan pada Pasal 2 dijelaskan bahwa:

- a. Untuk meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial.
- b. Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan.
- c. Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian keluarga penerima manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial.
- d. Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan, dan
- e. Mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada keluarga penerima manfaat.

Berdasarkan tujuan-tujuan Program Keluarga Harapan, tentu akan sangat membantu masyarakat miskin yang masih memerlukan bantuan tersebut. Dengan adanya Program Keluarga Harapan diharapkan dapat memperbaiki kehidupan masyarakat, terutama dalam bidang ekonomi. Dengan adanya Program Keluarga Harapan diharapkan dapat menjadikan masyarakat Indonesia khususnya Kampar

sebagai dasar membantu penurunan angka kemiskinan dan bisa memotivasi untuk bangkit dengan kerja keras.

Penelitian ini penulis lakukan di Desa Mekar Jaya Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar karena kemajemukan penduduknya dan ditemukannya permasalahan di lingkungan penduduk desa mengenai penyelenggaraan Program Keluarga Harapan. Serta pada dasarnya penelitian ini merupakan suatu pengamatan terhadap kehidupan di masyarakat Desa Mekar Jaya Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar. Sehubungan dengan hal tersebut penulis mengambil mengenai evaluasi pelaksanaan program keluarga harapan di Desa Mekar Jaya Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar karena dalam pelaksanaannya terdapat beberapa masalah. Hal ini dapat dilihat dari fenomena-fenomena yang penulis jumpai dilapangan yaitu:

1. Bahwa pada pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Mekar Jaya Kecamatan Kampar Kiri Tengah kurang merata, karena masih ada keluarga miskin yang tidak mendapatkan Program Keluarga Harapan (PKH).
2. Selanjutnya dalam hal ketepatan, terdapat peserta Program Keluarga Harapan (PKH) yang memiliki perekonomian yang layak, artinya terjadi salah sasaran dalam distribusi Program Keluarga Harapan (PKH).

Berdasarkan fenomena yang diuraikan diatas maka penulis tertarik untuk menelitinya lebih lanjut dengan judul: **“Evaluasi Pelaksanaan Program**

Keluarga Harapan Di Desa Mekar Jaya Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar”

B. Rumusan Masalah

Sebagaimana telah diuraikan pada latar belakang diatas, bahwa pelaksanaan Program Keluarga Harapan di desa Mekar Jaya belum berjalan maksimal sesuai dengan yang di harapkan. Oleh karena itu penulis merumuskan suatu masalah yakni: “Bagaimana Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Mekar Jaya Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar”.

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

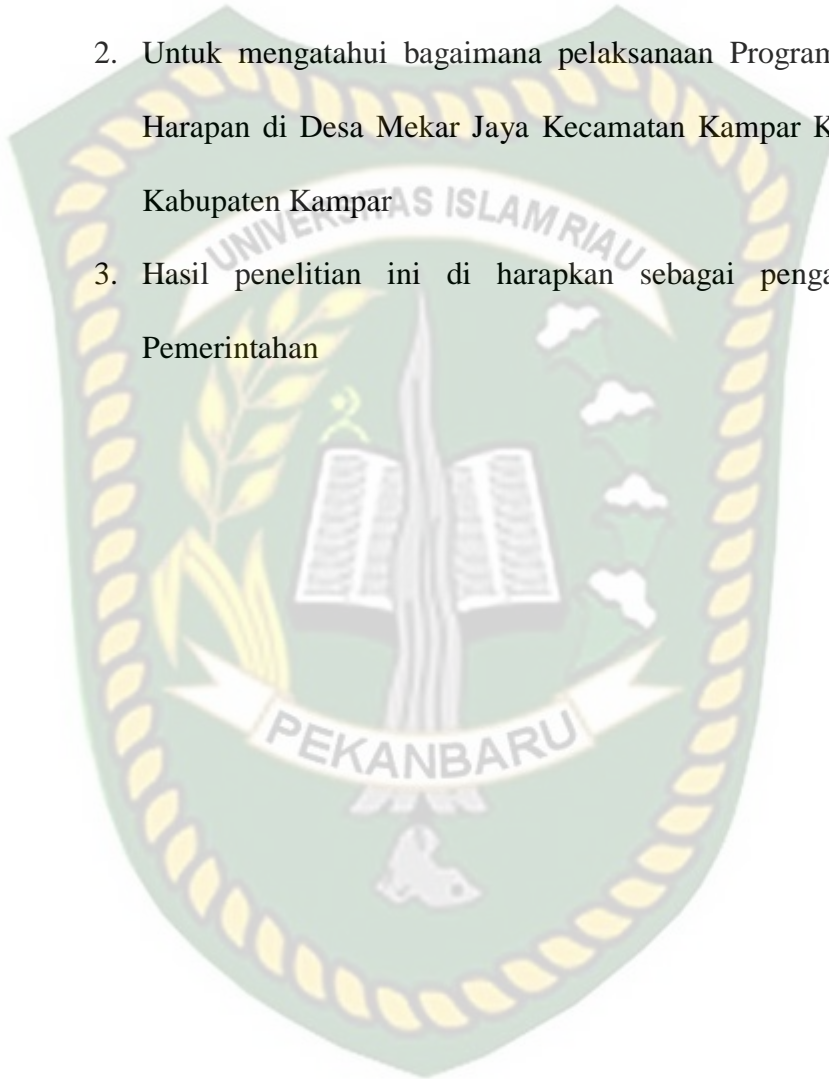
Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan menjelaskan mengenai pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Mekar jaya Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar.
- b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan, terutama di Desa Mekar Jaya Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun yang menjadi kegunaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran kepada pihak desa di Mekar Jaya Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar
2. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Mekar Jaya Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar
3. Hasil penelitian ini di harapkan sebagai pengantar Ilmu Pemerintahan



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. Studi Kepustakaan

Sebagai kerangka acuan berfikir dalam memecahkan pokok permasalahan yang digunakan dalam penelitian ini penulis akan memaparkan konsep-konsep atau teori-teori yang ada relevansinya untuk mendukung pemecahan masalah yang dikemukakan diatas.

1. Ilmu Pemerintahan

Ilmu Pemerintahan adalah suatu ilmu dan seni. Dikatakan seni karena berapa banyak pemimpin pemerintahan yang justru tanpa pendidikan di bidang pemerintahan, mampu berbuat serta kharismatik menjalankan roda pemerintahan, sedangkan dikatakan disiplin ilmu pengetahuan adalah karena memenuhi syarat-syarat seperti, dapat dipeleajari dan dapat diajarkan, memiliki objek baik objek materi ataupun objek forma, bersifat universal dan sistematis serta spesifik. (Syafiie, 2005:20)

Menurut Ndraha (2015:7) Ilmu Pemerintahan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan tiap orang akan jasa publik dan layanan civil dalam hubungan pemerintahan (sehingga dapat diterima) pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan.

Ilmu pemerintahan merupakan objek material dan formal yang merupakan peristiwa yang terjadi dalam hubungan kerakyatan, yaitu peristiwa, kejadian ataupun gejala-gejala yang terjadi ketika suatu pihak yang berhubungan, berkomunikasi dan berinteraksi dengan yang lain pada posisi dan kondisi tertentu.

Ilmu Pemerintahan sangat erat dengan berbagai aspek kerakyatan seperti: budaya kerakyatan, seni kerakyatan, bahasa kerakyatan, komunikasi kerakyatan, ekonomi kerakyatan, politik kerakyatan, sejarah, antropologi, hukum, adat, tradisi, dan lain-lain yang bersifat kerakyatan. Disamping itu pada bidang kajian tradisional meliputi berbagai aspek eksekutif seperti sistem, struktur, fungsi, dan perilaku.

2. Konsep Pemerintahan

Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan yang menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada kepala daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah.

Keberhasilan Otonomi Daerah akan sangat bergantung kepada kesiapan aparatur pemerintahan dan pembangunan daerah. Pengaturan dan penataan yang dimaksud adalah bagaimana daerah mampu menyiapkan perangkat-perangkat hukum, organisasi dan tata laksana pemerintahan daerah benar-benar efektif dan efisien.

Dalam melaksanakan suatu pemerintahan yang baik terdapat beberapa uraian-uraian yang mendefinisikan tentang pengertian pemerintahan, dapat dilihat secara etimologi pemerintahan dapat diartikan sebagai berikut:

1. Perintah berarti melakukan pekerjaan menyuruh. Yang berarti didalamnya terdapat dua pihak, yaitu yang memerintah memiliki wewenang dan yang diperintah memiliki kepatuhan akan sebuah keharusan.

2. Setelah ditambah awalan “pe” menjadi pemerintah, yang berarti badan yang melakukan kekuasaan untuk memerintah.
3. Setelah ditambah lagi akhiran “an” menjadi pemerintahan. Berarti perbuatan, cara hal atau urusan dari badan yang memerintah tersebut.

Pandangan yang dikemukakan oleh Sedarmayanti (2004:10), dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan legitimasi, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Pemerintahan berasal dari kata pemerintah, yang paling sedikit adalah kata “perintah”. Kata tersebut memiliki empat unsur dengan dua pihak yang terkandung didalamnya, dan kedua pihak tersebut saling memiliki hubungan, yaitu antara pihak yang memerintah memiliki kewenangan dan pihak yang diperintah memiliki ketaatan. (Syafiie, 2005:20)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan dalam ketentuan umum bahwa Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada pemerintah daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi.

3. Konsep Kebijakan Publik

Menurut William N. Dunn (2003:132) Kebijakan Publik adalah pola ketergantungan yang kompleks dari pilihan kolektif yang saling tergantung, termasuk keputusan untuk tidak bertindak, yang dibuat oleh Badan atau Kantor pemerintah.

Kebijakan (*policy*) hendaknya dibedakan dengan kebijaksanaan, karena kebijaksanaan merupakan pelaksanaan atas aturan yang sudah diterapkan sesuai situasi dan kondisi setempat oleh pejabat yang berwenang. Sedangkan publik adalah masyarakat umum yang selayaknya diurus, diatur dan dilayani oleh pemerintah sebagai administrator dan penguasa dalam pengaturan hukum.

Dunn (2003:22) mengemukakan bahwa proses pembuatan kebijakan adalah serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan dalam proses kegiatan yang pada dasarnya bersifat politis. Dimana aktivitas politik dijelaskan sebagai serangkaian tahap yang saling bergantung yang diatur menurut urutan waktu, penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakam, implementasi kebijakan dan penilaian kebijakan.

Kebijakan publik dalam kepustakaan internasional disebut dengan *Public Policy*. Dalam Subarsono (2005:2) bahwa kebijakan publik adalah apasaja yang menjadi pilihan pemerintah untuk dilakukan atau untuk tidak dilakukan (*public policy is whatever governments choose to do or not to do*). Kebijakan publik mencakup sesuatu yang tidak dilakukan oleh pemerintah disamping yang dilakukan oleh pemerintah ketika pemerintah sedang menghadapi suatu masalah publik.

Kebijakan publik selalu menitikberatkan pada faktor “pemerintah” (*government*). Artinya adalah bahwa kebijakan publik merupakan fungsi utama dari setiap pemerintahan dalam menjalankan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat umum (publik). Kebijakan publik tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai dan praktik-praktik yang ada dalam masyarakat. Kebijakan publik juga harus mampu mengakomodasikan nilai-nilai dan praktik-praktik yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Kebijakan yang dibuat pada umumnya berupa susunan peraturan perundang-undangan ataupun dalam bentuk program kebijakan untuk mengatur suatu hal yang dianggap dapat mendorong proses pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan.

Setiap kebijakan yang ditetapkan harus memperoleh pengawasan agar dapat dipertanggungjawabkan. Pengawasan tersebut dapat berupa evaluasi kebijakan yang dilaksanakan setelah beberapa waktu atau periode berlalunya suatu kebijakan.

Adapun tahap-tahap dalam proses pembuatan kebijakan diantaranya adalah (Dunn, 2003:24-25):

1. Penyusunan, adapun pada tahap ini para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik, banyak masalah tidak tersentuh samasekali, sementara lainnya ditunda untuk waktu lama.
2. Formulasi kebijakan, dimana pada tahap ini para pejabat merumuskan alternatif kebijakan untuk mengatasi masalah. Alternatif kebijakan

melihat perlunya membuat perintah eksekutif, keputusan peradilan dan tindakan legislatif.

3. Adopsi kebijakan, tahap ini adalah alternatif kebijakan yang diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus di antara direktur lembaga atau keputusan peradilan.
4. Implementasi kebijakan, adalah tahap dimana kebijakan telah diambil dan dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumberdaya finansial dan manusia.
5. Penilaian kebijakan, tahap terakhir yang dimana unit-unit memeriksa dan akutansi dalam pemerintahan menentukan apakah badan-badan Eksekutif, Legislatif, dan Peradilan memenuhi persyaratan Undang-Undang dalam pembuatan kebijakan dan pencapaian tujuan.

4. Konsep Evaluasi

Istilah evaluasi mempunyai arti yang berhubungan, masing-masing merujuk pada aplikasi beberapa skala dan nilai terhadap hasil kebijakan dan program. Secara umum, istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*), dan penilaian (*assessment*), kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya. Dalam arti yang spesifik, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Ketika hasil kebijakan pada kenyataannya mempunyai nilai, hal ini karena hasil yang diperoleh memberi sumbangan pada tujuan atau sasaran. Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa kebijakan atau program telah mencapai tingkat

kinerja yang bermakna, yang berarti bahwa masalah-masalah kebijakan dibuat jelas atau diatasi. (William N. Dunn, 2003:608-610)

Evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan publik, kemudian evaluasi memberikan sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target serta evaluasi memberikan sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi.

Berdasarkan pendapat Dunn diatas dapat disimpulkan bahwa evaluasi merupakan suatu proses kebijakan yang paling penting karena dengan evaluasi kita dapat menilai seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan dengan melalui tindakan publik, dimana dengan hal itu tujuan tertentu dapat dicapai. Ada beberapa sifat evaluasi menurut William N. Dunn (2003:608), evaluasi menghasilkan tuntutan-tuntutan yang bersifat evaluatif.

1. Fokus Nilai

Evaluasi difokuskan pada penilaian yang berkaitan dengan keperluan atau nilai dari sesuatu kebijakan dan program. Evaluasi merupakan usaha untuk menentukan manfaat atau kegunaan sosial kebijakan atau program, dan bukan sekedar usaha untuk mengumpulkan informasi mengenai hasil aksi kebijakan yang terantisipasi dan tidak terantisipasi.

2. Interdependensi Fakta Nilai

Tuntutan evaluasi tergantung baik “fakta” maupun nilai”. Untuk menyatakan kebijakan atau program tertentu telah mencapai tingkat kinerja yang tertinggi (atau rendah) diperlukan tidak hanya hasil kebijakan berharga bagi sejumlah individu, kelompok atau seluruh masyarakat. Untuk menyatakan itu, harus didukung oleh bukti hasil kebijakan secara aktual yang merupakan konsekuensi dari aksi-aksi yang dilakukan untuk memecahkan suatu masalah tertentu. Oleh karena itu, pemantauan merupakan prasyarat bagi evaluasi.

3. Orientasi Masa Kini dan Masa Lampau

Tuntutan evaluative berbeda dengan tuntutan-tuntutan advokatif yang diarahkan pada hasil sekarang dan masa lalu, dibandingkan hasil di masa depan. Evaluasi bersifat retrospektif dan setelah aksi dilakukan (*ex post*). Rekomendasi yang juga mencakup premis-premis nilai, bersifat prospektif dan dibuat sebelum dilakukan aksi.

4. Dualitas Nilai

Nilai yang mendasari tuntutan evaluasi mempunyai kualitas ganda, karena dipandang sebagai tujuan sekaligus suatu cara. Evaluasi sama dengan rekomendasi sejauh berkenaan dengan nilai yang ada (misalnya, kesehatan) dapat dianggap sebagai intrinsik (diperlukan bagi dirinya) ataupun ekstrinsik (diperlukan karena hal itu mempengaruhi pencapaian tujuan-tujuan lain). Nilai-nilai sering ditata didalam suatu hirarki yang nantinya akan merefleksikan kepentingan relatif dan saling ketergantungan antar tujuan serta sasaran.

Menurut William N. Dunn (2003:429-438), ada beberapa kriteria evaluasi:

1. Efektivitas, berkenaan dengan apakah suatu kebijakan dapat mencapai hasil yang diharapkan. Efektivitas ini berkaitan dengan rasionalitas teknik dan selalu diukur dari unit produk atau layanan juga metodenya.
2. Efisiensi, berkenaan dengan seberapa banyak usaha yang diperlukan untuk mencapai tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha. Ukuran yang digunakan dalam kriteria efisiensi adalah jangka waktu pelaksanaan kebijakan dan sumber daya manusia yang diberdayakan dalam melakukan kebijakan.
3. Kecukupan, biasanya berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah.
4. Kesamaan atau perataan, berhubungan erat dengan persoalan biaya dan manfaat yang didistribusikan dengan merata kepada kelompok yang berbeda didalam suatu masyarakat.
5. Responsivitas, berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, prefensi atau nilai ke kelompok tertentu didalam masyarakat.
6. Ketepatan, hal ini berhubungan dengan apakah tujuan yang diinginkan benar-benar berguna dan bernilai di dalam kelompok masyarakat.

Fungsi utama evaluasi, pertama memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan yang telah dicapai melalui tindakan publik. Kedua, evaluasi memberi sumbangan pada klarifikasi juga kritik terhadap nilai-nilai yang mendasar pada pemilihan tujuan dan target, nilai diperjelas dengan mendefinisikan dan mengoperasikan tujuan dan target. Kemudian nilai juga akan dikritik dengan menanyakan secara sistematis kepantasan tujuan dan target dalam hubungan dengan masalah yang dituju yang dapat menganalisis alternatif sumber nilai (misalnya kepentingan kelompok) mampu melandaskan mereka dengan berbagai bentuk rasionalitas (misalnya teknis, ekonomis, legal, sosial, substantif).

Pada umumnya, evaluasi adalah suatu pemeriksaan terhadap pelaksanaan suatu program yang telah dilakukan dan yang akan digunakan untuk meramalkan, memperhitungkan, dan mengendalikan pelaksanaan program agar kedepannya dapat berjalan lebih baik lagi. Evaluasi lebih bersifat melihat kedepan daripada melihat kesalahan yang ada dimasa lalu dan ditujukan pada upaya peningkatan kesempatan demi keberhasilan program. Dengan demikian misi evaluasi itu adalah perbaikan atau penyempurnaan dimasa mendatang atas suatu program.

5. Konsep Program Keluarga Harapan

Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disingkat PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan/atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin yang kemudian diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH.

Keluarga Penerima Pelayanan yang selanjutnya disebut Keluarga Penerima Manfaat adalah keluarga penerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan dalam keputusan.

Penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan adalah pemberian bantuan berupa uang kepada keluarga dan/atau seseorang miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap resiko sosial berdasarkan penetapan pejabat yang menanggung pelaksanaan Program Keluarga Harapan.

Pada Pasal 6 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan menyebutkan bahwa Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan berhak mendapatkan:

- a. Bantuan Sosial PKH;
- b. Pendampingan PKH;
- c. Pelayanan di fasilitas kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial; dan
- d. Program Bantuan Komplementer di bidang kesehatan, pendidikan, subsidi energi, ekonomi, perumahan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.

Selanjutnya dijelaskan bahwa Bantuan Komplementer adalah bantuan berupa uang, barang, dan jasa di bidang kesehatan, pendidikan, subsidi energi, ekonomi, perumahan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya sebagai pelengkap Bantuan Sosial PKH.

Dalam Pasal 7 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan menyebutkan bahwa Keluarga Penerima Manfaat PKH berkewajiban untuk:

- a. Memeriksa kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan protokol kesehatan bagi ibu hamil/menyusui dan anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun;
- b. Mengikuti kegiatan belajar dengan tingkat kehadiran paling sedikit 85% (delapan puluh lima persen) dari hari belajar efektif bagi anak usia sekolah wajib belajar 12 (dua belas) tahun; dan
- c. Mengikuti kegiatan bidang kesejahteraan sosial sesuai dengan kebutuhan bagi keluarga yang memiliki komponen lanjut usia mulai dari 60 (enam puluh) tahun dan/atau penyandang disabilitas berat.

6. Konsep Manajemen

Manajemen menurut Stoner (Dalam Zulkifli, 2009:17) menyatakan bahwa manajemen merupakan proses merencanakan, mengorganisasikan, memimpin dan mengendalikan pekerjaan anggota organisasi dan menggunakan semua sumber daya organisasi untuk mencapai sasaran organisasi yang telah ditetapkan. Dalam semua organisasi pasti selalu diterapkan manajemen, baik organisasi privat maupun organisasi publik, yang mana dalam mencapai tujuan organisasi telah dibagi mengenai tugas dan fungsinya masing-masing.

Selanjutnya menurut Ndraha (2015:159) manajemen yaitu cara untuk menciptakan efektivitas usaha (*doing tright things*) secara efisien (*doing things*

right) dan produktif, melalui fungsi dan siklus tertentu dalam rangka mencapai tujuan organisasional yang telah ditetapkan.

Definisi manajemen juga dikataka oleh George R. Terry (Dalam Zulkifli, 2009:18) bahwa manajemen yakni suatu proses yang khas terdiri dari tindakan-tindakan seperti:

- a. *Planning* (perencanaan), dimana untuk menentukan tujuan yang hendak dicapai selama satu masa yang akan datang dan apa yang harus diperbuat agar dapat mencapai tujuan tersebut.
- b. *Organizing* (pengorganisasian), artinya adalah mengelompokkan, menentukan berbagai kegiatan-kegiatan penting, dan memberikan kekuasaan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut.
- c. *Actuating* (pemberian dorongan), dan
- d. *Controlling* (pengawasan), untuk mengukur pelaksanaan dengan tujuan-tujuan, menentukan sebab penyimpangan dan kemudian mengambil tindakan korektif yang diperlukan. Dimana pada masing-masing bidang digunakan baik ilmu pengetahuan maupun keahlian dan diikuti secara beruntun dalam rangka usaha mencapai sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Manajemen mempunyai tujuan tertentu dan tidak dapat diraba. Ia berusaha untuk mencapai hasil tertentu yang biasanya diungkapkan dengan istilah sepertii objektivitas atau juga hal-hal yang sifatnya nyata.

Berdasarkan pendapat-pendapat diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa manajemen merupakan suatu hal yang mencakup penentuan tujuan,

kemudian bagaimana rencana untuk mencapai tujuan tersebut dengan menggunakan dan memaksimalkan sumber daya yang ada, yang keseluruhannya difokuskan dalam rangka pencapaian tujuan organisasi tersebut.

7. Konsep Tugas Pembantuan

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa Tugas Pembantuan merupakan penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah Kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.

8. Konsep Kesejahteraan Sosial

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial dijelaskan bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi dimana terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial dijelaskan bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial dilakukan berdasarkan asas:

- a. Kesetiakawanan;
- b. Keadilan;
- c. Kemanfaatan;

- d. Keterpaduan;
- e. Kemitraan;
- f. Keterbukaan;
- g. Akuntabilitas;
- h. Partisipasi;
- i. Profesionalitas; dan
- j. Keberlanjutan.

Dalam pasal 3 juga dijelaskan bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial bertujuan:

- a. Meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup;
- b. Memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian;
- c. Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial;
- d. Meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan;
- e. Meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; dan
- f. Meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

9. Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata efektif yang berarti pencapaian keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas juga disebut dengan hasil guna, selain itu efektivitas juga selalu dikaitkan dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai.

Efektivitas selalu berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, dan selalu diukur dari unit produk atau layanan serta nilai moneter. (William N Dunn, 2003:429).

10. Efisiensi

Efisiensi (*efficiency*) lebih berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi merupakan sinonim rasionalitas ekonomi, yang merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha, yang diukur dari ongkos moneter. Efisiensi biasanya ditentukan melalui perhitungan biaya perunit produk atau layanan. Kebijakan yang mencapai efektivitas tertinggi dengan biaya terkecil dinamakan efisiensi. (William N Dunn, 2003:430).

11. Kecukupan

Kecukupan (*adequacy*) yaitu seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Kecukupan dalam kebijakan publik dapat dikatakan tujuan yang telah dicapai sudah dirasakan mencukupi dalam berbagai hal.

12. Perataan

Perataan atau kesamaan (*equity*) erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial yang menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda didalam masyarakat. Kriteria kesamaan juga erat kaitannya dengan konsepsi yang saling bersaing, yaitu antara keadilan atau kewajaran terhadap konflik etis sekitar yang memadai untuk mendistribusikan risoris dalam masyarakat.

Dalam mendefinisikan tujuan secara eksplisit tujuan dari masyarakat secara keseluruhan adalah untuk mengukur kesejahteraan sosial, yaitu kepuasan agregat yang dialami oleh sejumlah komunitas. Namun diketahui, individu dan kelompok mempunyai nilai yang berbeda. Apa yang memuaskan seseorang atau suatu kelompok acap kali tidak memuaskan lainnya. (William N Dunn, 2003:435).

13. Responsivitas

Responsivitas (*responsiveness*) merupakan suatu kebijakan yang dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok masyarakat tertentu. Kriteria responsivitas sangat penting karena analisis yang dapat memuaskan semua kriteria lainnya seperti efektivitas, efisiensi, kecukupan, juga kesamaan ataupun perataan yang masih gagal jika belum menanggapi kebutuhan actual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya suatu kebijakan.

Karena itu, kriteria responsivitas menekankan pada pertanyaan praktis seperti: apakah kriteria efektivitas, efisiensi, kecukupan juga kesamaan secara nyata dapat mencerminkan kebutuhan, prefensi, dan nilai dari kelompok-kelompok tertentu. (William N Dunn, 2003:437-438).

14. Ketepatan

Ketepatan (*appropriateness*) berhubungan dengan rasionalitas substantif, karena pernyataan tentang ketepatan kebijakan tidak berkenaan dengan satuan kriteria individu tetapi dua atau lebih kriteria secara bersama-sama. Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan kepada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut. Kriteria ketepatan lebih mempertanyakan apakah tujuan tersebut tepat untuk suatu masyarakat. (William N Dunn, 2003:438).

B. Kajian Penelitian Terdahulu

Tabel II. 1. : Penelitain Terdahulu Yang Dijadikan Sumber Referensi Dalam Penelitian ini adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	2	3	4	5
1.	Emma Vito Susilo, Djoko Suyono (2018)	Evaluasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Kertasinduyasa Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes (2017)	Persamaan yang ada pada penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang penulis kerjakan adalah sama-sama mengevaluasi Program Pelaksanaan Program Keluarga Harapan.	Perbedaan yang ada pada penelitian Terdahulu dengan yang sedang penulis kerjakan adalah pada tipe yang digunakan, dimana penelitian terdahulu menggunakan tipe penelitain deskriptif dengan metode kualitatif, sedangkan penulis menggunakan

1	2	3	4	5
				<p>metode kuantitatif. Perbedaan selanjutnya terletak pada lokasi penelitian, dimana lokasi penelitian penulis berada di Desa Mekar Jaya Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar.</p>
2.	Ika Ayu Nurrohmah	Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Balongmasin Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto	<p>Persamaan yang ada pada terdahulu dengan penelitian yang sedang penulis kerjakan adalah sama-sama mengevaluasi Program Pelaksanaan Program Keluarga Harapan. Perbedaan selanjutnya adalah Indikator yang digunakan adalah indicator Wiliam N dunn yang meliputi efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan atau</p>	<p>Perbedaan yang ada pada penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang penulis kerjakan adalah pada tipe yang digunakan, dimana penelitian Terdahulu menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan metode kualitatif, sedangkan penulis menggunakan metode kuantitatif. Perbedaan selanjutnya terletak pada lokasi</p>

1	2	3	4	5
			perataan, responsivitas dan ketepatan.	penelitian, dimana lokasi penelitian penulis beradadi Desa Mekar Jaya Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar.

Sumber: Modifikasi Penulis 2020

C. Kerangka Pikir

Kerangka pikiran merupakan penjelasan sementara terhadap gejala-gejala yang menjadi objek permasalahan. Adapun yang menjadi kerangka pikiran dalam penelitian ini mengenai: Evaluasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Di Desa Mekar Jaya Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar.

Gambar 2.1. : Kerangka Pikiran Evaluasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Di Desa Mekar Jaya Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar



Sumber: Modifikasi Penulis 2020

D. Konsep Operasional

Konsep Operasional dari pada variabel penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat.

2. Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disingkat PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan/atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH.
3. Kebijakan Publik adalah pola ketergantungan yang kompleks dari pilihan-pilihan kolektif yang saling tergantung, termasuk keputusan-keputusan untuk tidak bertindak, yang dibuat oleh badan atau Kantor pemerintah.
4. Evaluasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pangsiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*), dan penilaian (*assessment*). Evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, evaluasi memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target, dan evaluasi memberikan sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi.
5. Dalam hal ini pelaksanaan Program Keluarga Harapan berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 terdapat 6 (enam) indikator yang meliputi efektifitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan.

6. Manajemen, mencakup penentuan tujuan, bagaimana rencana untuk mencapai tujuan tersebut dengan menggunakan dan memaksimalkan sumber daya yang ada, yang keseluruhannya difokuskan dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.
7. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah Kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
8. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
9. Efektifitas, menurut Dunn (2003:429) berkenaan dengan apakah suatu kebijakan mencapai hasil yang diharapkan. Efektivitas ini berkaitan dengan rasionalitas teknik, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau metodenya.
10. Efisiensi, menurut Dunn (2003:429) berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektifitas yang dikehendaki.
11. Kecukupan adalah seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan dalam memecahkan suatu masalah.

12. Perataan, berhubungan erat dengan persoalan biaya dan manfaat yang didistribusikan dengan merata kepada kelompok-kelompok yang berbeda didalam suatu masyarakat.
13. Responsivitas, berkenaan dengan apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, prefensi atau nilai kelompok masyarakat.
14. Ketepatan, berkenaan dengan apakah hasil yang diinginkan benar-benar sesuai dengan yang diharapkan atau tidak.

E. Operasional Variabel

Tabel II. 2. : Operasional Variabel Penelitian Evaluasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Di Desa Mekar Jaya Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar

Konsep	Variabel	Indikator	Item Penilaian	Skala Ukuran
1	2	3	4	5
Kebijakan Publik adalah pola ketergantungan yang kompleks dari pilihan-pilihan kolektif yang saling tergantung, termasuk keputusan-keputusan untuk tidak bertindak, yang dibuat oleh badan atau kantor pemerintah. (William N. Dunn, 2003:132)	Evaluasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Mekar Jaya	1. Efektivitas	a. Penetapan tujuan program b. Proses pelaksanaan c. Hasil pelaksanaan program	Ordinal
		2. Efisiensi	a. Ketetapan sasaran b. Ketersediaan dana	Ordinal

1	2	3	4	5
			c. Pengeluaran dana	
		3. Kecukupan	a. kecukupan sarana dan prasarana b. kesiapan pelaksanaan program	Ordinal
		4. Perataan	a. Pemberian pelayanan b. Pelaksanaan pelayanan	Ordinal
		5. Responsivitas	a. Ketetapan sasaran b. Koordinasi pelaksanaan	Ordinal
		6. Ketetapan	a. Keberhasilan tujuan b. Pengkoordinasian program	Ordinal

Sumber: Modifikasi Penulis 2020

F. Teknik Pengukuran

Untuk mengetahui Evaluasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Mekar Jaya Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar maka dibuktikan pengukuran variabel sebagai berikut:

Baik : Apabila semua indikator pada kategori berada pada rentang presentase 67%-100%

Kurang Baik : Apabila semua indikator pada kategori berada pada rentang presentase 34%-66%

Tidak Baik : Apabila semua indikator pada kategori berada pada rentang presentase 0-33%

Adapun pengukuran indikator adalah sebagai berikut:

1. Efektivitas

Efektif : Apabila semua indikator pada kategori berada pada rentang presentase 67%-100%

Kurang Efektif : Apabila semua indikator pada kategori berada pada rentang presentase 34%-66%

Tidak Efektif : Apabila semua indikator pada kategori berada pada rentang presentase 0-33%

2. Efisiensi

Efisien : Apabila semua indikator pada kategori berada pada rentang presentase 67%-100%

Kurang Efisien : Apabila semua indikator pada kategori berada pada rentang presentase 34%-66%

Tidak Efisien : Apabila semua indikator pada kategori berada pada rentang presentase 0-33%

3. Kecukupan

Cukup : Apabila semua indikator pada kategori berada pada rentang presentase 67%-100%

Kurang Cukup : Apabila semua indikator pada kategori berada pada rentang presentase 34%-66%

Tidak Cukup : Apabila semua indikator pada kategori baik berada pada rentang presentase 0-33%

4. Perataan

Merata : Apabila semua indikator pada kategori berada pada rentang presentase 67%-100%

Kurang Merata : Apabila semua indikator pada kategori berada pada rentang presentase 34%-66%

Tidak Merata : Apabila semua indikator pada kategori berada pada rentang presentase 0-33%

5. Responsivitas

Responsiv : Apabila semua indikator pada kategori berada pada rentang presentase 67%-100%

Kurang Responsiv : Apabila semua indikator pada kategori berada pada rentang presentase 34%-66%

Tidak Responsiv : Apabila semua indikator pada kategori berada pada rentang presentase 0-33%

6. Ketepatan

Tepat : Apabila semua indikator pada kategori berada pada rentang presentase 67%-100%

Kurang Tepat : Apabila semua indikator pada kategori berada pada rentang presentase 34%-66%

Tidak Tepat : Apabila semua indikator pada kategori berada pada rentang presentase 0-33%

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Untuk mempermudah penulis dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penelitian, maka tipe yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Campuran. Yang mana penulis mengkombinasikan antara metode Kuantitatif dan Kualitatif. Menurut Creswell didalam bukunya yang berjudul *Research Design* (2016:5) Penelitian Metode Campuran adalah pendekatan yang mengkombinasikan pengumpulan data kuantitatif dan kualitatif, yang menyangkut dengan dugaan-dugaan dari latar belakang suatu masalah dan kerangka teori dari suatu masalah. Pendekatan metode campuran memberikan pemahaman lebih jelas dan rinci daripada hanya menggunakan satu pendekatan.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan rancangan metode campuran Sekuensial Eksplanatori. Pendekatan ini melibatkan dua fase dimana peneliti mengumpulkan data kuantitatif pada fase pertama, menganalisis hasil, dan kemudian menggunakan hasil-hasil dari fase pertama untuk membuat fase kedua yaitu fase kualitatif. Hasil kuantitatif umumnya menginformasikan jenis partisipan untuk dipilih secara sengaja untuk fase kualitatif dan jenis pertanyaan yang akan ditanyakan kepada partisipan. Tujuan rancangan ini secara keseluruhan adalah untuk membantu data kualitatif menerangkan secara detail tentang hasil kuantitatif awal. Prosedur khusus mungkin melibatkan pengumpulan data survei pada fase

pertama, menganalisis data, dan kemudian menindaklanjutinya dengan wawancara kualitatif untuk membantu menerangkan respon survey (Creswell, 2016:299).

Penulis menggunakan metode campuran dengan rancangan sekuensial eksplanatori yang mana untuk mengevaluasi pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Mekar Jaya Kecamatan Kampar Kiri Tengah itu perlu persepsi dari masyarakat Desa Mekar Jaya, kemudian persepsi itu dapat dianalisis lebih dalam melalui wawancara kepada Kepala Desa Mekar Jaya, Kasi Kesra Desa, dan juga Pendamping PKH Desa Mekar Jaya.

B. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi yang digunakan dalam penelitian Evaluasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Mekar Jaya Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar adalah Desa Mekar Jaya.

C. Populasi dan Sampel

Adapun sesuai dengan permasalahan penelitian diatas, maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Pendamping Program Keluarga Harapan dan seluruh masyarakat Desa Mekar Jaya Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar.

Sebagai bentuk kejelasan dari populasi dan sampel dalam penelitian ini dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel III. 1. : Populasi dan Sampel Tentang Evaluasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Mekar Jaya Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar

No.	Sub Populasi	Populasi	Sampel	%
-----	--------------	----------	--------	---

1	2	3	4	5
1.	Kepala Desa	1	1	100%
2.	Kasi Kesra Desa	1	1	100%
3.	Pendamping PKH Desa	1	1	100%
4.	Ketua Kelompok PKH	3	3	100%
5.	Keluarga Miskin Penerima PKH	79	44	55,69%
6.	Keluarga Miskin Non Penerima PKH	12	12	100%
7.	Keluarga dengan Perekonomian Layak Penerima PKH	10	10	100%
	Jumlah	107	72	

Sumber: Modifikasi Penulis 2020

D. Teknik Penarikan Sampel

Teknik penarikan sampel yang digunakan dalam penelitian ini ialah sensus dan purposive sampling dimana pengambilan sampel yang dilakukan yaitu dengan pertimbangan tertentu yang berhubungan dengan penelitian ini dan responden yang dijadikan sampel.

E. Jenis dan Sumber Data

- a. Data Primer ialah data atau keterangan yang diperoleh langsung dari seluruh responden melalui wawancara dan kuesioner.

- b. Data Sekunder ialah data pendukung yang berkenaan dengan pelaksanaan Program Keluarga Harapan, penjelasan umum, teori-teori dan dokumentasi yang relevan dengan masalah penelitian.

F. Teknik Pengumpulan Data

1. Kuesioner

Yaitu suatu cara untuk mengumpulkan data penelitian yang menggunakan daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan terlebih dahulu secara tertulis untuk kemudian diajukan kepada para responden yang diharapkan dapat memberikan jawaban atau informasi sehubungan dengan masalah penelitian.

2. Observasi

Yaitu penulis mengadakan pengamatan langsung terhadap fenomena-fenomena yang akan diteliti sehingga penulis dapat menilai terhadap Evaluasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Mekar Jaya Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar.

3. Dokumentasi

Yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan jalan mengadakan pencatatan-pencatatan atau mengambil gambar-gambar dari dokumen-dokumen yang terdapat di tempat penelitian dan yang ada hubungan dengan masalah yang sedang diteliti.

4. Wawancara

Yaitu teknik pengumpulan data dengan serangkaian daftar pertanyaan yang telah disusun kepada responden untuk dijawab dan dinilai.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
11.	Revisi Skripsi																									
12.	Penggunaan Skripsi																									

Persiapan dan Penyusunan UP (Usulan Penelitian) dilakukan sejak berada pada semester VI



BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Keadaan Geografis Desa Mekar Jaya

Desa Mekar Jaya masuk ke dalam wilayah Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar, dilihat dari arah mata angin posisi wilayah Desa Mekar Jaya adalah:

- Sebelah utara berbatasan dengan Desa Karya Bhakti Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar
- Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Utama Karya Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar
- Sebelah timur berbatasan dengan Desa Sei Simpang Dua Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar
- Sebelah barat berbatasan dengan Desa Utama Karya Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar

Luas wilayah Desa Mekar Jaya yaitu 992,75 m². Untuk mengetahui orbitasi jarak tempuh dari Desa Mekar Jaya ke Ibukota Kecamatan yaitu 13 Km, jarak ke Ibukota Kabupaten yaitu 70 Km, dan jarak ke Ibukota Provinsi yaitu 50 Km. Berdasarkan data topografi yang dimiliki, Desa Mekar Jaya mempunyai bentuk permukaan tanah yang berupa daratan dengan ketinggian 23 m diatas permukaan laut, dengan curah hujan yang sedang.

B. Keadaan Penduduk Desa Mekar Jaya

1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Jumlah masyarakat yang berada di wilayah Desa Mekar Jaya Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada table IV.1. berikut:

Tabel IV. 1. : Jumlah Penduduk Desa Mekar Jaya Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2020

No.	Jenis Kelamin	Jumlah Penduduk	Persentase (%)
1.	Laki-laki	1005	52%
2.	Perempuan	924	48%
	Jumlah	1929	100%

Sumber: Kantor Desa Mekar Jaya 2020

Dari data jumlah penduduk diatas terlihat bahwa banyaknya jumlah penduduk Desa Mekar Jaya berjumlah 1929 jiwa yang terdiri dari 1005 penduduk laki-laki atau sama dengan 52% dan 924 penduduk perempuan atau sama dengan 48%.

2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Kepercayaan

Jumlah penduduk masyarakat yang berada di Desa Mekar Jaya Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar berdasarkan kepercayaan yang dianut dapat dilihat pada table IV.2. berikut:

Tabel IV. 2 : Jumlah Penduduk Desa Mekar Jaya Berdasarkan Kepercayaan Tahun 2020

No.	Agama	Jumlah Penduduk	Persentase (%)
-----	-------	-----------------	----------------

1	2	3	4
1.	Islam	1901	98,55%
2.	Kristen	28	1,45%
3.	Hindu	0	0%
4.	Budha	0	0%
	Jumlah	1929	100%

Sumber: Kantor Desa Mekar Jaya Tahun 2020

Dari data jumlah penduduk diatas terlihat bahwa agama mayoritas penduduk Desa Mekar Jaya adalah Islam sebanyak 1901 penduduk atau sama dengan 98,55% dan kemudian agama minoritas yaitu Kristen sebanyak 28 penduduk atau sama dengan 1,45%.

3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Jumlah masyarakat yang berada di wilayah Desa Mekar Jaya Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar berdasarkan Tingkat Pendidikan dapat dilihat pada table IV.3. berikut:

Tabel IV. 3 : Jumlah Penduduk Desa Mekar Jaya Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2020

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah Penduduk	Persentase (%)
1	2	3	4
1.	TK	14	0,73%
2.	Tamat SD	498	25,82%
3.	Tamat SLTP	463	24%
4.	Tamat SLTA	568	29,45%
5.	Tamat Akademi/PT	386	20%
	Jumlah	1929	100%

Sumber: Kantor Desa Mekar Jaya Tahun 2020

Dari data jumlah penduduk diatas terlihat bahwa di Desa Mekar Jaya penduduk tamatan SLTA merupakan yang terbesar yaitu sebanyak 568 orang atau sama dengan 29,45%, kemudian diikuti oleh penduduk tamatan SD sebanyak 498 orang atau sama dengan 25,82%, selanjutnya penduduk tamatan SLTP sebanyak 463 orang atau sama dengan 24%, kemudian penduduk tamatan Perguruan Tinggi sebanyak 386 orang atau sama dengan 20%, dan penduduk yang tidak sekolah/tamatan TK sebanyak 14 orang atau sama dengan 0,73%.

C. Susunan Organisasi Desa Mekar Jaya

Perangkat Desa Mekar Jaya secara keseluruhan berjumlah 10 orang dengan perincian sebagai berikut:

- a. Kepala Desa : 1 Orang
- b. Sekretaris Desa : 1 Orang
- c. Kepala Urusan : 2 Orang
- d. Kepala Seksi : 1 Orang
- e. Kepala Dusun : 4 Orang

D. Program Keluarga Harapan Desa Mekar Jaya

1. Profil Program Keluarga Harapan Desa Mekar Jaya

Program Keluarga Harapan merupakan salahs atu program percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengembangan system jaminan social melalui pemberian bantuan tunai bersyarat kepada rumah tangga sangat miskin untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, terutama dibidang kesehatan dan pendidikan.

Program Keluarga Harapan di Desa Mekar Jaya Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar diakui keberadaannya melalui Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan.

Program Keluarga Harapan yang dilaksanakan di Kabupaten Kampar salah satunya di Desa Mekar Jaya, Program Keluarga Harapan Desa Mekar Jaya pada Periode 2015-2020 didampingi oleh Bapak Wilham Murdianto. Kemudian terdiri dari beberapa ketua kelompok Program Keluarga Harapan Desa Mekar Jaya, dimana Ketua Kelompok PKH 1 yaitu Tuti Rahayu, Ketua Kelompok PKH 2 yaitu Eka Wati, dan Ketua Kelompok PKH 3 yaitu Sugeng.

Program Keluarga Harapan Desa Mekar Jaya memiliki kelengkapan struktur yang dapat dikatakan cukup baik, hal ini dapat dilihat dari tabel struktur pengurus Program Keluarga Harapan Desa Mekar Jaya sebagai berikut:

Tabel IV. 4 : Susunan Pengurus Program Keluarga Harapan Desa Mekar Jaya Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar

No.	Nama	Jabatan	Keterangan
1	2	3	4
1.	Wilham Murdianto	Pendamping PKH Desa	-
2.	Ekawati	Ketua Kelompok PKH 1	-
3.	Tuti Rahayu	Ketua Kelompok PKH 2	-
4.	Sugeng	Ketua Kelompok PKH 3	-

Sumber: Ketua Kelompok PKH Tahun 2020

2. Tujuan Program Keluarga Harapan

Tujuan utama Program Keluarga Harapan adalah untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia terutama pada kelompok masyarakat miskin di Indonesia. Sedangkan tujuan khusus dari Program Keluarga Harapan sebagaimana terdapat dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan pada Pasal 2 dijelaskan bahwa:

- a. Untuk meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial.
- b. Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan.
- c. Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian keluarga penerima manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial.
- d. Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan, dan
- e. Mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada keluarga penerima manfaat.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis akan menyajikan data-data yang diperoleh dari hasil penelitian di Desa Mekar Jaya Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar. Kemudian dikemukakan analisis tentang pokok pembahasan Evaluasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Mekar Jaya Kecamatan Kmpar Kiri Tengah Kabupaten Kampar.

Berdasarkan hasil penelitian melalui penyebaran kuisioner dan wawancara diperoleh data tentang identitas responden berdasarkan jenis kelamin, usia serta pendidikan terakhir. Selain itu diperoleh juga data tentang Evaluasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Mekar Jaya Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar. Agar pembahasan dalam penelitian ini dapat tersusun sistematis maka penulis membagi dalam tiga sub analisis yaitu analisis terhadap identitas responden, analisis terhadap jawaban responden tentang Evaluasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Mekar Jaya Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar dan hambatan-hambatan dalam Evaluasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Mekar Jaya Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar, untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas dapat dilihat pada sub bab V dibawah ini:

A. Identitas Responden

Responden dalam penelitian ini adalah sebanyak 69 orang yang terdiri dari 3 Ketua Kelompok PKH, 44 Keluarga Miskin Penerima PKH, 12 Keluarga Miskin

Non Penerima PKH, 10 Keluarga Dengan Perekonomian Layak Penerima PKH. Kemudian data-data tersebut didukung oleh hasil wawancara yang penulis lakukan dengan informan-informan dalam penelitian ini yaitu Kepala Desa yaitu Bapak Ponijan, kemudian Kasi Kesra Desa yaitu Bapak Hari Kurniawan, serta Pendamping PKH Desa yaitu Bapak Wilham Murdianto.

Untuk lebih jelas identitas responden yang berasal dari masyarakat Desa Mekar Jaya berdasarkan Jenis Kelamin dapat dilihat pada tabel V.1 dibawah ini:

Tabel V 1 Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin peserta PKH yang menjadi pengurus rumah tangga adalah perempuan, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase (%)
1	2	3	4
1.	Laki-laki	0	0%
2.	Perempuan	69	100%
	Jumlah	69	100%

Sumber: Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2020

Berdasarkan tabel diatas dapat dikemukakan bahwa 100% atau seluruh responden adalah perempuan karena yang menjadi pengurus rumah tangga peserta Program Keluarga Harapan adalah perempuan.

Selanjutnya dari kuisioner yang disebarkan juga terdapat data usia dari setiap responden yang ada, berikut ini merupakan data responden masyarakat Desa Mekar Jaya berdasarkan tingkat usia dapat dilihat pada tabel V.2 dibawah ini:

Tabel V 2 Distribusi Responden Berdasarkan Kelompok Umur

No.	Usia	Jumlah	Persentase
1	2	3	4
1.	21 - 30 Tahun	5	7,25 %
2.	31 - 40 Tahun	27	39,13 %
3.	41 - 50 Tahun	22	31,88 %

1	2	3	4
4.	51 – 60 Tahun	12	17,39 %
5.	Lansia	3	4,35 %
	Jumlah	69	100 %

Sumber: Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2020

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa identitas responden berdasarkan usia, diketahui tingkat usia yang terbanyak adalah usia antara 31 – 40 tahun yaitu sebanyak 27 orang atau sama dengan 39,13% kemudian diikuti oleh usia antara 41 – 50 tahun yaitu sebanyak 22 orang atau sama dengan 31,88% , usia 51-60 tahun sebanyak 12 orang atau sama dengan 17,39% kemudian dilanjutkan dengan usia 21-30 tahun sebanyak 5 orang atau sama dengan 7,25% dan usia pada tingkat lansia sebanyak 3 orang atau sama dengan 4,35%. Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa untuk penelitian ini responden yang dimintai pendapat berada pada kategori usia produktif.

Kemudian dalam identitas responden yang ada pada kuisisioner juga dapat identitas berupa pendidikan terakhir. Untuk melihat identitas responden masyarakat Desa Mekar Jaya berdasarkan pendidikan terakhir, dapat dilihat dari tabel V.3. di bawah ini:

Tabel V 3 Distribusi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1.	SD	30	43,48 %
2.	SLTP	19	27,53 %
3.	SLTA	20	28,99 %
4.	Strata Satu (S1)	0	0%
	Jumlah	69	100%

Sumber: Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2020

Dari tabel diatas dapat dilihat bagaimana tingkat pendidikan responden yang berasal dari masyarakat Desa Mekar Jaya, dimana terlihat pendidikan tertinggi dari

responden adalah SLTA dengan jumlah responden sebanyak 20 orang atau sama dengan 28,99%, selanjutnya diikuti dengan tamatan SLTP sebanyak 19 orang atau sama dengan 27,53%. Kemudian untuk responden tamatan SD sebanyak 30 orang atau sama dengan 43,48%. Dari data tersebut dapat dilihat latar belakang pendidikan responden dalam penelitian ini cukup tinggi sehingga jawaban yang diberikan diharapkan akan lebih baik lagi.

B. Evaluasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Di Desa Mekar Jaya Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar

Pada bagian ini akan dibahas dan dijelaskan mengenai analisis terhadap tanggapan-tanggapan responden yang berasal dari masyarakat at Desa Mekar Jaya terhadap indikator-indikator penelitian Evaluasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Mekar Jaya Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar.

Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Evaluasi yaitu yang memiliki arti yang berhubungan, masing-masing merujuk pada aplikasi beberapa skala dan nilai terhadap hasil kebijakan dan program. Secara umum, istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*), dan penilaian (*assessment*), kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya. Dalam arti yang spesifik, Evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan, yang dikemukakan dalam buku Kebijakan Publik oleh William N Dunn (2003:608-610).

Dimana indikator atau tolak ukur dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Efektivitas
2. Efisiensi

3. Kecukupan
4. Pemerataan
5. Responsivitas
6. Kecukupan

Berikut ini dijelaskan hasil tanggapan responden-responden tersebut terhadap indikator-indikator penelitian diatas mengenai Evaluasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Mekar Jaya Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar:

1. Efektivitas

Indikator efektivitas untuk menilai sejauh mana Program Keluarga Harapan dapat bermanfaat bagi Keluarga Penerima Manfaat PKH. Dimana untuk tanggapan responden yang berasal dari Ketua Kelompok PKH Desa Mekar Jaya dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel V 4 Distribusi Tanggapan Responden Ketua Kelompok PKH Desa Mekar Jaya Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar

No.	Item Penilaian	Kategori			Persentase
		Efektif	Kurang Efektif	Tidak Efektif	
1	2	3	4	5	6
1.	Apakah dengan adanya PKH Keluarga Penerima Manfaat lebih efektif, artinya apakah PKH dapat mengurangi beban pengeluaran Keluarga Penerima Manfaat di Desa Mekar Jaya	3	0	0	3 (100%)
2.	Apakah PKH sudah disalurkan secara tepat sasaran, artinya tidak ada masyarakat dengan perekonomian layak yang	1	2	0	3 (100%)

1	2	3	4	5	6
	menerima bantuan ini sehingga dalam pelaksanaannya berjalan dengan efektif di Desa Mekar Jaya				
	Jumlah	4	2	0	6
	Rata-Rata	2	1	0	3
	Presentase	67%	33%	0%	100%

Sumber: Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2020

Dari tabel V.4. diatas dapat dilihat bahwa untuk tanggapan responden yang berasal dari Ketua Kelompok PKH Desa Mekar Jaya terhadap indikator Efektivitas, untuk kategori Efektif berjumlah 2 orang atau sama dengan 67%. Adapun alasan yang diberikan oleh Ketua Kelompok PKH adalah karena bantuan yang diberikan sudah mampu mengurangi pengeluaran bagi Keluarga Penerima Manfaat PKH Desa Mekar Jaya.

Kemudian untuk tanggapan responden Ketua Kelompok PKH Desa Mekar Jaya pada kategori Kurang Efektif terhadap indikator Efektivitas adalah sebanyak 1 orang atau sama dengan 33%. Alasan yang diberikan Ketua Kelompok PKH adalah karena banyak terjadi keluhan di masyarakat yang menimbulkan kesenjangan social karena program ini belum dapat disalurkan secara tepat sasaran kepada yang berhak menerimanya.

Dari tabel V.4. di atas dapat disimpulkan bahwa untuk tanggapan responden yang berasal dari Ketua Kelompok PKH Desa Mekar Jaya ini berada dalam kategori “Efektif”, dengan jumlah tanggapan responden sebanyak 2 orang atau sama dengan 67% dari total seluruh responden yang berasal dari Ketua Kelompok PKH Desa Mekar Jaya.

Kemudian juga dipaparkan bagaimana tanggapan responden yang berasal dari Keluarga Miskin Penerima PKH Desa Mekar Jaya terhadap item-item pertanyaan dari indikator Efektivitas, dapat dilihat pada tabel V.5 dibawah ini:

Tabel V 5 Distribusi Tanggapan Responden Keluarga Miskin Penerima PKH Desa Mekar Jaya Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar

No.	Item Penilaian	Kategori			Persentase
		Efektif	Kurang Efektif	Tidak Efektif	
1	2	3	4	5	6
1.	Apakah dengan adanya PKH Keluarga Penerima Manfaat lebih efektif, artinya apakah PKH dapat mengurangi beban pengeluaran Keluarga Penerima Manfaat di Desa Mekar Jaya	20	24	0	44 (100%)
2.	Apakah PKH sudah disalurkan secara tepat sasaran, artinya tidak ada masyarakat dengan perekonomian layak yang menerima bantuan ini sehingga dalam pelaksanaannya berjalan dengan efektif di Desa Mekar Jaya	10	30	4	44 (100%)
	Jumlah	30	54	4	88
	Rata-rata	15	27	2	44
	Persentase	34%	61%	5%	100%

Sumber: Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2020

Dari tabel V.5. di atas dapat dilihat bahwa untuk tanggapan responden yang berasal dari Keluarga Miskin Penerima PKH Desa Mekar Jaya terhadap indikator Efektivitas, untuk kategori Efektif berjumlah 15 orang atau sama dengan 34%. Adapun alasan responden yang berasal dari Keluarga Penerima Manfaat PKH Desa

Mekar Jaya ini adalah bahwa selama ini dengan adanya Program Keluarga Harapan sangat membantu dan mengurangi beban pengeluaran keluarga.

Selanjutnya untuk tanggapan responden yang berasal dari Keluarga Penerima Manfaat PKH Desa Mekar Jaya, yang menjawab pada kategori Kurang Efektif terhadap indikator Efektivitas yaitu sebanyak 27 orang atau sama dengan 61%. Dimana alasan responden yang berasal dari Keluarga Penerima Manfaat Desa Mekar Jaya adalah bahwa selain PKH ini dapat membantu pengeluaran bagi keluarga miskin, program ini juga belum tepat sasaran. Artinya masih banyak keluarga yang dikategorikan sudah mampu atau tidak layak menerimanya tetapi menerima bantuan ini.

Kemudian tanggapan responden yang berasal dari Keluarga Penerima Manfaat PKH Desa Mekar Jaya dalam kategori Tidak Efektif terhadap indikator Efektivitas yaitu sebanyak 2 orang atau sama dengan 5%. Adapun alasan responden yang berasal dari Keluarga Penerima Manfaat PKH Desa Mekar Jaya dalam kategori ini adalah karena penyaluran yang dilakukan pada masyarakat masih terbilang tidak efektif, sehingga mengakibatkan kesenjangan sosial didalam masyarakat karena tidak disalurkan secara tepat kepada yang berhak menerimanya.

Dari tabel V.5. di atas dapat disimpulkan bahwa untuk tanggapan responden yang berasal dari Keluarga Miskin Penerima PKH Desa Mekar Jaya ini berada dalam kategori “Kurang Efektif”, dengan jumlah tanggapan responden sebanyak 27 orang atau sama dengan 61% dari total seluruh responden yang berasal dari Keluarga Miskin Penerima PKH Desa Mekar Jaya.

Kemudian juga dipaparkan bagaimana tanggapan responden yang berasal dari Responden Keluarga Miskin Non Penerima PKH Desa Mekar Jaya terhadap item-item pertanyaan dari indikator Efektivitas, dapat dilihat pada tabel V.6 dibawah ini:

Tabel V 6 Distribusi Tanggapan Responden Keluarga Miskin Non Penerima PKH Desa Mekar Jaya Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar

No.	Item Penilaian	Kategori			Persentase
		Efektif	Kurang Efektif	Tidak Efektif	
1	2	3	4	5	6
1.	Apakah dengan adanya PKH Keluarga Penerima Manfaat lebih efektif, artinya apakah PKH dapat mengurangi beban pengeluaran Keluarga Penerima Manfaat di Desa Mekar Jaya	4	8	0	12 (100%)
2.	Apakah PKH sudah disalurkan secara tepat sasaran, artinya tidak ada masyarakat dengan perekonomian layak yang menerima bantuan ini sehingga dalam pelaksanaannya berjalan dengan efektif di Desa Mekar Jaya	0	6	6	12 (100%)
	Jumlah	4	14	6	24
	Rata-rata	2	7	3	12
	Persentase	17%	58%	25%	100%

Sumber: Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2020

Kemudian tanggapan responden yang berasal dari Keluarga Miskin Non Penerima PKH Desa Mekar Jaya dalam kategori Efektif terhadap indikator Efektivitas yaitu sebanyak 2 orang atau sama dengan 17%. Adapun alasan responden yang berasal dari Keluarga Miskin Non Penerima PKH Desa Mekar Jaya

dalam kategori ini adalah karena bantuan yang diperoleh dapat membantu untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari.

Selanjutnya untuk tanggapan responden yang berasal dari Keluarga Non Penerima Manfaat PKH Desa Mekar Jaya dalam kategori Kurang Efektif terhadap indikator Efektivitas adalah sebanyak 7 orang atau sama dengan 58%. Dimana alasan responden Keluarga Non Penerima Manfaat PKH Desa Mekar Jaya adalah karena bantuan yang diperoleh tentunya berbeda dengan Keluarga Penerima Manfaat PKH. Karena untuk bantuan Keluarga Non Penerima PKH hanya sebatas sembako. Sehingga pada kategori ini Keluarga Non penerima PKH cenderung merasa kurang dalam membantu kehidupan sehari-hari.

Kemudian untuk tanggapan responden yang berasal dari Keluarga Non Penerima Manfaat PKH dalam kategori Tidak Efektif terhadap indikator Efektivitas sebanyak 3 orang atau sama dengan 25%. Adapun alasan responden adalah karena bantuan yang diperoleh tidak sesuai dengan yang diharapkan. Hanya saja Keluarga Penerima Manfaat PKH tetap merasa terbantu dengan adanya bantuan ini.

Dari tabel V.6. di atas dapat disimpulkan bahwa untuk tanggapan responden yang berasal dari Keluarga Miskin Non Penerima PKH Desa Mekar Jaya ini berada dalam kategori “Kurang Efektif”, dengan jumlah tanggapan responden sebanyak 7 orang atau sama dengan 58% dari total seluruh responden yang berasal dari Keluarga Miskin Non Penerima PKH Desa Mekar Jaya.

Berikut ini akan dipaparkan juga bagaimana tanggapan responden yang berasal dari Keluarga dengan Perekonomian Layak Penerima PKH Desa Mekar

Jaya terhadap item-item penilaian dari indikator Efektivitas, yang dapat dilihat dari tabel V.7. di bawah ini:

Tabel V 7 Distribusi Tanggapan Responden Keluarga dengan Perekonomian Layak Penerima PKH Desa Mekar Jaya Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar

No.	Item Penilaian	Kategori			Persentase
		Efektif	Kurang Efektif	Tidak Efektif	
1	2	3	4	5	6
1.	Apakah dengan adanya PKH Keluarga Penerima Manfaat lebih efektif, artinya apakah PKH dapat mengurangi beban pengeluaran Keluarga Penerima Manfaat di Desa Mekar Jaya	6	4	0	10 (100%)
2.	Apakah PKH sudah disalurkan secara tepat sasaran, artinya tidak ada masyarakat dengan perekonomian layak yang menerima bantuan ini sehingga dalam pelaksanaannya berjalan dengan efektif di Desa Mekar Jaya	2	8	0	10 (100%)
	Jumlah	8	12	0	20
	Rata-rata	4	6	0	10
	Persentase	40%	60%	0%	100%

Sumber: Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2020

Berdasarkan tabel V.7. diatas bahwa tanggapan responden yang diperoleh dari Keluarga dengan Perekonomian Layak Penerima P23KH Desa Mekar Jaya dalam kategori Efektif terhadap indikator Efektivitas adalah sebanyak 4 orang atau sama dengan 40%. Adapun alasan responden Keluarga dengan Perekonomian Layak Penerima PKH Desa Mekar Jaya adalah karena dengan adanya bantuan ini tentu sangat lebih membantu pengeluaran keluarga. Adapun disini Keluarga dengan

Perekonomian Layak Penerima PKH Desa Mekar Jaya tidak merasa dirinya sudah mampu, sehingga bantuan yang diperoleh tentunya sangat membantu dalam mengurangi beban keluarga.

Selanjutnya untuk tanggapan responden yang diperoleh dari Keluarga dengan Perekonomian Layak Penerima PKH Desa Mekar Jaya dalam kategori Kurang Efektiv terhadap indikator efektivitas berjumlah 6 orang atau sama dengan 60%. Adapun alasan dari Keluarga dengan Perekonomian Layak Penerima PKH Desa Mekar Jaya adalah karena Keluarga dengan Perekonomian Layak Penerima PKH Desa Mekar Jaya merasa bahwa bantuan yang disalurkan belum tepat sasaran dalam pelaksanaannya.

Dari tabel V.7. di atas dapat disimpulkan bahwa untuk tanggapan responden yang berasal dari Keluarga dengan Perekonomian Layak Penerima PKH Desa Mekar Jaya ini berada dalam kategori “Kurang Efektif”, dengan jumlah tanggapan responden sebanyak 6 orang atau sama dengan 60% dari total seluruh responden yang berasal dari Keluarga dengan Perekonomian Layak Penerima PKH Desa Mekar Jaya.

Berikut ini akan dipaparkan juga hasil rekapitulasi tanggapan responden mengenai indikator Efektivitas, sebagai berikut:

Tabel V 8 Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Indikator Efektivitas Terhadap Evaluasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Di Desa Mekar Jaya Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar

No.	Item Penilaian	Kategori Penilaian			Persentase
		Baik	Kurang Baik	Tidak Baik	

1	2	3	4	5	6
1.	Apakah dengan adanya PKH Keluarga Penerima Manfaat lebih efektif, artinya apakah PKH dapat mengurangi beban pengeluaran Keluarga Penerima Manfaat di Desa Mekar Jaya	33	36	0	69 (100%)
2.	Apakah PKH sudah disalurkan secara tepat sasaran, artinya tidak ada masyarakat dengan perekonomian layak yang menerima bantuan ini sehingga dalam pelaksanaannya berjalan dengan efektif di Desa Mekar Jaya	13	46	10	69 (100%)
Jumlah		46	82	10	138
Rata-rata		23	41	5	69
Persentase		33%	59%	8%	100%

Sumber: Hasil Penelitian Lapangan 2021

Berdasarkan tabel V.8. Di atas dapat dilihat bahwa tanggapan responden Mengenai Indikator Efektivitas Terhadap Evaluasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Di Desa Mekar Jaya Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar diketahui bahwa rata-rata dari 69 responden yaitu untuk kategori Baik berjumlah 23 orang atau sama dengan 33%, kategori Kurang Baik Berjumlah 41 orang atau sama dengan 59% dan kategori Tidak Baik berjumlah 5 orang atau sama dengan 8%. Maka dari tabel di atas dapat disimpulkan mengenai Evaluasi Pelaksanaan

Program Keluarga Harapan di Desa Mekar Jaya Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar berada pada kategori Kurang Baik.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan salah satu Keluarga Penerima Manfaat PKH yaitu Ibu Mujianti dikatakan bahwa: (Selasa, 5 Januari 2021, Pukul: 10:20, di Kediaman Ibu Mujianti)

“Menurut saya, memang PKH ini sudah dapat mengurangi beban pengeluaran keluarga ya, walau tidak semua tercukupi. tapi ya saya pribadi juga bersyukur bisa memperoleh program ini. Tetapi jika berbicara tepat sasaran atau tidak menurut saya sejauh ini belum ya, karna memang masih banyak keluarga yang bisa kita katakan mampu tetapi mempeoleh PKH ini. Menurut saya, belum bisa dikategorikan efektif karena sejauh keluarga yang mampu belum mengundurkan diri”.

Juga dilakukan wawancara dengan Pendamping PKH Desa Mekar Jaya, Bapak Wilham Murdianto mengenai indikator Efektivitas, dikatakan bahwa: (Sabtu, 9 Januari 2021, Pukul 14:55, Gedung Serba Guna Desa Mekar Jaya)

“Saya rasa dalam pelaksanaan PKH di Desa Mekar Jaya ini masih dikatakan kurang efektif, dan saya selalu mendorong bagi KPM yang tidak tergolong sangat miskin sebaiknya mundur saja untuk membuka ruang bagi Keluarga lain diluar sana yang termsuk sangat miskin. Kalau KPM yang sudah merasa mampu tetapi tidak mengundurkan diri itu sama saja menghambat yang lain bisa masuk karena kan kuota nya juga terbatas. “

Dapat dilihat dari pernyataan di atas bahwa dalam pelaksanaan PKH di Desa Mekar Jaya masih belum berjalan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan, dimana berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan dapat dilihat bahwa dalam pelaksanaan program ini masih banyak keluarga yang sudah mampu tetapi belum ada kemauan untuk mengundurkan diri.

Kemudian Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan mengenai indikator efektivitas bahwa dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Mekar Jaya masih kurang efektif, karena peneliti menemukan beberapa hal yang dapat

menjelaskan mengapa hal tersebut dapat terjadi. Pertama, berdasarkan wawancara dengan beberapa masyarakat dan yang peneliti cermati bahwa program ini belum sepenuhnya disalurkan kepada yang seharusnya menerima, artinya tidak semua RSTM yang dikategorikan menerima program ini mendapatkannya. Kedua, bantuan yang diperoleh belum sepenuhnya mengurangi beban pengeluaran para KPM PKH, hal ini dapat dilihat dari banyaknya pengeluaran di bandingkan dengan pemasukan daripada KPM PKH.

Dengan demikian berdasarkan hasil tanggapan responden melalui angket atau kuisisioner, hasil wawancara dengan Pendamping PKH Desa Mekar Jaya dan Salah satu anggota Keluarga Penerima Manfaat PKH, dan hasil observasi peneliti dilapangan, maka peneliti menyimpulkan bahwa indikator Efektivitas pada penelitian Evaluasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Mekar Jaya Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar berada pada kategori penilaian “Kurang Baik”.

2. Efisiensi

Indikator Efisiensi untuk mengetahui apakah pelaksanaan PKH di Desa Mekar Jaya selalu sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dan KPM PKH sesuai dengan kriteria PKH. Dimana untuk tanggapan responden yang berasal dari Ketua Kelompok PKH Desa Mekar Jaya dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel V 9 Distribusi Tanggapan Responden Ketua Kelompok PKH Desa Mekar Jaya Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar

No.	Item Penilaian	Kategori			Persentase
		Efisien	Kurang Efisien	Tidak Efisien	

1	2	3	4	5	6
1.	Apakah penerimaan bantuan PKH selalu tepat waktu, artinya Keluarga Penerima Manfaat menerima bantuan PKH setiap bulan sekali sehingga lebih efisien dalam pelaksanaannya di Desa Mekar Jaya	2	1	0	3 (100%)
2.	Apakah PKH setiap tahunnya dilakukan evaluasi, artinya adanya perbaikan dan perubahan terhadap keanggotaan Keluarga Penerima Manfaat PKH yang perubahannya diketahui oleh semua anggota KPM PKH di Desa Mekar Jaya Sehingga dalam pelaksanaannya lebih efisien	2	1	0	3 (100%)
	Jumlah	4	2	0	6
	Rata-rata	2	1	0	3
	Persentase	67%	33%	0%	100%

Sumber: Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2020

Berdasarkan tabel V.9. di atas dapat dilihat bahwa tanggapan responden yang berasal dari Ketua Kelompok PKH Desa Mekar Jaya pada kategori Efisien terhadap indikator Efisiensi berjumlah 2 orang atau sama dengan 67%. Alasan responden Ketua Kelompok PKH ini adalah bahwa dalam penyaluran bantuan PKH selalu tepat waktu dan tidak pernah ada keterlambatan penerimaan. dan juga Ketua Kelompok PKH mengatakan bahwa penerima program ini selalu dievaluasi setiap tahunnya dan perubahannya diketahui oleh semua Keluarga Penerima Manfaat PKH.

Selanjutnya tanggapan responden yang berasal dari Ketua Kelompok PKH Desa Mekar Jaya pada Kategori Kurang Efisien terhadap indikator Efisiensi berjumlah 1 orang atau sama dengan 33%. Adapun alasan Ketua Kelompok PKH

adalah karena saat ini penyaluran yang diberikan per 3 bulan sekali sehingga kurang efisien dalam mengelola pengeluaran keluarga.

Dari tabel V.9. di atas dapat disimpulkan bahwa untuk tanggapan responden yang berasal dari Ketua Kelompok PKH Desa Mekar Jaya ini berada dalam kategori “Efisien”, dengan jumlah tanggapan responden sebanyak 2 orang atau sama dengan 67% dari total seluruh responden yang berasal dari Ketua Kelompok PKH Desa Mekar Jaya.

Kemudian dipaparkan juga bagaimana tanggapan responden yang berasal dari Keluarga Miskin Penerima PKH Desa Mekar Jaya terhadap indikator Efisiensi, dapat dilihat dari tabel V.10. di bawah ini:

Tabel V 10 Distribusi Tanggapan Responden Keluarga Miskin Penerima PKH Desa Mekar Jaya Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar

No.	Item Penilaian	Kategori			Persentase
		Efisien	Kurang Efisien	Tidak Efisien	
	1	2	3	4	5
1.	Apakah penerimaan bantuan PKH selalu tepat waktu, artinya Keluarga Penerima Manfaat menerima bantuan PKH setiap bulan sekali sehingga lebih efisien dalam pelaksanaannya di Desa Mekar Jaya	44	0	0	44 (100%)
2.	Apakah PKH setiap tahunnya dilakukan evaluasi, artinya adanya perbaikan dan perubahan terhadap keanggotaan Keluarga Penerima Manfaat PKH yang perubahannya diketahui oleh semua anggota KPM PKH di Desa	10	30	4	44 (100%)

1	2	3	4	5	6
	Mekar Jaya Sehingga dalam pelaksanaannya lebih efisien				
	Jumlah	54	30	4	88
	Rata-rata	27	15	2	44
	Persentase	61%	34%	5%	100%

Sumber: Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2020

Berdasarkan tabel V.10. di atas dapat dilihat bahwa tanggapan responden yang berasal dari Keluarga Miskin Penerima PKH dalam kategori Efisien terhadap indikator Efisiensi berjumlah 27 orang atau sama dengan 61%. Alasan responden Keluarga Miskin Penerima PKH adalah karena bantuan yang disalurkan memang selalu tepat waktu sesuai dengan yang dijanjikan, juga pada pelaksanaannya memang selalu dilakukan evaluasi.

Selanjutnya untuk tanggapan responden yang berasal dari Keluarga Miskin Penerima PKH dalam kategori Kurang Efisien pada indikator Efisiensi adalah sebanyak 15 orang atau sama dengan 34%. Alasan responden Keluarga Miskin Penerima PKH adalah bahwa saat ini dana yang disalurkan per 3 bulan sekali dinilai kurang efisien dibandingkan dengan penyaluran dana yang disalurkan sebulan sekali, sehingga Keluarga Miskin Penerima PKH kewalahan dalam menentukan kebutuhan apa yang harus didahulukan. Dan juga dalam persoalan evaluasi yang dilakukan oleh tim pelaksana dianggap kurang efisien, karena evaluasi yang dilakukan bisa dikatakan cukup lama. Evaluasi yang dilakukan tidak selalu pasti dan tidak juga dilakukan setiap tahunnya.

Kemudian untuk tanggapan responden yang berasal dari Keluarga Miskin Penerima PKH dalam kategori tidak efisien terhadap indikator Efisiensi adalah sebanyak 2 orang atau sama dengan 5%. Alasan responden Keluarga Miskin

Penerima PKH ini adalah karena tidak ada perubahan keanggotan yang dievaluasi oleh tim pelaksana. Sehingga terjadi kesenjangan sosial didalam masyarakat.

Dari tabel V.10. di atas dapat disimpulkan bahwa untuk tanggapan responden yang berasal dari Keluarga Miskin Penerima PKH Desa Mekar Jaya ini berada dalam kategori “Efisien”, dengan jumlah tanggapan responden sebanyak 27 orang atau sama dengan 61% dari total seluruh responden yang berasal dari Keluarga Miskin Penerima PKH Desa Mekar Jaya.

Selanjutnya akan dipaparkan juga bagaimana tanggapan responden yang berasal dari Keluarga Miskin Non Penerima PKH Desa Mekar Jaya terhadap item-item penilaian dari indikator Efisiensi, yang dapat dilihat dari tabel V.11. di bawah ini:

Tabel V 11 Distribusi Tanggapan Responden Keluarga Miskin Non Penerima PKH Desa Mekar Jaya Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar

No.	Item Pertanyaan	Kategori			Persentase
		Efisien	Kurang Efisien	Tidak Efisien	
1	2	3	4	5	6
1.	Apakah penerimaan bantuan PKH selalu tepat waktu, artinya Keluarga Penerima Manfaat menerima bantuan PKH setiap bulan sekali sehingga lebih efisien dalam pelaksanaannya di Desa Mekar Jaya	12	0	0	12 (100%)
2.	Apakah PKH setiap tahunnya dilakukan evaluasi, artinya adanya perbaikan dan perubahan terhadap keanggotaan Keluarga Penerima Manfaat PKH yang	0	10	2	12 (100%)

1	2	3	4	5	6
	perubahannya diketahui oleh semua anggota KPM PKH di Desa Mekar Jaya Sehingga dalam pelaksanaannya lebih efisien				
	Jumlah	12	10	2	24
	Rata-rata	6	5	1	12
	Persentase	50%	42%	8%	100%

Sumber: Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2020

Berdasarkan tabel V.11. di atas dapat dilihat tanggapan responden Keluarga Miskin Non Penerima PKH Desa Mekar Jaya dalam kategori Efisien terhadap indikator Efisiensi berjumlah 6 orang atau sama dengan 50%. Adapun alasan Keluarga Miskin Non Penerima PKH Desa Mekar Jaya adalah karena bantuan yang diperoleh memang selalu tepat waktu setiap bulannya.

Selanjutnya untuk responden Keluarga Miskin Non Penerima PKH Desa Mekar Jaya dalam kategori Kurang Efisien terhadap indikator Efisiensi adalah sebanyak 5 orang atau sama dengan 42%. Adapun alasan Keluarga Miskin Non Penerima PKH Desa Mekar Jaya adalah bahwa informasi yang diberikan kepada Keluarga Miskin Non Penerima PKH Desa Mekar Jaya sangat minim. Sehingga Keluarga Miskin Non Penerima PKH Desa Mekar Jaya tidak mengetahui kapan waktu pengambilan batuan tersebut.

Kemudian untuk tanggapan responden Keluarga Miskin Non Penerima PKH Desa Mekar Jaya pada kategori Tidak Efisien terhadap indikator Efisiensi berjumlah 1 orang atau sama dengan 8%. Adapun alasan Keluarga Miskin Non Penerima PKH Desa Mekar Jaya adalah karena Keluarga Miskin Non Penerima

PKH Desa Mekar Jaya kurang mengetahui siapa saja yang memperoleh bantuan Non PKH ini, sehingga ada atau tidaknya perubahan juga tidak diketahui.

Dari tabel V.11. di atas dapat disimpulkan bahwa untuk tanggapan responden yang berasal dari Keluarga Miskin Non Penerima PKH Desa Mekar Jaya ini berada dalam kategori “Efisien”, dengan jumlah tanggapan responden sebanyak 6 orang atau sama dengan 50% dari total seluruh responden yang berasal dari Keluarga Miskin Non Penerima PKH Desa Mekar Jaya.

Serta akan dipaparkan juga bagaimana tanggapan responden yang berasal dari Keluarga dengan Perekonomian Layak Penerima PKH Desa Mekar Jaya terhadap item-item penilaian dari indikator Efisiensi, yang dapat dilihat dari tabel V.12. di bawah ini:

Tabel V 12 Distribusi Tanggapan Responden Keluarga dengan Perekonomian Layak Penerima PKH Desa Mekar Jaya Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar

No.	Item Penilaian	Kategori			Persentase
		Efisien	Kurang Efisien	Tidak Efisien	
1	2	3	4	5	6
1.	Apakah penerimaan bantuan PKH selalu tepat waktu, artinya Keluarga Penerima Manfaat menerima bantuan PKH setiap bulan sekali sehingga lebih efisien dalam pelaksanaannya di Desa Mekar Jaya	10	0	0	10 (100%)
2.	Apakah PKH setiap tahunnya dilakukan evaluasi, artinya adanya perbaikan dan perubahan terhadap keanggotaan Keluarga Penerima Manfaat PKH yang Jaya Sehingga	4	6	0	10 (100%)

1	2	3	4	5	6
	dalam pelaksanaannya lebih efisien perubahannya diketahui oleh semua anggota KPM PKH di Desa Mekar				
	Jumlah	14	6	0	20
	Rata-rata	7	3	0	10
	Persentase	70%	30%	0%	100%

Sumber: Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2020

Berdasarkan tabel V.12. diatas dapat dilihat bahwa tanggapan responden Keluarga dengan Perekonomian Layak Penerima PKH Desa Mekar Jaya dalam kategori Efisien terhadap indikator Efisiensi adalah sebanyak 7 orang atau sama dengan 70%. Adapun alasan Keluarga dengan Perekonomian Layak Penerima PKH Desa Mekar Jaya adalah karena bantuan yang diperoleh dari program ini sudah diberikan tepat waktu.

Kemudian untuk tanggapan responden Keluarga dengan Perekonomian Layak Penerima PKH Desa Mekar Jaya dalam kategori Kurang Efisien terhadap indikator Efisiensi adalah sebanyak 3 orang atau sama dengan 30%. Adapun alasan yang diberikam oleh Keluarga dengan Perekonomian Layak Penerima PKH Desa Mekar Jaya adalah karena evaluasi yang dilakukan tidak rutin.

Dari tabel V.12. di atas dapat disimpulkan bahwa untuk tanggapan responden yang berasal dari Keluarga dengan Perekonomian Layak Penerima PKH Desa Mekar Jaya ini berada dalam kategori “Efisien”, dengan jumlah tanggapan responden sebanyak 7 orang atau sama dengan 70% dari total seluruh responden yang berasal dari Keluarga dengan Perekonomian Layak Penerima PKH Desa Mekar Jaya.

Berikut ini akan dipaparkan juga hasil rekapitulasi tanggapan responden mengenai indikator Efisiensi, sebagai berikut:

Tabel V 13 Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Indikator Efisiensi Terhadap Evaluasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Di Desa Mekar Jaya Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar

No.	Item Penilaian	Kategori Penilaian			Persentase
		Baik	Kurang Baik	Tidak Baik	
1.	Apakah penerimaan bantuan PKH selalu tepat waktu, artinya Keluarga Penerima Manfaat menerima bantuan PKH setiap bulan sekali sehingga lebih efisien dalam pelaksanaannya di Desa Mekar Jaya	68	1	0	69 (100%)
2.	Apakah PKH setiap tahunnya dilakukan evaluasi, artinya adanya perbaikan dan perubahan terhadap keanggotaan Keluarga Penerima Manfaat PKH yang perubahannya diketahui oleh semua anggota KPM PKH di Desa Mekar Jaya Sehingga dalam pelaksanaannya lebih efisien	16	47	6	69 (100%)
Jumlah		84	48	6	138
Rata-rata		42	24	3	69
Persentase		61%	35%	4%	100%

Sumber: Hasil Penelitian Lapangan 2020

Berdasarkan tabel V.13. Di atas dapat dilihat bahwa tanggapan responden Mengenai Indikator Efisiensi Terhadap Evaluasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Di Desa Mekar Jaya Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar diketahui bahwa rata-rata dari 69 responden yaitu untuk kategori Baik berjumlah 42 orang atau sama dengan 61%, kategori Kurang Baik Berjumlah 24 orang atau sama dengan 35% dan kategori Tidak Baik berjumlah 3 orang atau sama dengan 4%. Maka berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan mengenai Evaluasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Mekar Jaya Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar berada pada kategori Baik.

Berikut ini berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan salah satu Keluarga Penerima Manfaat PKH yaitu Ibu Apri mengenai indikator Efisiensi dikatakan bahwa: (Selasa, 5 Januari 2021, Pukul: 17:40, di Kediaman Ibu Apri)

“Bantuan ini saya peroleh selalu tepat waktu, sejak pandemi ini untuk bantuan Tunai Anak Sekolah (Pendidikan) dijadikan 3 bulan sekali untuk penerimaannya, dan untuk BPNT atau yang biasa kita sebut dengan bantuan sembako tetap diperoleh satu bulan sekali dan itu rutin. Tetapi menurut saya, lebih efisien jika Bantuan Tunai (Pendidikan) tetap diberikan satu bulan sekali untuk tetap mengontrol pengeluaran anak sekolah yaa. kalau tiga bulan sekali menurut saya beban nya semakin menumpuk dan keperluan juga semakin banyak jadi kurang efisien”.

Ibu Apri juga mengatakan bahwa: (Selasa, 5 Januari 2021, Pukul: 17:40, di Kediaman Ibu Apri)

“Ada evaluasi yang dilakukan untuk program ini, hanya saja tidak rutin setahun sekali. Saya juga tidak mengetahui alasan yang jelas kenapa tidak di evaluasi rutin setahun sekali, padahal menurut saya jika dilakukan secara rutin minimal setahun sekali pasti akan ada transformasi kepesertaan PKH, dari masyarakat yang tadinya tidak masuk menjadi anggota PKH bisa masuk menjadi anggota KPM PKH, tapi sejauh ini evaluasi bisa dikatakan sangat jarang dilakukan”.

Kemudian dilakukan juga wawancara dengan salah satu Keluarga Non Penerima Manfaat PKH Yaitu Ibu Wiwin Herlina mengenai indikator Efisiensi dikatakan bahwa: (Selasa, 5 Januari 2021, Pukul:10:36, di Kediaman Ibu Wiwin Herlina)

“untuk penerimaan bantuan ini selalu rutin setiap bulan ya, saya hanya memperoleh bantuan sembako saja. Untuk bantuan Tunai seperti bantuan anak sekolah saya tidak memperoleh, padahal saya juga memiliki anak sekolah. Tapi ya tidak apa-apa saya tetap bersyukur sudah mendapatkan bantuan sembako yang bisa saya gunakan sehari-hari. Kemudian jika berbicara mengenai evaluasi pada program ini, saya tidak tahu menahu karena tidak ada sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah desa ataupun tim pelaksana. Jadi saya kurang mengetahui ada evaluasi yang dilakukan atau tidak”.

Dapat dilihat dari pernyataan di atas bahwa dalam pelaksanaan PKH di Desa Mekar Jaya sudah tepat waktu, hanya saja tidak ada sosialisasi yang dilakukan oleh Keluarga Non Penerima Bantuan PKH sehingga ada atau tidak nya perubahan ataupun transformasi kepesertaan tidak diketahui oleh Keluarga Non Penerima Manfaat. Sosialisasi yang dilakukan hanya untuk Keluarga Penerima Manfaat PKH.

Kemudian Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan, mengenai indikator Efisiensi bahwa bantuan PKH sudah disalurkan secara tepat waktu. Rutinnya memang satu bulan sekali. Hanya saja pasca adanya pandemic, penerimaan bantuan PKH ini dirangkap menjadi tiga bulan sekali untuk Bantuan Tunai seperti bantuan Pendidikan dan Kesehatan. Berdasarkan hal tersebut, banyak keluhan kesah masyarakat yang mengatakan bahwa perubahan tersebut menjadikan para KPM PKH sulit mengontrol pengeluaran anak setiap bulannya. Sehingga Para KPM PKH juga merasa kewalahan, karena mereka sudah amat bergantung pada bantuan ini. Kemudian, mengenai evaluasi dan transformasi kepesertaan PKH pada

Desa Mekar Jaya belum dilakukan secara rutin. Hal tersebut peneliti simpulkan karena data yang digunakan tidak sesuai dengan kondisi yang ada dilapangan. Menurut peneliti sendiri bahwa kesalahan ini terjadi pada saat dilakukan pendataan penerima PKH yang tidak diseleksi secara detail pada saat musyawarah desa yang dilakukan oleh perangkat Desa Mekar Jaya.

Namun diluar dari hal tersebut, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang diberikan seperti sembako dan keperluan bahan pokok sehari-hari tetap diberikan rutin satu bulan sekali dan tidak ada keterlambatan. Hal tersebut dapat membantu para Keluarga Penerima Manfaat PKH dalam mengurangi beban pengeluaran keluarga setiap bulannya.

Dengan demikian berdasarkan hasil tanggapan responden melalui angket atau kuisisioner, hasil wawancara dengan beberapa anggota Keluarga Penerima Manfaat PKH, dan hasil observasi peneliti dilapangan, maka peneliti menyimpulkan bahwa indikator Efisiensi pada penelitian Evaluasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Mekar Jaya Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar berada pada kategori penilaian “Baik”.

3. Kecukupan

Indikator Kecukupan untuk mengetahui apakah pelaksanaan PKH dapat memberikan kecukupan dalam membantu perekonomian KPM di Desa Mekar Jaya. Dimana untuk tanggapan responden yang berasal dari Ketua Kelompok PKH Desa Mekar Jaya dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel V 14 Distribusi Tanggapan Responden Ketua Kelompok PKH Desa Mekar Jaya Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar

No.	Item Penilaian	Kategori			Persentase
		Cukup	Kurang Cukup	Tidak Cukup	
1	2	3	4	5	6
1.	Bagaimana kondisi setelah menerima bantuan PKH, merasa lebih cukup atau tidak	2	1	0	3 (100%)
2.	Apakah sosialisasi PKH yang dilaksanakan oleh tim pelaksana sudah cukup memuaskan dan dapat dengan mudah dimengerti oleh para Keluarga Penerima Manfaat PKH	2	1	0	3 (100%)
	Jumlah	4	2	0	6
	Rata-rata	2	1	0	3
	Persentase	67%	33%	0%	100%

Sumber: Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2020

Bersasarkan tabel V.14. di atas dapat dilihat bahwa tanggapan responden yang berasal dari Ketua Kelompok PKH Desa Mekar Jaya pada kategori Cukup terhadap Indikator Kecukupan adalah berjumlah 2 orang atau sama dengan 67%. Adapun alasan Ketua Kelompok PKH Desa Mekar Jaya adalah bahwa bantuan yang diberikan sudah cukup dalam membantu memenuhi kebutuhan keluarga. Juga dalam hal pendampingan yang dilakukan oleh tim pendamping sudah sangat memuaskan karena sosialisasi yang dilakukan sangat bermanfaat dan mudah dimengerti oleh setiap anggota KPM PKH. Materi yang diberikan juga beragam sebagai bekal perbaikan dalam pelaksanaan program ini.

Kemudian untuk tanggapan responden Ketua Kelompok PKH Desa Mekar Jaya dalam kategori Kurang Cukup terhadap indikator Kecukupan sebanyak 1

orang atau sama dengan 33%. Alasan yang diberikan Ketua Kelompok PKH Desa Mekar Jaya adalah bahwa bantuan yang diperoleh belum bisa sepenuhnya membantu mengurangi kebutuhan keluarga yang cukup banyak.

Dari tabel V.14. di atas dapat disimpulkan bahwa untuk tanggapan responden yang berasal dari Ketua Kelompok PKH Desa Mekar Jaya ini berada dalam kategori “Cukup”, dengan jumlah tanggapan responden sebanyak 2 orang atau sama dengan 67% dari total seluruh responden yang berasal dari Ketua Kelompok PKH Desa Mekar Jaya.

Selanjutnya dipaparkan juga bagaimana tanggapan responden yang berasal dari Keluarga Penerima Manfaat PKH Desa Mekar Jaya terhadap indikator Kecukupan, dapat dilihat dari tabel V.15. di bawah ini:

Tabel V 15 Distribusi Tanggapan Responden Keluarga Penerima Manfaat PKH Desa Mekar Jaya Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar

No.	Item Penilaian	Kategori			Persentase
		Cukup	Kurang Cukup	Tidak Cukup	
1	2	3	4	5	6
1.	Bagaimana kondisi setelah menerima bantuan PKH, merasa lebih cukup atau tidak	8	26	10	44 (100%)
2.	Apakah sosialisasi PKH yang dilaksanakan oleh tim pelaksana sudah cukup memuaskan dan dapat dengan mudah dimengerti oleh para Keluarga Penerima Manfaat PKH	38	6	0	44 (100%)
	Jumlah	46	32	10	88
	Rata-rata	23	16	5	44
	Persentase	52%	36%	12%	100%

Sumber: Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2020

Berdasarkan tabel V.15 diatas dapat dilihat bahwa tanggapan responden Keluarga Penerima Manfaat PKH Desa Mekar Jaya dalam kategori Cukup terhadap indikator Kecukupan adalah sebanyak 23 orang atau sama dengan 52%. Alasan yang diberikan oleh Keluarga Penerima Manfaat PKH Desa Mekar Jaya adalah karena bantuan yang diperoleh sudah sangat cukup untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari dibandingkan sebelum adanya program ini. Dan dalam pendampingan PKH yang dilakukan oleh tim pelaksana, selama dilakukan pertemuan rutin setiap bulan sekali materi-materi yang diberikan sangat mudah dipahami dan bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Selanjutnya untuk tanggapan responden Keluarga Penerima Manfaat PKH Desa Mekar Jaya dalam kategori Kurang Cukup terhadap indikator Kecukupan berjumlah 16 orang atau sama dengan 36%. Adapun alasan yang diberikan Keluarga Penerima Manfaat PKH Desa Mekar Jaya adalah meskipun bantuan yang diberikan sudah sesuai dengan perolehan masing-masing, tetapi tetap saja masih kurang dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Karena pengeluaran juga tidak bisa dipastikan setiap bulannya.

Kemudian tanggapan responden yang berasal dari Keluarga Penerima Manfaat PKH Desa Mekar Jaya dalam kategori Tidak Cukup terhadap Indikator Kecukupan adalah sebanyak 5 orang atau sama dengan 12%. Alasannya karena keadaan yang bisa dikatakan sangat miskin sehingga bantuan yang diperoleh juga belum bisa dirasakan manfaatnya seutuhnya oleh Keluarga Penerima Manfaat PKH Desa Mekar Jaya, sehingga masih merasa tidak cukup.

Dari tabel V.15. di atas dapat disimpulkan bahwa untuk tanggapan responden yang berasal dari Keluarga Penerima Manfaat PKH Desa Mekar Jaya ini berada dalam kategori “Cukup”, dengan jumlah tanggapan responden sebanyak 23 orang atau sama dengan 52% dari total seluruh responden yang berasal dari Keluarga Penerima Manfaat PKH Desa Mekar Jaya.

Kemudian dipaparkan juga bagaimana tanggapan responden yang berasal dari Keluarga Miskin Non Penerima PKH Desa Mekar Jaya terhadap item-item pertanyaan dari indikator Kecukupan, dapat dilihat dari tabel V.16. di bawah ini:

Tabel V 16 Distribusi Tanggapan Responden Keluarga Miskin Non Penerima PKH Desa Mekar Jaya Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar

No.	Item Penilaian	Kategori			Persentase
		Cukup	Kurang Cukup	Tidak Cukup	
1	2	3	4	5	6
1.	Bagaimana kondisi setelah menerima bantuan PKH, merasa lebih cukup atau tidak	0	2	10	12 (100%)
2.	Apakah sosialisasi PKH yang dilaksanakan oleh tim pelaksana sudah cukup memuaskan dan dapat dengan mudah dimengerti oleh para Keluarga Penerima Manfaat PKH	0	8	4	12 (100%)
	Jumlah	0	10	14	24
	Rata-rata	0	5	7	12
	Persentase	0%	42%	58%	100%

Sumber: Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2020

Untuk tanggapan responden yang berasal dari Keluarga Miskin Non Penerima PKH Desa Mekar Jaya dalam kategori Kurang Cukup terhadap indikator Kecukupan sebanyak 5 orang atau sama dengan 42%. Alasan yang diberikan adalah

bahwa bantuan yang diperoleh terlalu sedikit sehingga belum bisa membantu sepenuhnya dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari.

Kemudian untuk tanggapan responden yang berasal dari Keluarga Miskin Non Penerima PKH Desa Mekar Jaya pada kategori Tidak Cukup terhadap indikator Kecukupan berjumlah 7 orang atau sama dengan 58%. Alasan yang diberikan beragam, salah satunya adalah karena memang bantuan yang diberikan hanya sembako saja, jadi tidak cukup untuk pemenuhan kebutuhan. Bahkan Keluarga Miskin Non Penerima PKH Desa Mekar Jaya juga mengatakan bahwa bantuan yang diperoleh tidak sesuai dengan yang diharapkan. Untuk persoalan sosialisasi yang dilakukan oleh tim pelaksana atau pendamping Keluarga Miskin Non Penerima PKH Desa Mekar Jaya tidak tahu-menahu soal itu, karena sejauh ini memang tidak ada pertemuan yang dilakukan.

Dari tabel V.16. di atas dapat disimpulkan bahwa untuk tanggapan responden yang berasal dari Keluarga Non Penerima Manfaat PKH Desa Mekar Jaya ini berada dalam kategori “Tidak Cukup”, dengan jumlah tanggapan responden sebanyak 7 orang atau sama dengan 58% dari total seluruh responden yang berasal dari Keluarga Non Penerima Manfaat PKH Desa Mekar Jaya.

Serta akan dipaparkan juga bagaimana tanggapan responden yang berasal dari Keluarga dengan Perekonomian Layak Penerima PKH Desa Mekar Jaya terhadap item-item pertanyaan dari indikator Kecukupan, dapat dilihat dari tabel V.17. di bawah ini:

Tabel V 17 Distribusi Tanggapan Responden Keluarga dengan Perekonomian Layak Penerima PKH Desa Mekar Jaya Kecamatan ampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar

No.	Item Penilaian	Kategori			Persentase
		Cukup	Kurang Cukup	Tidak Cukup	
1	2	3	4	5	6
1.	Bagaimana kondisi setelah menerima bantuan PKH, merasa lebih cukup atau tidak	4	6	0	10 (100%)
2.	Apakah sosialisasi PKH yang dilaksanakan oleh tim pelaksana sudah cukup memuaskan dan dapat dengan mudah dimengerti oleh para Keluarga Penerima Manfaat PKH	8	2	0	10 (100%)
	Jumlah	12	8	0	20
	Rata-rata	6	4	0	10
	Persentase	60%	40%	0%	100%

Sumber: Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2020

Berdasarkan tabel V.17. di atas dapat dilihat tanggapan responden Keluarga dengan Perekonomian Layak Penerima PKH Desa Mekar Jaya pada kategori Cukup terhadap indikator Kecukupan berjumlah 6 orang atau sama dengan 60%. Alasan Keluarga dengan Perekonomian Layak Penerima PKH Desa Mekar Jaya adalah karena bantuan yang diberikan dapat membantu mengurangi pengeluaran sehari-hari. Keluarga dengan Perekonomian Layak Penerima PKH Desa Mekar Jaya juga menyampaikan bahwa pendampingan yang dilakukan oleh tim sudah cukup baik karena materi-materi yang disampaikan mudah dipahami.

Selanjutnya untuk tanggapan responden yang berasal dari Keluarga dengan Perekonomian Layak Penerima PKH Desa Mekar Jaya pada kategori Kurang Cukup terhadap indikator Kecukupan adalah sebanyak 4 orang atau sama dengan

40%. Alasan yang diberikan oleh Keluarga dengan Perekonomian Layak Penerima PKH Desa Mekar Jaya adalah karena bantuan yang diperoleh dianggap belum membantu pengeluaran keluarga.

Dari tabel V.17. di atas dapat disimpulkan bahwa untuk tanggapan responden yang berasal dari Keluarga dengan Perekonomian Layak Penerima PKH Desa Mekar Jaya ini berada dalam kategori “Cukup”, dengan jumlah tanggapan responden sebanyak 6 orang atau sama dengan 60% dari total seluruh responden yang berasal dari Keluarga dengan Perekonomian Layak Penerima PKH Desa Mekar Jaya.

Berikut ini akan dipaparkan juga hasil rekapitulasi tanggapan responden mengenai indikator Kecukupan, sebagai berikut:

Tabel V 18 Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Indikator Efisiensi Terhadap Evaluasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Di Desa Mekar Jaya Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar

No.	Item Penilaian	Kategori Penilaian			Persentase
		Baik	Kurang Baik	Tidak Baik	
1.	Bagaimana kondisi setelah menerima bantuan PKH, merasa lebih cukup atau tidak	14	35	20	69 (100%)
2.	Apakah sosialisasi PKH yang dilaksanakan oleh tim pelaksana sudah cukup memuaskan dan dapat dengan mudah dimengerti oleh para Keluarga Penerima Manfaat PKH	48	17	4	69 (100)
Jumlah		62	52	24	138
Rata-Rata		31	26	12	69
Persentase		45%	38%	17%	100%

Sumber: Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2020

Berdasarkan tabel V.18. Di atas dapat dilihat bahwa tanggapan responden Mengenai Indikator Kecukupan Terhadap Evaluasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Di Desa Mekar Jaya Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar diketahui bahwa rata-rata dari 69 responden yaitu untuk kategori Baik berjumlah 31 orang atau sama dengan 45%, kategori Kurang Baik Berjumlah 26 orang atau sama dengan 38% dan kategori Tidak Baik berjumlah 12 orang atau sama dengan 17%. Maka berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan mengenai Evaluasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Mekar Jaya Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar berada pada kategori Baik.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan salah satu masyarakat desa Mekar Jaya yang memperoleh bantuan PKH ini yaitu Ibu Indah Kurnia Sari mengenai indikator Kecukupan dikatakan bahwa: (Selasa, 5 Januari 2021, Pukul:10:58, di Kediaman Ibu Indah Kurnia Sari)

“Menurut saya sejauh ini bantuan yang saya peroleh sudah dapat mencukupi kebutuhan keluarga ya, dan sosialisasi materi-materi yang diberikan oleh pendamping PKH Desa Mekar Jaya juga dapat mudah dipahami. Pendamping PKH Desa Bapak Wilham selalu menegaskan kepada kami KPM PKH agar tidak terus menerus bergantung kepada bantuan yang diperoleh, karena bantuan ini kan sifatnya hanya sementara”.

Berdasarkan hasil wawancara yang juga penulis lakukan dengan Pendamping PKH Desa Mekar Jaya, Bapak Wilham Murdianto mengenai indikator kecukupan, dikatakan bahwa: (Sabtu, 9 Januari 2020, Pukul 14:55, Gedung Serba Guna Desa Mekar Jaya)

“Sejauh pendampingan yang kami lakukan selama ini cukup membantu, khusus nya bagi masyarakat yang menerima program. Bantuan terdiri dari bantuan untuk anak sekolah mulai dari SD, SMP dan SMA. Kemudian jika terdapat komponen lansia, disabilitas, penderita TBC, kemudian untuk ibu hamil dalam membantu nutrisi anak usia dini. Bantuan yang diberikan bukan hanya berupa uang saja, melainkan dilakukan pendampingan, pelayanan fasilitas kesehatan serta

fasilitas pendidikan. Penerima PKH ini juga diwajibkan untuk memperoleh subsidi listrik, BPNT (sembako), dan saya rasa ini sangat membantu untuk meringankan beban. Dimana program ini sejalan dengan tujuan pemerintah adalah untuk mengeluarkan rakyatnya dari belenggu kemiskinan.”

Dapat dilihat dari pernyataan di atas bahwa dalam pelaksanaan PKH di Desa Mekar Jaya cukup baik dan sesuai dengan yang diharapkan, dimana berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan dapat dilihat bahwa dalam dengan adanya program ini dapat mengurangi beban pengeluaran keluarga dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Kemudian Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan, mengenai indikator Kecukupan bahwa PKH sudah cukup membantu para KPM PKH, tetapi tidak semua KPM PKH juga merasa tercukupi dengan adanya bantuan ini. Menurut KPM PKH bantuan yang diperoleh masih terbilang sedikit dan belum sepenuhnya dapat membantu. Hal tersebut berdasarkan pengamatan yang peneliti lakukan, dimana masih banyak KPM PKH yang melakukan simpan pinjam dengan bank-bank harian yang ada di sekeliling Desa, itu membuktikan bahwa bantuan ini belum mencukupi pengeluaran keluarga KPM PKH. Kemudian, mengenai sosialisasi yang dilakukan oleh Pendamping PKH Desa Mekar Jaya, menurut peneliti pertemuan yang dilakukan sudah rutin satu bulan sekali, tidak menentu bisa diawal, pertengahan atau bahkan akhir bulan. Artinya setiap satu bulan sekali pasti dilakukan pertemuan, yang pada saat pertemuan diberikan materi-materi yang dapat mendukung KPM PKH untuk dapat lebih mandiri dan tidak bergantung terhadap bantuan ini. Pada pertemuan rutin yang dilakukan oleh tim pelaksana, Pendamping PKH selalu mengingatkan bagi masyarakat yang merasa sudah mampu tetapi masih memperoleh bantuan ini agar mengundurkan diri dengan sendirinya atau yang

disebut dengan graduasi mandiri, bukan karena adanya paksaan dari pihak manapun.

Dengan demikian berdasarkan hasil tanggapan responden melalui angket atau kuisisioner, hasil wawancara dengan Pendamping PKH Desa Mekar Jaya dan salah satu anggota Keluarga Penerima Manfaat PKH, dan hasil observasi peneliti dilapangan, maka peneliti menyimpulkan bahwa indikator Kecukupan pada penelitian Evaluasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Mekar Jaya Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar berada pada kategori penilaian “Baik”.

4. Perataan

Indikator Perataan untuk mengetahui apakah dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Mekar Jaya telah didistribusikan secara merata kepada kelompok sasaran dan juga bantuan yang disalurkan sudah sesuai dengan kondisi KPM dilapangan. Dimana untuk tanggapan responden yang berasal dari Ketua Kelompok PKH Desa Mekar Jaya dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel V 19 Distribusi Tanggapan Responden Ketua Kelompok PKH Desa Mekar Jaya Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar

No.	Item Penilaian	Kategori			Persentase
		Merata	Kurang Merata	Tidak Merata	
1	2	3	4	5	6
1.	Apakah dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan sudah didistribusikan secara merata kepada setiap kelompok sasaran dan	3	0	0	3 (100%)

1	2	3	4	5	6
	mendapatkan hak yang sesuai				
2.	Apakah data-data yang digunakan dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan sudah sesuai dengan kondisi dilapangan sehingga Program Keluarga Harapan bisa dilaksanakan secara merata	3	0	0	3 (100%)
	Jumlah	6	0	0	6
	Rata-rata	3	0	0	3
	Persentase	100%	0%	0%	100%

Sumber: Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2020

Berdasarkan tabel V.19. di atas dapat dilihat bahwa tanggapan responden yang berasal dari Ketua Kelompok PKH pada kategori Merata terhadap indikator Perataan adalah sebanyak 3 orang atau sama dengan 100%. Alasan Ketua Kelompok PKH Desa Mekar Jaya adalah karena bantuan yang disalurkan sudah merata kepada setiap kelompok masyarakat yang dilakukan berdasarkan survei lapangan yang dilakukan oleh tim pelaksana dan musyawarah desa yang dilakukan oleh pemerintah Desa Mekar Jaya.

Dari tabel V.19. di atas dapat disimpulkan bahwa untuk tanggapan responden yang berasal dari Ketua Kelompok PKH Desa Mekar Jaya ini berada dalam kategori “Merata”, dengan jumlah tanggapan responden sebanyak 3 orang atau sama dengan 100% dari total seluruh responden yang berasal dari Ketua Kelompok PKH Desa Mekar Jaya.

Kemudian akan dipaparkan juga bagaimana tanggapan responden yang berasal dari Keluarga Miskin Penerima PKH Desa Mekar Jaya terhadap item-item pertanyaan dari indikator Perataan, dapat dilihat dari tabel V.20. di bawah ini:

Tabel V 20 Distribusi Tanggapan Responden Keluarga Miskin Penerima PKH Desa Mekar Jaya Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar

No.	Item Penilaian	Kategori			Persentase
		Merata	Kurang Merata	Tidak Merata	
1	2	3	4	5	6
1.	Apakah dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan sudah didistribusikan secara merata kepada setiap kelompok sasaran dan mendapatkan hak yang sesuai	6	38	0	44 (100%)
2.	Apakah data-data yang digunakan dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan sudah sesuai dengan kondisi lapangan sehingga Program Keluarga Harapan bisa dilaksanakan secara merata	8	32	4	44 (100%)
	Jumlah	14	70	4	88
	Rata-rata	7	35	2	44
	Persentase	16%	80%	4%	100%

Sumber: Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2020

Berdasarkan tabel V.20. di atas dapat dilihat tanggapan responden yang berasal dari Keluarga Miskin Penerima PKH dalam kategori Merata terhadap indikator Perataan adalah sebanyak 7 orang atau sama dengan 16%. Alasan Keluarga Miskin Penerima PKH adalah karena bantuan ini memang sudah disalurkan sesuai dengan kelompok sasaran dan berdasarkan keadaan Keluarga Miskin Penerima PKH di lapangan.

Kemudian untuk tanggapan responden yang berasal dari Keluarga Miskin Penerima PKH dalam kategori Kurang Merata terhadap indikator Perataan berjumlah 35 orang atau sama dengan 80%. Ini artinya Keluarga Miskin Penerima

PKH banyak yang mengatakan bahwa program ini memang sudah dilaksanakan sesuai dengan prosedur PKH. Hanya saja belum dapat dikatakan sudah merata, karena ada beberapa keluarga yang sudah mampu tetapi memperoleh bantuan ini, sedangkan keluarga yang seharusnya memperoleh bantuan ini tetapi tidak memperoleh. Sehingga bantuan yang disalurkan Di Desa Mekar Jaya ini belum sesuai sepenuhnya dengan keadaan yang ada dilapangan.

Selanjutnya untuk tanggapan responden yang berasal dari Keluarga Miskin Penerima PKH Desa Mekar Jaya dalam kategori Tidak Merata terhadap indikator Perataan adalah sebanyak 2 orang atau sama dengan 4%. Alasan yang diberikan oleh Keluarga Miskin Penerima PKH Desa Mekar Jaya adalah karena mereka menganggap bahwa program ini tidak didistribusikan secara merata karena masih banyak keluarga yang seharusnya layak memperoleh bantuan ini dan sudah sesuai dengan kategori penerima PKH tetapi tidak memperoleh.

Dari tabel V.20. di atas dapat disimpulkan bahwa untuk tanggapan responden yang berasal dari Keluarga Penerima Manfaat PKH Desa Mekar Jaya ini berada dalam kategori “Kurang Merata”, dengan jumlah tanggapan responden sebanyak 35 orang atau sama dengan 80% dari total seluruh responden yang berasal dari Keluarga Penerima Manfaat PKH Desa Mekar Jaya.

Kemudian akan dipaparkan juga bagaimana tanggapan responden yang berasal dari Keluarga Miskin Non Penerima PKH Desa Mekar Jaya terhadap item-item pertanyaan dari indikator Perataan, dapat dilihat dari tabel V.21. di bawah ini:

Tabel V 21 Distribusi Tanggapan Responden Keluarga Miskin Non Penerima PKH Desa Mekar Jaya Kecamatan Kampar iri Tengah Kabupaten Kampar

No.	Item Penilaian	Kategori			Persentase
		Merata	Kurang Merata	Tidak Merata	
1	2	3	4	5	6
1.	Apakah dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan sudah didistribusikan secara merata kepada setiap kelompok sasaran dan mendapatkan hak yang sesuai	0	8	4	12 (100%)
2.	Apakah data-data yang digunakan dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan sudah sesuai dengan kondisi lapangan sehingga Program Keluarga Harapan bisa dilaksanakan secara merata	0	8	4	12 (100%)
	Jumlah	0	16	8	24
	Rata-rata	0	8	4	12
	Persentase	0%	67%	33%	100%

Sumber: Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2020

Dari tabel V.21. diatas dapat dilihat bahwa tanggapan responden yang berasal dari Keluarga Miskin Non Penerima PKH Desa Mekar Jaya dalam kategori Kurang Merata terhadap indikator Perataan adalah sebanyak 8 orang atau sama dengan 67%. Adapun alasan yang diberikan oleh Keluarga Miskin Non Penerima PKH Desa Mekar Jaya adalah karena para penerima bantuan yang berasal dari Keluarga Miskin Non Penerima PKH Desa Mekar Jaya tidak mengetahui jelas bagaimana penyalurannya dan data-data yang digunakan sesuai atau tidak seperti yang ada dilapangan. Karena untuk Keluarga Miskin Non Penerima PKH Desa Mekar Jaya tidak ada pendampingan yang dilakukan oleh tim. Sehingga Keluarga

Miskin Non Penerima PKH Desa Mekar Jaya hanya diberikan informasi ketika bantuan datang saja.

Kemudian berdasarkan tanggapan responden yang berasal dari Keluarga Miskin Non Penerima PKH Desa Mekar Jaya dalam kategori Tidak Merata terhadap indikator Perataan adalah sebanyak 4 orang atau sama dengan 33%. Alasan yang diberikan karena meskipun bantuan yang diperoleh sudah sesuai dengan prosedur namun bantuan yang ada berdasarkan pengelihatian dilapangan belum sesuai dengan yang diharapkan. Karena masih banyak orang-orang yang mampu yang memperoleh bantuan ini. Padahal seharusnya bantuan ini hanya untu masyarakat yang memiliki perekonomian yang sangat rendah.

Dari tabel V.21. di atas dapat disimpulkan bahwa untuk tanggapan responden yang berasal dari Keluarga Non Penerima Manfaat PKH Desa Mekar Jaya ini berada dalam kategori “Kurang Merata”, dengan jumlah tanggapan responden sebanyak 8 orang atau sama dengan 67% dari total seluruh responden yang berasal dari Keluarga Non Penerima Manfaat PKH Desa Mekar Jaya.

Serta akan dipaparkan juga bagaimana tanggapan responden yang berasal dari Keluarga dengan Perkonomian Layak Penerima PKH Desa Mekar Jaya terhadap item-item pertanyaan dari indikator Perataan, dapat dilihat dari tabel V.22. di bawah ini:

Tabel V 22 Distribusi Tanggapan Responden Keluarga dengan Perkonomian Layak Penerima PKH Desa Mekar Jaya Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar

No.	Item Penilaian	Kategori			Persentase
		Merata	Kurang Merata	Tidak Merata	

1	2	3	4	5	6
1.	Apakah dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan sudah didistribusikan secara merata kepada setiap kelompok sasaran dan mendapatkan hak yang sesuai	4	6	0	10 (100%)
2.	Apakah data-data yang digunakan dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan sudah sesuai dengan kondisi dilapangan sehingga Program Keluarga Harapan bisa dilaksanakan secara merata	2	8	0	10 (100%)
	Jumlah	6	14	0	20
	Rata-rata	3	7	0	10
	Persentase	30%	70%	0%	100%

Sumber: Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2020

Berdasarkan tabel V.22. Di atas dapat dilihat tanggapan responden yang berasal dari Keluarga dengan Perkonomian Layak Penerima PKH Desa Mekar Jaya dalam kategori Merata terhadap indikator Perataan adalah sebanyak 3 orang atau sama dengan 30%. Alasannya karena masyarakat miskin yang tidak memperoleh PKH sudah mendapatkan bantuan lain, selain dari pada PKH.

Kemudian untuk tanggapan responden yang berasal dari Keluarga dengan Perkonomian Layak Penerima PKH Desa Mekar Jaya dalam kategori Kurang Merata terhadap indikator Perataan berjumlah 7 orang atau sama dengan 70%. Alasan yang diberikan Keluarga dengan Perkonomian Layak Penerima PKH Desa Mekar Jaya adalah karena sejauh pengelihatannya memang program yang disalurkan belum sesuai dengan keadaan penduduk dilapangan. Sehingga sticker yang seharusnya ditempel pada dinding-dinding para KPM PKH tetapi belum ditempel.

Dari tabel V.22. di atas dapat disimpulkan bahwa untuk tanggapan responden yang berasal dari Keluarga dengan Perkonomian Layak Penerima PKH Desa Mekar Jaya ini berada dalam kategori “Kurang Merata”, dengan jumlah tanggapan responden sebanyak 7 orang atau sama dengan 70% dari total seluruh responden yang berasal dari Keluarga dengan Perkonomian Layak Penerima PKH Desa Mekar Jaya.

Berikut ini akan dipaparkan juga hasil rekapitulasi tanggapan responden mengenai indikator Perataan, sebagai berikut:

Tabel V 23 Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Indikator Perataan Terhadap Evaluasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Di Desa Mekar Jaya Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar

No.	Item Penilaian	Kategori Penilaian			Persentase
		Baik	Kurang Baik	Tidak Baik	
1.	Apakah dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan sudah didistribusikan secara merata kepada setiap kelompok sasaran dan mendapatkan hak yang sesuai	13	52	4	69 (100%)
2.	Apakah data-data yang digunakan dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan sudah sesuai dengan kondisi	13	48	8	69 (100%)

1	2	3	4	5	6
	dilapangan sehingga Program Keluarga Harapan bisa dilaksanakan secara merata				
	Jumlah	26	100	12	138
	Rata-Rata	13	50	6	69
	Persentase	19%	72%	9%	100%

Sumber: Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2020

Berdasarkan tabel V.23. Di atas dapat dilihat bahwa tanggapan responden Mengenai Indikator Perataan Terhadap Evaluasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Di Desa Mekar Jaya Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar diketahui bahwa rata-rata dari 69 responden yaitu untuk kategori Baik berjumlah 13 orang atau sama dengan 19%, kategori Kurang Baik Berjumlah 50 orang atau sama dengan 72% dan kategori Tidak Baik berjumlah 6 orang atau sama dengan 9%. Maka berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan mengenai Evaluasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Mekar Jaya Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar berada pada kategori Kurang Baik.

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan salah satu Keluarga Penerima Manfaat PKH yaitu Ibu Mujianti mengenai indikator Perataan dikatakan bahwa: (Selasa, 5 Januari 2021, Pukul 10:20, di Kediaman Ibu Mujianti)

“Sejauh ini jika dikatakan sudah merata atau belum menurut saya pribadi ya belum yaa, kembali lagi seperti yang sudah saya katakan diawal tadi memang pendistribusiannya belum tepat. Masih banyak keluarga yang kita anggap sudah mampu tetapi tetap dapat bantuan ini, artinya inikan tidak sesuai dengan kondisi yang ada dilapangan ya. Saya jujur, jika saya diminta untuk mengundurkan diri saya fine fine saja, tetapi saya tidak mau jika hanya saya saja itu namanya tidak adil, tetapi jika yang merasa sudah mampu ada kemauan untuk mengundurkan diri ayo kita sama-sama mengundurkan diri saya bersedia”.

Kemudian berdasarkan wawancara yang juga peneliti lakukan dengan Kepala Desa Mekar Jaya, Bapak Ponijan mengenai Evaluasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan mengenai Indikator Perataan, dikatakan bahwa: (Senin, 1 Februari 2021, Pukul 12:06, Kantor Desa Mekar Jaya)

“Jika dikatakan merata atau tidak memang sejauh ini belum, karena masih ada beberapa permasalahan didalam pelaksanaannya, salah satunya adalah tingkat kecemburuan masyarakat yang tidak mendapatkan PKH. Tetapi kami dari pihak Pemerintah Desa pada saat masa pandemi Covid-19 bagi keluarga yang tidak mampu dan tidak memperoleh PKH diberikan bantuan BLT Desa yang diambil dari dana desa sesuai dengan intruksi dari pemerintah. Kami berharap dengan hal itu dapat mengurangi kesenjangan yang ada didalam masyarakat”.

Dari pernyataan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa memang dalam pelaksanaan PKH di Desa Mekar Jaya masih belum merata, karena masih ada masyarakat yang sesuai dengan kriteria penerima PKH tetapi tidak memperoleh bantuan tersebut.

Kemudian Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan, mengenai indikator Perataan bahwa pelaksanaan PKH Di Desa Mekar Jaya belum merata. Karena ada masyarakat yang dapat dikatakan mampu justru memperoleh bantuan dari program ini, dan sebaliknya. Yang seharusnya memperoleh justru tidak memperoleh. Alasan yang diberikan cukup beragam, ada yang mengatakan karena persoalan besarnya rumah, memiliki usaha, dan kuota yang cukup terbatas. Sehingga nama-nama yang seharusnya memperoleh belum bisa masuk menjadi penerima PKH. Padahal jika ditelusuri, besarnya rumah tidak menjamin kekayaan seseorang karena seperti yang kita lihat saat ini harga papan dan bata juga tidak jauh berbeda. Sehingga masyarakat yang membuat rumah juga lebih memilih mengguankan batako karena selisih antara bata dan papan yang tidak terlalu jauh. Menurut peneliti ini adalah kesalahan pada saat pendataan karna kurang detail dilakukan pada saat musyawarah

yang dilakukan oleh pemerintah desa, sehingga tidak terseleksi secara tepat dan merata.

Dengan demikian berdasarkan hasil tanggapan responden melalui angket atau kuisisioner, hasil wawancara dengan Kepala Desa Desa Mekar Jaya dan salah satu anggota Keluarga Penerima Manfaat PKH, dan hasil observasi peneliti dilapangan, maka peneliti menyimpulkan bahwa indikator Perataan pada penelitian Evaluasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Mekar Jaya Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar berada pada kategori penilaian “Kurang Baik”.

5. Responsivitas

Indikator responsivitas untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan Program Keluarga Harapan Di Desa Mekar Jaya apakah para Keluarga penerima Manfaat sudah dapat menentukan skala prioritas kebutuhan menjadi lebih responsive. Dimana untuk tanggapan responden yang berasal dari Ketua Kelompok PKH Desa Mekar Jaya dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel V 24 Distribusi Tanggapan Responden Ketua Kelompok PKH Desa Mekar Jaya Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar

No.	Item Penilaian	Kategori			Persentase
		Responsiv	Kurang Responsiv	Tidak Responsiv	
1	2	3	4	5	6
1.	Apakah Program Keluarga Harapan sudah responsive dalam memuaskan kebutuhan Keluarga Penerima Manfaat di Desa Mekar Jaya	3	0	0	3 (100%)

1	2	3	4	5	6
2.	Apakah dengan adanya Program Keluarga Harapan di Desa Mekar Jaya kemampuan Keluarga Penerima Manfaat dalam mengenali kebutuhan dan menyusun prioritas kebutuhan menjadi lebih responsive	3	0	0	3 (100%)
	Jumlah	6	0	0	6
	Rata-rata	3	0	0	3
	Persentase	100%	0%	0%	100%

Sumber: Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2020

Dari tabel V.24 dapat dilihat bahwa tanggapan responden yang berasal dari Ketua Kelompok PKH Desa Mekar Jaya pada kategori Responsiv terhadap indikator Responsivitas adalah sebanyak 3 orang atau sama dengan 100%. Alasan yang diberikan oleh Ketua Kelompok PKH Desa Mekar Jaya adalah karena program ini sangat dapat memuaskan kebutuhan masyarakat, khususnya bagi Keluarga Penerima Manfaat PKH itu sendiri, dan selama penyaluran yang diberikan Keluarga Penerima Manfaat PKH sudah dapat menyusun skala prioritas kebutuhannya masing-masing. Karena selama pendampingan yang dilakukan oleh pendamping PKH Desa Mekar Jaya juga selalu diingatkan untuk dapat menulis disebuah buku berapa pengeluaran dan pemasukan setiap bulannya, agar kedepannya lebih baik.

Dari tabel V.24. di atas dapat disimpulkan bahwa untuk tanggapan responden yang berasal dari Ketua Kelompok PKH Desa Mekar Jaya ini berada dalam kategori “Responsiv”, dengan jumlah tanggapan responden sebanyak 3

orang atau sama dengan 100% dari total seluruh responden yang berasal dari Ketua Kelompok PKH Desa Mekar Jaya.

Selanjutnya akan dipaparkan juga bagaimana tanggapan responden yang berasal dari Keluarga Penerima Manfaat PKH Desa Mekar Jaya terhadap item-item pertanyaan dari indikator Responsivitas, dapat dilihat dari tabel V.25. di bawah ini:

Tabel V 25 Distribusi Tanggapan Responden Keluarga Penerima Manfaat PKH Desa Mekar Jaya Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar

No.	Item Penilaian	Kategori			Persentase
		Responsiv	Kurang Responsiv	Tidak Responsiv	
1	2	3	4	5	6
1.	Apakah Program Keluarga Harapan sudah responsive dalam memuaskan kebutuhan Keluarga Penerima Manfaat di Desa Mekar Jaya	14	30	0	44 (100%)
2.	Apakah dengan adanya Program Keluarga Harapan di Desa Mekar Jaya kemampuan Keluarga Penerima Manfaat dalam mengenali kebutuhan dan menyusun prioritas kebutuhan menjadi lebih responsive	18	26	0	44 (100%)
	Jumlah	32	56	0	88
	Rata-rata	16	28	0	44
	Persentase	36%	64%	0%	100%

Sumber: Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2020

Berdasarkan tabel V.25 di atas dapat dilihat bahwa tanggapan responden yang berasal dari Keluarga Penerima Manfaat PKH Desa Mekar Jaya pada kategori

Responsiv terhadap indikator Responsivitas adalah sebanyak 16 orang atau sama dengan 36%. Alasan yang diberikan oleh Keluarga Penerima Manfaat PKH Desa Mekar Jaya karena bantuan ini tentu sangat memuaskan kebutuhan keluarga dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari mengurangi beban pengeluaran anak sekolah, pelayanan kesehatan, hingga pada subsidi listrik, maupun sembako yang diberikan. Sehingga memudahkan dalam menyusun skala prioritas kebutuhan.

Kemudian untuk tanggapan responden yang berasal dari Keluarga Penerima Manfaat PKH Desa Mekar Jaya dalam kategori Kurang Responsiv terhadap indikator Responsivitas adalah sebanyak 28 orang atau sama dengan 64%. Alasan yang diberikan oleh Keluarga Penerima Manfaat PKH Desa Mekar Jaya adalah karena bantuan yang diperoleh dianggap masih kurang dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari, namun untuk menyusun skala prioritas kebutuhan para KPM PKH masih cenderung kebingungan dan kewalahan. Karena terkadang uang yang diberikan belum tepat penggunaannya.

Dari tabel V.25. di atas dapat disimpulkan bahwa untuk tanggapan responden yang berasal dari Keluarga Penerima Manfaat PKH Desa Mekar Jaya ini berada dalam kategori “Kurang Responsiv”, dengan jumlah tanggapan responden sebanyak 28 orang atau sama dengan 64% dari total seluruh responden yang berasal dari Keluarga Penerima Manfaat PKH Desa Mekar Jaya.

Kemudian akan dipaparkan juga bagaimana tanggapan responden yang berasal dari Keluarga Miskin Non Penerima PKH Desa Mekar Jaya terhadap item-item pertanyaan dari indikator Responsivitas, dapat dilihat dari tabel V.26. di bawah ini:

Tabel V 26 Distribusi Tanggapan Responden Keluarga Penerima Manfaat PKH Desa Mekar Jaya Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar

No.	Item Penilaian	Kategori			Persentase
		Responsiv	Kurang Responsiv	Tidak Responsiv	
1	2	3	4	5	6
1.	Apakah Program Keluarga Harapan sudah responsive dalam memuaskan kebutuhan Keluarga Penerima Manfaat di Desa Mekar Jaya	8	4	0	12 (100%)
2.	Apakah dengan adanya Program Keluarga Harapan di Desa Mekar Jaya kemampuan Keluarga Penerima Manfaat dalam mengenali kebutuhan dan menyusun prioritas kebutuhan menjadi lebih responsive	6	6	0	12 (100%)
	Jumlah	14	10	0	24
	Rata-rata	7	5	0	12
	Persentase	58%	42%	0%	100%

Sumber: Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2020

Dari tabel V.26 diatas dapat dilihat bahwa tanggapan Responden yang berasal dari Keluarga Miskin Non Penerima PKH Desa Mekar Jaya pada kategori Responsiv adalah sebanyak 7 orang atau sama dengan 58%. Alasan yang diberikan oleh Keluarga Miskin Non Penerima PKH Desa Mekar Jaya adalah karena merasa sudah responsive dalam memuaskan kebutuhan sehari-hari. Juga Keluarga Miskin Non Penerima PKH sudah bisa menyusun skala prioritas kebutuhan dengan baik.

Selanjutnya untuk tanggapan responden yang berasal dari Keluarga Miskin Non Penerima PKH Desa Mekar Jaya pada kategori Kurang Responsiv terhadap indikator Responsivitas berjumlah 5 orang atau sama dengan 42%. Alasan yang diberikan oleh Keluarga Miskin Non Penerima PKH Desa Mekar Jaya adalah karena Keluarga Miskin Non Penerima PKH Desa Mekar Jaya hanya memperoleh bantuan sembako saja, sehingga menurut Keluarga Miskin Non Penerima PKH Desa Mekar Jaya bantuan yang diperoleh masing kurang dalam memuaskan kebutuhan keluarga setiap bulannya.

Dari tabel V.26. di atas dapat disimpulkan bahwa untuk tanggapan responden yang berasal dari Keluarga Miskin Non Penerima PKH Desa Mekar Jaya ini berada dalam kategori “Responsiv”, dengan jumlah tanggapan responden sebanyak 7 orang atau sama dengan 58% dari total seluruh responden yang berasal dari Keluarga Miskin Non Penerima PKH Desa Mekar Jaya.

Serta akan dipaparkan juga bagaimana tanggapan responden yang berasal dari Keluarga dengan Perekonomian Layak Penerima PKH Desa Mekar Jaya terhadap item-item pertanyaan dari indikator Responsivitas, dapat dilihat dari tabel V.27. di bawah ini:

Tabel V 27 Distribusi Tanggapan Responden Keluarga dengan Perekonomian Layak Penerima PKH Desa Mekar Jaya Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar

No.	Item Penilaian	Kategori			Persentase
		Responsiv	Kurang Responsiv	Tidak Responsiv	
1	2	3	4	5	6
1.	Apakah Program Keluarga Harapan sudah responsive	6	4	0	10 (100%)

1	2	3	4	5	6
	dalam memuaskan kebutuhan Keluarga Penerima Manfaat di Desa Mekar Jaya				
2.	Apakah dengan adanya Program Keluarga Harapan di Desa Mekar Jaya kemampuan Keluarga Penerima Manfaat dalam mengenali kebutuhan dan menyusun prioritas kebutuhan menjadi lebih responsive	6	4	0	10 (100%)
	Jumlah	12	8	0	20
	Rata-rata	6	4	0	10
	Persentase	60%	40%	0%	100%

Sumber: Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2020

Berdasarkan tabel V.27. diatas dapat dilihat bahwa tanggapan responden yang berasal dari Keluarga dengan Perekonomian Layak Penerima PKH Desa Mekar Jaya pada kategori Responsiv terhadap indikator Responsivitas adalah sebanyak 6 orang atau sama dengan 60%. Alasan yang diberikan oleh Keluarga dengan Perekonomian Layak Penerima PKH adalah karena bantuan yang diperoleh memberikan kemajuan yang positif terutama bagi Keluarga Penerima Manfaat PKH. Karena dengan adanya bantuan ini Keluarga Penerima Manfaat dapat lebih detail lagi dalam mengontrol pengeluaran sehari-hari.

Kemudian untuk tanggapan responden yang berasal dari Keluarga dengan Perekonomian Layak Penerima PKH dalam kategori Kurang Responsiv terhadap indikator Responsivitas adalah sebanyak 4 orang atau sekitar 40%. Alasan yang diberikan oleh Keluarga dengan Perekonomian Layak Penerima PKH adalah karena

masih ada beberapa Keluarga dengan Perekonomian Layak Penerima PKH yang belum bisa menyusun skala prioritas kebutuhan, sehingga antara pengeluaran dan pemasukan tidak sama.

Dari tabel V.27. di atas dapat disimpulkan bahwa untuk tanggapan responden yang berasal dari Keluarga dengan Perekonomian Layak Penerima PKH Desa Mekar Jaya ini berada dalam kategori “Responsiv”, dengan jumlah tanggapan responden sebanyak 6 orang atau sama dengan 60% dari total seluruh responden yang berasal dari Keluarga dengan Perekonomian Layak Penerima PKH Desa Mekar Jaya.

Berikut ini akan dipaparkan hasil rekapitulasi tanggapan responden mengenai indikator Responsivitas, sebagai berikut:

Tabel V 28 Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Indikator Responsivitas Terhadap Evaluasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Di Desa Mekar Jaya Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar

No.	Item Penilaian	Kategori Penilaian			Persentase
		Baik	Kurang Baik	Tidak Baik	
1.	Apakah Program Keluarga Harapan sudah responsive dalam memuaskan kebutuhan Keluarga Penerima Manfaat di Desa Mekar Jaya	31	38	0	69 (100%)
2.	Apakah dengan adanya Program Keluarga Harapan di Desa Mekar Jaya kemampuan	33	36	0	69 (100%)

1	2	3	4	5	6
	Keluarga Penerima Manfaat dalam mengenali kebutuhan dan menyusun prioritas kebutuhan menjadi lebih responsive				
	Jumlah	64	74	0	138
	Rata-rata	32	37	0	69
	Persentase	46%	54%	0%	100%

Sumber: Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2020

Berdasarkan tabel V.28. Di atas dapat dilihat bahwa tanggapan responden Mengenai Indikator Responsivitas Terhadap Evaluasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Di Desa Mekar Jaya Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar diketahui bahwa rata-rata dari 69 responden yaitu untuk kategori Baik berjumlah 32 orang atau sama dengan 46%, kategori Kurang Baik Berjumlah 37 orang atau sama dengan 54%. Maka berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan mengenai Indikator Responsivitas Terhadap Evaluasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Mekar Jaya Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar berada pada kategori Kurang Baik.

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan salah satu KPM PKH yaitu Ibu Apri mengenai indikator Responsivitas dikatakan bahwa: (Selasa, 5 Januari 2021, Pukul 17:40, di Kediaman Ibu Apri)

“Setelah dilakukan sosialisasi dan pemberian materi-materi oleh Bapak Wilham (Pendamping PKH Desa) kami para KPM PKH diminta setiap bulannya untuk menulis pada satu buku tulis mengenai pengeluaran dan pemasukan selama satu bulan. Sehingga jika ditemui pengeluaran lebih besar dibandingkan dengan pemasukan bisa konsultasi dengan pendamping PKH Desa, dengan begitu Bapak Wilham akan memberikan bagaimana solusi dan apa yang harus dilakukan

sehingga kami para KPM PKH lebih mudah dalam menyusun skala prioritas kebutuhan, ya walau belum semuanya paham dalam melakukan hal tersebut”.

Kemudian juga dilakukan wawancara dengan Pendamping PKH Desa Mekar Jaya, Bapak Wilham Murdianto mengenai indikator Responsivitas dikatakan bahwa: (Sabtu, 9 Januari 2021, Pukul 14:55, Gedung Serba Guna Desa Mekar Jaya)

“Respon dari masyarakat sangat bagus sekali mengenai program ini, masyarakat sangat merasa terbantu dengan adanya program ini. Disini saya sebagai Pendamping PKH Desa Mekar Jaya selalu mengingatkan untuk tetap mengontrol antara pemasukan dan pengeluaran. Saya juga selalu berpesan kepada KPM PKH yang memiliki perekonomian layak agar mengundurkan diri dengan mandiri. Saya juga berharap materi-materi yang saya berikan dapat membantu KPM PKH dalam mempermudah menyusun dan memprioritaskan kebutuhan sehari-hari agar bantuan yang diperoleh digunakan sesuai dengan porsinya dan tidak disalah gunakan”.

Dapat dilihat berdasarkan pernyataan diatas mengenai indikator Responsivitas bahwa dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Mekar Jaya belum semua KPM PKH dapat menyusun skala prioritas dengan baik, tetapi para KPM PKH terus melakukan perbaikan dengan menuliskan pada buku catatan untuk pemasukan dan pengeluaran setiap bulannya yang nantinya akan dilaporkan kepada Pendamping PKH Desa Mekar Jaya.

Kemudian Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan, mengenai indikator Responsivitas bahwa belum semua masyarakat yang dikategorikan sebagai Penerima PKH bisa menyusun skala prioritas kebutuhan dengan baik. Berdasarkan pengamatan yang peneliti lakukan masih banyak ditemukan bantuan yang diperoleh belum digunakan secara tepat oleh KPM PKH. Contoh sederhananya saja, bantuan tunai (pendidikan) yang diperoleh bukan digunakan seharusnya untuk anak sekolah, tetapi digunakan untuk keperluan lain yang lebih mendesak, misalnya seperti digunakan untuk belanja kepasar, dan membeli hal-hal lain yang sifatnya

bukan untuk keperluan anak sekolah. Sehingga penggunaan bantuan tersebut belum bisa dikategorikan baik, karena penggunaannya tidak sebagaimana mestinya.

Dengan demikian berdasarkan hasil tanggapan responden melalui angket atau kuisisioner, hasil wawancara dengan Pendamping PKH Desa Mekar Jaya dan salah satu anggota Keluarga Penerima Manfaat PKH, dan hasil observasi peneliti dilapangan, maka peneliti menyimpulkan bahwa indikator Responsivitas pada penelitian Evaluasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Mekar Jaya Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar berada pada kategori penilaian “Kurang Baik”.

6. Ketepatan

Indikator ketepatan untuk menilai apakah bantaun yang disalurkan melalui Program Keluarga Harapan sudah sesuai dengan peraturan yang ada. Dimana untuk tanggapan responden yang berasal dari Ketua Kelompok PKH Desa Mekar Jaya dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel V 29 Distribusi Tanggapan Responden Ketua Kelompok PKH Desa Mekar Jaya Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar

No.	Item Penilaian	Kategori			Persentase
		Tepat	Kurang Tepat	Tidak Tepat	
1	2	3	4	5	6
1.	Apakah Program Keluarga Harapan sudah didistribusikan secara tepat sasaran, artinya tidak ada Keluarga Penerima Manfaat yang memiliki perekonomian layak di Desa Mekar Jaya	1	2	0	3 (100%)

1	2	3	4	5	6
2.	Apakah bantuan yang diperoleh sudah digunakan secara tepat	3	0	0	3 (100%)
	Jumlah	4	2	0	6
	Rata-rata	2	1	0	3
	Persentase	67%	33%	0%	100%

Sumber: Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2020

Dari tabel V.29 di atas dapat dilihat bahwa tanggapan responden yang berasal dari Ketua Kelompok PKH Desa Mekar Jaya dalam kategori Tepat terhadap indikator Ketepatan berjumlah 2 orang atau sama dengan 67%. Alasan yang diberikan oleh Ketua Kelompok PKH Desa Mekar Jaya adalah karena bantuan yang diperoleh sudah dipergunakan secara tepat sesuai dengan masing-masing perolehannya.

Kemudian untuk tanggapan responden yang berasal dari Ketua Kelompok PKH Desa Mekar Jaya pada kategori Kurang Tepat terhadap indikator Ketepatan adalah sebanyak 1 orang atau sama dengan 33%. Alasan yang diberikan oleh Ketua Kelompok PKH Desa Mekar Jaya ini karena masih ada beberapa Keluarga Penerima Manfaat yang memiliki perekonomian yang layak. Dan belum adanya kesadaran untuk mengundurkan diri.

Dari tabel V.29. di atas dapat disimpulkan bahwa untuk tanggapan responden yang berasal dari Ketua Kelompok PKH Desa Mekar Jaya ini berada dalam kategori “Tepat”, dengan jumlah tanggapan responden sebanyak 2 orang atau sama dengan 67% dari total seluruh responden yang berasal dari Ketua Kelompok PKH Desa Mekar Jaya.

Kemudian akan dipaparkan juga bagaimana tanggapan responden yang berasal dari Keluarga Penerima Manfaat PKH Desa Mekar Jaya terhadap item-item pertanyaan dari indikator Ketepatan, dapat dilihat dari tabel V.30. di bawah ini:

Tabel V 30 Distribusi Tanggapan Responden Keluarga Penerima Manfaat PKH Desa Mekar Jaya Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar

No.	Item Penilaian	Kategori			Persentase
		Tepat	Kurang Tepat	Tidak Tepat	
1	2	3	4	5	6
1.	Apakah Program Keluarga Harapan sudah didistribusikan secara tepat sasaran, artinya tidak ada Keluarga Penerima Manfaat yang memiliki perekonomian layak di Desa Mekar Jaya	2	38	4	44 (100%)
2.	Apakah bantuan yang diperoleh sudah digunakan secara tepat	20	24	0	44 (100%)
	Jumlah	22	62	4	88
	Rata-rata	11	31	2	44
	Persentase	25%	70%	5%	100%

Sumber: Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2020

Berdasarkan tabel V.30. di atas dapat dilihat bahwa tanggapan responden Keluarga Penerima Manfaat PKH Desa Mekar Jaya pada kategori Tepat terhadap indikator Ketepatan adalah sebanyak 11 orang atau sama dengan 25%. Alasan yang diberikan oleh Keluarga Penerima Manfaat PKH Desa Mekar Jaya adalah karena sejauh bantuan yang diberikan memang sudah didistribusikan secara tepat dan digunakan secara tepat.

Kemudian untuk tanggapan responden yang berasal dari Keluarga Penerima Manfaat PKH Desa Mekar Jaya pada kategori Kurang Tepat terhadap indikator

Ketepatan berjumlah 31 orang atau sama dengan 70%. Alasan yang diberikan oleh Keluarga Penerima Manfaat PKH Desa Mekar Jaya karena dalam penyaluran program ini belum dilakukan secara tepat sasaran. Masih banyak sekali keluarga yang sudah dianggap mampu tetapi masih terdaftar sebagai penerima bantuan PKH ini.

Sedangkan untuk tanggapan responden yang berasal dari Keluarga Penerima Manfaat PKH Desa Mekar Jaya pada kategori Tidak Tepat terhadap indikator Ketepatan berjumlah 2 orang atau sama dengan 5%. Alasan yang diberikan oleh Keluarga Penerima Manfaat PKH Desa Mekar Jaya adalah karena masih banyaknya keluarga yang layak menerima tetapi tidak menerima bantuan ini, sedangkan yang tidak berhak menerima dan dirasa sudah mampu justru terdaftar didalamnya.

Dari tabel V.30. di atas dapat disimpulkan bahwa untuk tanggapan responden yang berasal dari Keluarga Penerima Manfaat PKH Desa Mekar Jaya ini berada dalam kategori “Kurang Tepat”, dengan jumlah tanggapan responden sebanyak 31 orang atau sama dengan 70% dari total seluruh responden yang berasal dari Keluarga Penerima Manfaat PKH Desa Mekar Jaya.

Selanjutnya akan dipaparkan juga bagaimana tanggapan responden yang berasal dari Keluarga Miskin Non Penerima PKH Desa Mekar Jaya terhadap item-item pertanyaan dari indikator Ketepatan, dapat dilihat dari tabel V.31. di bawah ini:

Tabel V 31 Distribusi Tanggapan Responden Keluarga Miskin Non Penerima PKH Desa Mekar Jaya Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar

No.	Item Penilaian	Kategori			Persentase
		Tepat	Kurang Tepat	Tidak Tepat	
1	2	3	4	5	6
1.	Apakah Program Keluarga Harapan sudah didistribusikan secara tepat sasaran, artinya tidak ada Keluarga Penerima Manfaat yang memiliki perekonomian layak di Desa Mekar Jaya	0	10	2	12 (100%)
2.	Apakah bantuan yang diperoleh sudah digunakan secara tepat	12	0	0	12 (100%)
	Jumlah	12	10	2	24
	Rata-rata	6	5	1	12
	Persentase	50%	42%	8%	100%

Sumber: Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2020

Dari tabel V.31. di atas dapat dilihat bahwa tanggapan responden Keluarga Miskin Non Penerima PKH Desa Mekar Jaya pada kategori Tepat terhadap indikator Ketepatan adalah sebanyak 6 orang atau sama dengan 50%. Adapun alasan yang diberikan oleh responden Keluarga Miskin Non Penerima PKH Desa Mekar Jaya adalah karena bantuan yang diperoleh sudah digunakan dengan tepat sebagaimana mestinya.

Kemudian untuk tanggapan responden yang berasal dari Keluarga Miskin Non Penerima PKH Desa Mekar Jaya dalam kategori Kurang Tepat terhadap Indikator Ketepatan adalah sebanyak 5 orang atau sama dengan 42%. Selanjutnya untuk tanggapan responden yang berasal dari Keluarga Miskin Non Penerima PKH Desa Mekar Jaya dalam kategori Tidak Tepat terhadap indikator Ketepatan

berjumlah 1 orang atau 8%. Alasan yang diberikan adalah karena meskipun bantuan ini sudah didistribusikan sebagaimana mestinya, namun dalam penyalurannya kurang tepat karena Keluarga Miskin Non Penerima PKH Desa Mekar Jaya juga masih merasa kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sedangkan didalam penyaluran PKH pada Keluarga Penerima Manfaat PKH didalamnya banyak keluarga yang sudah mampu, tetapi tidak ada kesadaran untuk mengundurkan diri sehingga hal ini menyebabkan terjadinya kesenjangan social didalam lingkungan masyarakat.

Dari tabel V.31. di atas dapat disimpulkan bahwa untuk tanggapan responden yang berasal dari Keluarga Miskin Non Penerima PKH Desa Mekar Jaya ini berada dalam kategori “Tepat”, dengan jumlah tanggapan responden sebanyak 6 orang atau sama dengan 50% dari total seluruh responden yang berasal dari Keluarga Miskin Non Penerima PKH Desa Mekar Jaya.

Serta akan dipaparkan juga bagaimana tanggapan responden yang berasal dari Keluarga dengan Perekonomian Layak Penerima PKH Desa Mekar Jaya terhadap item-item pertanyaan dari indikator Ketepatan, dapat dilihat dari tabel V.32. di bawah ini:

Tabel V 32 Distribusi Tanggapan Responden Keluarga dengan Perekonomian Layak Penerima PKH Desa Mekar Jaya Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar

No.	Item Penilaian	Kategori			Persentase
		Tepat	Kurang Tepat	Tidak Tepat	
1	2	3	4	5	6
1.	Apakah Program Keluarga Harapan sudah didistribusikan secara tepat sasaran, artinya tidak ada	4	6	0	10 (100%)

1	2	3	4	5	6
	Keluarga Penerima Manfaat yang memiliki perekonomian layak di Desa Mekar Jaya				
2.	Apakah bantuan yang diperoleh sudah digunakan secara tepat	4	6	0	70 (100%)
	Jumlah	8	12	0	20
	Rata-rata	4	6	0	10
	Persentase	40%	60%	0%	100%

Sumber: Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2020

Berdasarkan tabel V.32. di atas dapat dilihat bahwa tanggapan responden yang berasal dari Keluarga dengan Perekonomian Layak Penerima PKH Desa Mekar Jaya pada kategori Tepat terhadap indikator Ketepatan adalah sebanyak 4 orang atau sama dengan 40%. Alasan yang diberikan oleh responden Keluarga dengan Perekonomian Layak Penerima PKH Desa Mekar Jaya adalah karena bantuan yang diberikan dari program ini sudah digunakan secara tepat dan sesuai.

Selanjutnya untuk tanggapan respoden yang berasal dari Keluarga dengan Perekonomian Layak Penerima PKH Desa Mekar Jaya dalam kategori Kurang Tepat adalah sebanyak 6 orang atau sama dengan 60%. Alasan yang berikan oleh Keluarga dengan Perekonomian Layak Penerima PKH Desa Mekar Jaya adalah karena penerima bantuan PKH ini tidak semua sesuai dengan kriteria Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM), masih ada beberapa keluarga yang tergolong sudah mampu emperoleh bantuan ini, sehingga masih kurang tepat sasaran.

Dari tabel V.32. di atas dapat disimpulkan bahwa untuk tanggapan responden yang berasal dari Keluarga dengan Perekonomian Layak Penerima PKH Desa Mekar Jaya ini berada dalam kategori “Kurang Tepat”, dengan jumlah tanggapan responden sebanyak 6 orang atau sama dengan 60% dari total seluruh responden

yang berasal dari Keluarga dengan Perekonomian Layak Penerima PKH Desa Mekar Jaya.

Berikut ini akan dipaparkan hasil rekapitulasi mengenai indikator Ketepatan, sebagai berikut:

Tabel V 33 Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Indikator Ketepatan Terhadap Evaluasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Di Desa Mekar Jaya Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar

No.	Item Penilaian	Kategori Penilaian			Persentase
		Baik	Kurang Baik	Tidak Baik	
1.	Apakah Program Keluarga Harapan sudah didistribusikan secara tepat sasaran, artinya tidak ada Keluarga Penerima Manfaat yang memiliki perekonomian layak di Desa Mekar Jaya	7	56	6	69 (100%)
2.	Apakah bantuan yang diperoleh sudah digunakan secara tepat	39	30	0	69 (100%)
Jumlah		46	86	6	138
Rata-rata		23	43	3	69
Persentase		33%	62%	5%	100%

Sumber: Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2020

Berdasarkan tabel V.33. Di atas dapat dilihat bahwa tanggapan responden Mengenai Indikator Ketepatan Terhadap Evaluasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Di Desa Mekar Jaya Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar diketahui bahwa rata-rata dari 69 responden yaitu untuk kategori Baik berjumlah 23 orang atau sama dengan 33%, kategori Kurang Baik Berjumlah 43 orang atau sama dengan 62% dan kategori Tidak Baik berjumlah 3 orang dengan persentase

5%. Maka berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan mengenai Indikator Ketepatan Terhadap Evaluasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Mekar Jaya Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar berada pada kategori Kurang Baik.

Kemudian dilakukan wawancara dengan salah satu Keluarga Penerima Manfaat PKH Desa Mekar Jaya yaitu Ibu Indah Kurnia Sari mengenai indikator Ketepatan dikatakan bahwa: (Selasa, 5 Januari 2021, Pukul 10:58, di Kediaman Ibu Indah Kurnia Sari)

“Jika saya ditanya perihal tepat atau tidak mengenai penyaluran program ini, tentu saya akan menjawab tidak ya. Karena dapat kita lihat secara bersama saja bagaimana selama ini dalam pelaksanaannya, kurang tepat sasaran. Bahkan ada keluarga yang bisa dikatakan mampu justru memperoleh program ini, tetapi saya juga tidak mengetahui secara pasti ini letak kesahalannya dimana, apakah didalam pendataan awal atau memang seperti itu seharusnya. Saya kan masyarakat, hanya bisa menerima apa yang sudah menjadi keputusan. Tapi jika ditanya tepat atau tidak jujur saya katakan tidak, kuranglah ya. Data yang dipakai juga data lama sepertinya ya, evaluasi juga jarang dilakukan. Mungkin itu bisa menjadi salah satu factor penyebabnya kenapa yang mampu bisa memperoleh program ini”.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Pendamping PKH Desa Mekar Jaya, Bapak Wilham Murdianto mengenai indikator Ketepatan, dikatakan bahwa: (Sabtu, 9 Januari 2021, Pukul 14:55, Gedung Serba Guna Desa Mekar Jaya)

“Sebenarnya memang dalam pelaksanaannya belum dapat dikatakan tepat sasaran ya, karena kami juga merasakan hal yang demikian. Hanya saja kami sebagai pendamping berhak mengeluarkan itu kalau menurut penilaian kami tidak berhak. Hanya saja sejauh ini saya sebagai pendamping terus melakukan pendekatan persuasive yaitu pendekatan yang didorong adalah bagaimana mereka sadar dengan sendirinya. Itu yang sedang kami dorong, itu namanya graduasi sejahtera mandiri. Kalau yang dipaksa namanya adalah graduasi paksa, kita ingin menumbuhkan kesadaran itu, dia merasa sudah mampu.. ya silahkan mengundurkan diri. Jadi saya sebagai pendamping juga terus mendorong bagaimana merubah pola fikir mereka agar tidak tergantung terus pada bantuan.

Jadi memang sejauh ini saya masih terus melakukan pendekatan persuasif agar mereka sadar dengan sendirinya. Tetapi jika cara itu tetap tidak ampuh saya nantinya akan berkonsultasi dengan pihak desa dan mengeluarkan secara paksa. Karena sejauh ini belum ada yang mengundurkan diri secara sukarela.”

Dilihat dari pernyataan di atas bahwa pelaksanaan PKH Desa Mekar Jaya belum sesuai dengan yang diharapkan, karena masih belum tepat sasaran. Dimana berdasarkan hasil observasi serta pengamatan yang penulis lakukan dapat dilihat bahwa penyaluran PKH di Desa Mekar Jaya menimbulkan kesenjangan sosial di dalam masyarakat.

Bersamaan dengan itu Kepala Desa Mekar Jaya, Bapak Ponijan juga mengatakan bahwa: (Senin, 1 Februari 2021, Pukul 12:06, Kantor Desa Mekar Jaya)

“Penerima PKH yang sekiranya sudah merasa mampu untuk mengundurkan diri saja. Kami juga memberikan peringatan dengan cara menempelkan sticker yang bertuliskan “Penerima Bantuan PKH” di dinding depan rumah warga peserta PKH. Agar sekiranya ada kesadaran di dalam diri seseorang tersebut merasa bahwa dirinya sudah mampu”.

Kemudian Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan, mengenai indikator Ketepatan bahwa pada pelaksanaan program ini masih dapat dikategorikan kurang tepat. Penulis menyimpulkan hal tersebut karena masih ada keluarga dengan perekonomian layak yang menerima program ini. Padahal seharusnya program ini hanya ditujukan untuk Rumah Tangga Sangat Miskin (RSTM) yang sesuai dengan kategori penerima PKH. Berdasarkan informasi yang peneliti peroleh bahwa setiap desa pasti memiliki standar kekayaan tersendiri. Kenapa seseorang tersebut dapat dikatakan mampu. Di Desa Mekar Jaya standar kekayaan adalah bagi keluarga ataupun seseorang yang memiliki kebun kelapa sawit. Maka keluarga atau seseorang tersebut dapat dikatakan mampu. Pada kenyataannya, peneliti menemukan banyak sekali keluarga yang memperoleh program ini justru memiliki

kebun kelapa sawit, kendaraan bermobil, dsb. Hal tersebut membuat peneliti menyimpulkan bahwa pelaksanaan program ini kemungkinan memang sudah sesuai dengan prosedur PKH, hanya saja dalam pendistribusiannya masih belum tepat. Penulis mengambil kesimpulan bahwa kesalahan yang terjadi pada saat dilakukan musyawarah yang dilakukan oleh pemerintah desa, karena tidak diseleksi secara baik dan matang. Hal tersebut menjadi isu yang sangat hangat pada hari ini dilingkungan masyarakat dan mengakibatkan terjadinya kesenjangan serta kecemburuan sosial dilingkungan masyarakat.

Dengan demikian berdasarkan hasil tanggapan responden melalui angket atau kuisioner, hasil wawancara dengan Pendamping PKH Desa Mekar Jaya dan Kepala Desa Mekar Jaya serta salah satu anggota Keluarga Penerima Manfaat PKH, dan hasil observasi peneliti dilapangan, maka peneliti menyimpulkan bahwa indikator Ketepatan pada penelitian Evaluasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Mekar Jaya Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar berada pada kategori penilaian “Kurang Baik”.

Berdasarkan hasil pemaparan dari setiap indikator-indikator dalam penelitian ini, berikut akan penulis rekapitulasi penelitian yang dilakukan tentang Evaluasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Mekar Jaya Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar. Sebagaimana dapat dilihat pada tabel V.34. berikut ini:

Tabel V 34 Rekapitulasi Tanggapan Responden Tentang Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Mekar Jaya Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar

No.	Indikator Yang Dinilai	Kategori Penilaian			Persentase
		Baik	Kurang Baik	Tidak Baik	
1	2	3	4	5	6
1.	Efektivitas	23	41	5	69 (100%)
2.	Efisiensi	42	24	3	69 (100%)
3.	Kecukupan	31	26	12	69 (100%)
4.	Perataan	13	50	6	69 (100%)
5.	Responsivitas	32	37	0	69 (100%)
6.	Ketepatan	23	43	3	69 (100%)
	Jumlah	164	221	29	414
	Rata-rata	27	37	5	69
	Persentase	39%	54%	7%	100%

Data Olahan Penelitian 2020

Berdasarkan tabel V.34. rekapitulasi di atas, dapat dilihat bahwa tanggapan responden mengenai pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Mekar Jaya terhadap enam indikator pada penelitian Evaluasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Mekar Jaya Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar diketahui bahwa rata-rata dari jumlah 69 orang responden yaitu 27 orang dengan persentase 39% memberikan penilaian Baik, kemudian 37 orang dengan persentase 54% memberikan penilaian Kurang Baik, dan 5 orang dengan persentase 7% memberikan penilaian Tidak Baik.

Dalam hasil penelitian mengenai pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Mekar Jaya ini yang menjadi objek penelitian yaitu fenomena pertama mengenai pendistribusian program PKH apakah merata atau tidak dalam pelaksanaannya, dimana dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa indikator

perataan berada pada kategori Kurang Baik, dengan tanggapan responden sebanyak 50 orang, bila dilihat dari hasil penelitian di atas dapat diketahui bahwa dalam penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan di Desa Mekar Jaya kurang merata, karena masih banyak masyarakat yang sesuai dengan kategori penerima bantuan tetapi tidak memperoleh bantuan ini, juga adanya *miss communication* antara pendamping, pemerintah desa dan ketua kelompok PKH Desa Mekar Jaya.

Kemudian fenomena selanjutnya dalam hal yang berkenaan dengan indikator ketepatan, dimana masih terdapat peserta Program Keluarga Harapan yang memiliki perekonomian layak tetapi mendapatkan bantuan ini, sehingga terjadi salah sasaran dalam pendistribusiannya. Dapat dilihat dari hasil penelitian dan pemaparan yang penulis jelaskan bahwa untuk ini tanggapan responden berada pada kategori Kurang Baik, dengan jumlah sebanyak 43 orang. Hal ini mengakibatkan terjadinya kecemburuan sosial didalam lingkungan masyarakat.

Dari analisis diatas mencermati hasil kuisisioner atau angket yang telah disebarkan kepada responden, dapat disimpulkan bahwa Evaluasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Mekar Jaya Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar berada pada kategori “**Kurang Baik**”. Disebabkan oleh beberapa indikator yang digunakan sebagai penilaian evaluasi program tersebut masih belum sesuai dengan yang diharapkan, karena kurangnya koordinasi antara pemerintah Desa Mekar Jaya dengan Ketua Kelompok PKH serta Pendamping PKH Desa Mekar Jaya, sehingga mengakibatkan terjadinya kesenjangan sosial di dalam lingkungan masyarakat.

C. Hambatan-hambatan Dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Di Desa Mekar Jaya Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, ada berbagai aspek dan faktor yang menghambat dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Mekar Jaya sebagaimana terlihat pada pemaparan hasil wawancara dengan Kepala Desa Mekar Jaya dan Kasi Kesra Desa Mekar Jaya yang sekaligus diwakili oleh Kepala Desa Mekar Jaya, juga wawancara yang dilakukan dengan Pendamping PKH Desa Mekar Jaya serta tanggapan-tanggapan responden yang berasal dari masyarakat Desa Mekar Jaya, dimana hambatan-hambatan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pada indikator Efektivitas berada pada kategori Kurang Baik. Hal tersebut karena tidak semua Keluarga Penerima Manfaat PKH merasa bantuan yang diperoleh dapat mengurangi pengeluaran keluarga, juga dalam pelaksanaan PKH di Desa Mekar Jaya masih kurang efektif karena ada beberapa penerima bantuan PKH yang kehidupannya dapat dikatakan sudah mampu dan tidak layak lagi mendapatkan bantuan ini tetapi tetap menerimanya.
2. Pada indikator Perataan berada pada kategori Kurang Baik. Hal tersebut karena masih adanya keluarga miskin yang tidak memperoleh bantuan dari Program Keluarga Harapan (PKH) ini, karena kurangnya koordinasi yang dilakukan oleh pemerintah desa dengan ketua kelompok PKH serta pendamping PKH Desa Mekar Jaya yang mengakibatkan pemilihan penerima bantuan PKH masih kurang merata.

3. Sedangkan pada indikator Responsivitas juga berada pada kategori Kurang Baik. Hal tersebut dikarenakan masih banyak Keluarga Penerima Manfaat PKH yang tidak memahami bagaimana cara menyusun skala prioritas yang benar. Sehingga bantuan yang diperoleh belum digunakan sesuai dengan yang seharusnya, yang mengakibatkan bantuan yang diperoleh selalu merasa kurang dan tidak mencukupi dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari.
4. Kemudian pada indikator Ketepatan juga berada pada kategori Kurang Baik, karena dalam penyaluran bantuan PKH di Desa Mekar Jaya masih terdapat Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH yang ternyata memiliki perekonomian yang layak, akibatnya terjadi salah sasaran dalam pendistribusiannya. Kemudian juga tidak adanya kesadaran yang dimiliki oleh anggota penerima PKH. Dimana, Keluarga Penerima Manfaat yang tidak tergolong sangat miskin tidak mau untuk mengundurkan diri sehingga hal tersebut menutup ruang bagi keluarga lain diluar sana yang termasuk sangat miskin dan berhak memperoleh bantuan Program Keluarga Harapan ini karena kuota nya juga sangat terbatas.
5. Kurangnya musyawarah desa yang dilakukan oleh pemerintah Desa Mekar Jaya, sehingga data yang diperoleh bukan data terbaru tetapi masih menggunakan data lama. Seharusnya pemerintah desa terus rutin dalam mengevaluasi dan melakukan update Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) desa, karena kalau tidak diupdate

masyarakat yang seharusnya bisa masuk menjadi tidak bisa masuk menjadi kategori penerima PKH, karena data yang ada dipusat masih menggunakan data yang lama.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan bab-bab yang telah penulis paparkan sebelumnya, maka dapat dilihat bagaimana Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Mekar Jaya Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar. Kemudian pada bab ini penulis akan menyampaikan kesimpulan dari penelitian Evaluasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Mekar Jaya Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar, kemudian dilanjutkan dengan saran untuk menjadikan pelaksanaan Program keluarga Harapan di Desa Mekar jaya lebih baik lagi kedepannya.

Adapun kesimpulan dari penelitian mengenai Evaluasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Mekar Jaya Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis paparkan pada bab sebelumnya maka pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Mekar Jaya Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar berada dalam kategori “Kurang Baik.”
2. Kemudian berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, peneliti dapat menyimpulkan bahwa dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Mekar Jaya terhadap beberapa indikator yang digunakan yaitu:

- a. Untuk indikator Efektivitas, peneliti menyimpulkan bahwa dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Mekar Jaya masih kurang efektif, karena peneliti menemukan beberapa hal yang dapat menjelaskan mengapa hal tersebut dapat terjadi. Pertama, berdasarkan wawancara dengan beberapa masyarakat dan yang peneliti cermati bahwa program ini belum sepenuhnya disalurkan kepada yang seharusnya menerima, artinya tidak semua RSTM yang dikategorikan menerima program ini mendapatkannya. Kedua, bantuan yang diperoleh belum sepenuhnya mengurangi beban pengeluaran para KPM PKH, hal ini dapat dilihat dari banyaknya pengeluaran di bandingkan dengan pemasukan daripada KPM PKH.
- b. Pada indikator Efisiensi, berdasarkan pengamatan yang telah peneliti lakukan beberapa bulan terakhir bahwa bantuan PKH sudah disalurkan secara tepat waktu. Rutinnya memang satu bulan sekali. Hanya saja pasca adanya pandemic, penerimaan bantuan PKH ini dirangkap menjadi tiga bulan sekali untuk Bantuan Tunai seperti bantuan pendidikan. Berdasarkan hal tersebut, banyak keluhan kesah masyarakat yang mengatakan bahwa perubahan tersebut menjadikan para KPM PKH sulit mengontrol pengeluaran anak setiap bulannya. Sehingga Para KPM PKH juga merasa kewalahan, karena mereka sudah amat bergantung pada bantuan ini. Kemudian, mengenai evaluasi dan transformasi kepesertaan PKH pada Desa Mekar Jaya belum dilakukan secara rutin. Hal tersebut peneliti simpulkan karena

data yang digunakan tidak sesuai dengan kondisi yang ada dilapangan. Menurut peneliti sendiri bahwa kesalahan ini terjadi pada saat dilakukan pendataan penerima PKH yang tidak diseleksi secara detail pada saat musyawarah desa yang dilakukan oleh perangkat Desa Mekar Jaya.

- c. Untuk indikator Kecukupan, peneliti menyimpulkan bahwa PKH sudah cukup membantu para KPM PKH, tetapi tidak semua KPM PKH juga merasa tercukupi dengan adanya bantuan ini. Menurut KPM PKH bantuan yang diperoleh masih terbilang sedikit dan belum sepenuhnya dapat membantu. Hal tersebut berdasarkan pengamatan yang peneliti lakukan, dimana masih banyak KPM PKH yang melakukan simpan pinjam dengan bank-bank harian yang ada di sekeliling Desa, itu membuktikan bahwa bantuan ini belum mencukupi pengeluaran keluarga KPM PKH. Kemudian, mengenai sosialisasi yang dilakukan oleh Pendamping PKH Desa Mekar Jaya, menurut peneliti pertemuan yang dilakukan sudah rutin satu bulan sekali, tidak menentu bisa diawal, pertengahan atau bahkan akhir bulan. Artinya setiap satu bulan sekali pasti dilakukan pertemuan, yang pada saat pertemuan diberikan materi-materi yang dapat mendukung KPM PKH untuk dapat lebih mandiri dan tidak bergantung terhadap bantuan ini. Pada pertemuan rutin yang dilakukan oleh tim pelaksana, Pendamping PKH selalu mengingatkan bagi masyarakat yang merasa sudah mampu tetapi

masih memperoleh bantuan ini agar mengundurkan diri dengan sendirinya atau yang disebut dengan graduasi mandiri, bukan karena adanya paksaan dari pihak manapun.

d. Pada indikator Perataan, berdasarkan pengamatan yang peneliti lakukan sejauh ini bahwa pelaksanaan PKH Di Desa Mekar Jaya belum merata. Karena ada masyarakat yang dapat dikatakan mampu justru memperoleh bantuan dari program ini, dan sebaliknya. Yang seharusnya memperoleh justru tidak memperoleh. Alasan yang diberikan cukup beragam, ada yang mengatakan karena persoalan besarnya rumah, memiliki usaha, dan kuota yang cukup terbatas. Sehingga nama-nama yang seharusnya memperoleh belum bisa masuk menjadi penerima PKH. Padahal jika ditelusuri, besarnya rumah tidak menjamin kekayaan seseorang karena seperti yang kita lihat saat ini harga papan dan bata juga tidak jauh berbeda. Sehingga masyarakat yang membuat rumah juga lebih memilih mengguankan batako karena selisih antara bata dan papan yang tidak terlalu jauh.

e. Indikator Responsivitas, pada indikator ini peneliti menyimpulkan bahwa belum semua masyarakat yang dikategorikan sebagai Penerima PKH bisa menyusun skala prioritas kebutuhan dengan baik. Berdasarkan pengamatan yang peneliti lakukan masih banyak ditemukan bantuan yang diperoleh belum digunakan secara tepat oleh KPM PKH. Contoh sederhananya saja, bantuan tunai

(pendidikan) yang diperoleh bukan digunakan seharusnya untuk anak sekolah, tetapi digunakan untuk keperluan lain yang lebih mendesak, misalnya seperti digunakan untuk belanja kepasar, dan membeli hal-hal lain yang sifatnya bukan untuk keperluan anak sekolah. Sehingga penggunaan bantuan tersebut belum bisa dikategorikan baik, karena penggunaannya tidak sebagaimana mestinya.

- f. Untuk indikator Ketepatan, berdasarkan hasil pengamatan yang peneliti lakukan beberapa bulan terakhir bahwa pada pelaksanaan program ini masih dapat dikategorikan kurang tepat. Penulis menyimpulkan hal tersebut karena masih ada keluarga dengan perekonomian layak yang menerima program ini. Padahal seharusnya program ini hanya ditujukan untuk Rumah Tangga Sangat Miskin (RSTM) yang sesuai dengan kategori penerima PKH. Berdasarkan informasi yang peneliti peroleh bahwa setiap desa pasti memiliki standar kekayaan tersendiri. Kenapa seseorang tersebut dapat dikatakan mampu. Di Desa Mekar Jaya standar kekayaan adalah bagi keluarga ataupun seseorang yang memiliki kebun kelapa sawit. Maka keluarga atau seseorang tersebut dapat dikatakan mampu. Pada kenyataannya, peneliti menemukan banyak sekali keluarga yang memperoleh program ini justru memiliki kebun kelapa sawit, kendaraan bermobil, dsb. Hal tersebut membuat peneliti menyimpulkan bahwa pelaksanaan program ini kemungkinan

memang sudah sesuai dengan prosedur PKH, hanya saja dalam pendistribusiannya masih belum tepat. Penulis mengambil kesimpulan bahwa kesalahan yang terjadi pada saat dilakukan musyawarah yang dilakukan oleh pemerintah desa, karena tidak diseleksi secara baik dan matang. Hal tersebut menjadi isu yang sangat hangat pada hari ini dilingkungan masyarakat dan mengakibatkan terjadinya kesenjangan serta kecemburuan sosial dilingkungan masyarakat.

3. Dari hasil penelitian ini juga ditemukan hambatan-hambatan dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Mekar Jaya Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar, dimana hambatan-hambatan tersebut ialah:
 - a. Pada indikator Efektivitas berada pada kategori Kurang Baik. Hal tersebut karena tidak semua Keluarga Penerima Manfaat PKH merasa bantuan yang diperoleh dapat mengurangi pengeluaran keluarga, juga dalam pelaksanaan PKH di Desa Mekar Jaya masih kurang efektif karena ada beberapa penerima bantuan PKH yang kehidupannya dapat dikatakan sudah mampu dan tidak layak lagi mendapatkan bantuan ini tetapi tetap menerimanya.
 - b. Pada indikator Perataan berada pada kategori Kurang Baik. Hal tersebut karena masih adanya keluarga miskin yang tidak memperoleh bantuan dari Program Keluarga Harapan (PKH) ini, karena kurangnya koordinasi yang dilakukan oleh pemerintah desa

dengan ketua kelompok PKH serta pendamping PKH Desa Mekar Jaya yang mengakibatkan pemilihan penerima bantuan PKH masih kurang merata.

- c. Sedangkan pada indikator Responsivitas juga berada pada kategori Kurang Baik. Hal tersebut dikarenakan masih banyak Keluarga Penerima Manfaat PKH yang tidak memahami bagaimana cara menyusun skala prioritas yang benar. Sehingga bantuan yang diperoleh belum digunakan sesuai dengan yang seharusnya, yang mengakibatkan bantuan yang diperoleh selalu merasa kurang dan tidak mencukupi dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari.
- d. Kemudian pada indikator Ketepatan juga berada pada kategori Kurang Baik, karena dalam penyaluran bantuan PKH di Desa Mekar Jaya masih terdapat Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH yang ternyata memiliki perekonomian yang layak, akibatnya terjadi salah sasaran dalam pendistribusiannya. Kemudian juga tidak adanya kesadaran yang dimiliki oleh anggota penerima Program Keluarga Harapan. Dimana, Keluarga Penerima Manfaat yang tidak tergolong sangat miskin tidak mau untuk mengundurkan diri sehingga hal tersebut menutup ruang bagi keluarga lain diluar sana yang termasuk sangat miskin dan berhak memperoleh bantuan Program Keluarga Harapan ini karena kuota nya juga sangat terbatas.
- e. Kurangnya musyawarah desa yang dilakukan oleh pemerintah Desa Mekar Jaya, sehingga data yang diperoleh bukan data terbaru tetapi

masih menggunakan data lama. Seharusnya pemerintah desa terus rutin dalam mengevaluasi dan melakukan update Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) desa, karena kalau tidak diupdate masyarakat yang seharusnya bisa masuk menjadi tidak bisa masuk menjadi kategori penerima PKH, karena data yang ada dipusat masih menggunakan data yang lama.

B. Saran

Adapun saran yang penulis berikan dalam penelitian mengenai Evaluasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Di Desa Mekar Jaya Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar ini adalah saebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan efektivitas dalam pelaksanaan PKH di Desa Mekar Jaya sebaiknya dilakukan komunikasi yang lebih intents antara pemerintah desa, ketua kelompok PKH dan juga pendamping PKH Desa Mekar Jaya agar tidak ada lagi masyarakat penerima bantuan yang memiliki perekonomian layak sehingga merugikan beberapa orang yang seharusnya bisa menjadi anggota penerima PKH.
2. Melakukan evaluasi setiap tahunnya dan dilakukan pemutakhiran data secara benar agar tidak terjadi permasalahan *miss data* sebagai bentuk proses pendataan peserta penerima PKH di Desa Mekar Jaya. Hal tersebut dilakukan agar penyaluran PKH di Desa Mekar Jaya lebih merata serta untuk memberikan ruang bagi masyarakat yang semestinya masuk dalam kriteria sebagai penerima PKH, tetapi belum mendapatkan.

3. Dalam hal pendampingan pendamping PKH Desa Mekar Jaya dapat memberikan materi-materi yang nantinya bisa diterapkan didalam kehidupan sehari-hari oleh Keluarga Penerima Manfaat PKH, seperti bagaimana cara menyusun skala prioritas kebutuhan agar bantuan yang diperoleh tidak disalahgunakan.
4. Agar pelaksanaan PKH di Desa Mekar Jaya tepat sasaran, pemerintah desa agar selalu berkoordinasi dan mendukung pendamping PKH Desa Mekar Jaya dalam melaksanakan tugasnya mengingat pendamping belum memahami kondisi sosial ekonomi masyarakat dengan baik sehingga belum sepenuhnya mampu menyelesaikan permasalahan yang terjadi di lapangan terkait penetapan penerima bantuan PKH. Kemudian pendamping lapangan PKH harus selalu mengedukasi masyarakat yang sudah mampu untuk melakukan graduasi mandiri. Dengan graduasi mandiri nantinya masyarakat akan dapat memenuhi kebutuhannya tanpa bergantung pada bantuan PKH yang selama ini diberikan.
5. Dengan kemajuan zaman yang semakin modern, seharusnya pemerintah Desa Mekar Jaya mampu dengan mandiri mengupdate Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) masyarakat setiap tahunnya dengan menggunakan sistem digital tanpa harus menunggu dari pusat yang melakukan perbaikan atau *upgrading* data. Hal tersebut dapat mempermudah dalam penentuan penerima bantuan-bantuan yang diberikan oleh pemerintah, salah satunya seperti PKH ini. Sehingga jika

sewaktu-waktu dari pusat meminta data terbaru dari Desa Mekar Jaya, desa hanya tinggal memberikan atau mengirimkannya secara online.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. PT. RajaGrafindo Persada: Jakarta.
- Creswell, John. 2016. *Research Design (Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dunn, N. William. 2003. *Analisis Kebijakan Publik*. Gadjah Mada University Press: Yogyakarta.
- Effendi, Sofian dan Tukiran. 2017. *Metode Penelitian Survei*. Ed-Revisi. LP3ES: Jakarta.
- Kementrian Sosial. 2019. *Pedoman Umum Program Keluarga Harapan*. Jakarta: Direktorat Perlindungan dan Jaminan Sosial.
- Kementrian Sosial. 2018. *Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Non Tunai Program Keluarga Harapan*. Jakarta: Direktorat Jaminan Sosial Keluarga- Direktorat Perlindungan dan Jaminan Sosial.
- Ndraha, Taliziduhu. 2015. *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru)*. PT. Rineka Cipta: Jakarta.
- Pusat Statistik Kabupaten atau Kota. 2019. *Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten atau Kota*. Jakarta.
- Pusat Statistik Kabupaten Kampar. 2019. *Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten Kampar*.
- Sedamaryanti. 2004. *Good Governance (Kepemimpinan Yang Baik) Bagian Kedua Membangun Sistem Manajemen Kinerja Guna Meningkatkan Produktifitas*

- Menuju Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik)*. Mandar Maju: Bandung.
- Singarimbun dan Sofian Effendi. 2016. *Metode Penelitian Survei*. Penerbit Pustaka LP3ES Indonesia: Jakarta.
- Subarsono, AG. 2006. *Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori dan Aplikasi*. PT. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Sujarweni, V. Wiratna. 2014. *Metodologi Penelitian*. PT. Pustaka Baru; Yogyakarta.
- Syafiie, Inu Kencana. 2005. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. PT. Refika Aditama: Bandung.
- Terry, R. George dan Leslie W. Rue. 2019. *Dasar-Dasar Manajemen*. Bumi Aksara: Jakarta.
- Zulkifli, dan Moris Adidi Yogia. 2009. *Fungsi-Fungsi Manajemen*. Marpoyan Tujuh Publishing: Universitas Islam Riau.
- Nurrohmah, Ika Ayu. 2019. *Evaluasi Program Keluarga Harapan di Desa Balongmasin Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto*. Jurnal Mahasiswa: Surabaya.
- Stevianus, Laoh., dkk. 2016. *Evaluasi Proses Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Malalayangsatu Kecamatan Malalayang Kota Manado*. Jurnal Agri-SosioEkonomi, Vol. 12 No. 2A.
- Susanto, Herman. 2016. *Evaluasi Program Keluarga Harapann di Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.

Susilo, Emma Vito., Djoko Suyuno 2018. *Evaluasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Kertasinduyasa Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes Tahun 2017*. Pancasakti Government Journal.

Destianti, Ida Yunani. 2017. *Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Taraf Kesehatan Oleh Uppkh Kecamatan Di Desa Ciliang Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran*. Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, Vol: 3, No.1.

Nurdiansah, Hilman. 2017. *Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Memutus Rantai Kemiskinan Oleh Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan (UPPKH) Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis*. Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol:3, No.3.

Sari, Ania Gita., dan Aufarul Marom. 2019. *Evaluasi Program Keluarga Harapan Dalam Rangka Mengatasi Permasalahan Pendidikan Dan Kesehatan Di Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang*. E-Journal.

Regulasi:

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 2003 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

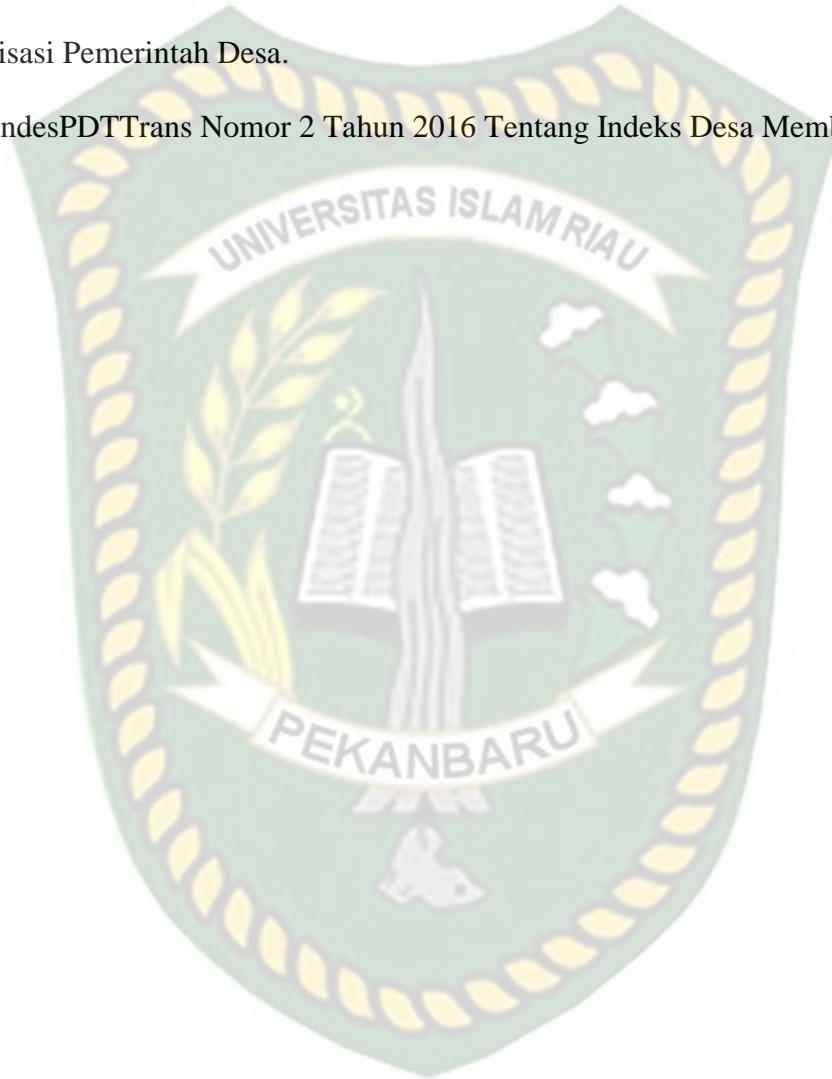
Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan.

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pelimpahan Kewenangan Dekonsentrasi Dan Penugasan Tugas Pembantuan

Kepada Dinas Sosial Daerah Provinsi Dan Dinas Sosial Daerah Kabupaten/Kota
Tahun Anggaran 2020.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2016 Tentang Susunan
Organisasi Pemerintah Desa.

PermendesPDTT Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
الجامعة الإسلامية الرiau

Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia 28284
Telp. +62761674674 Fax. +62761674834 Email: fisipol@uir.ac.id Website : www.uir.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI SKRIPSI

Nomor : 798 /A-UIR/5-FS/2020

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau menerangkan bahwa :

Nama : Efi Sulastri
NPM : 177310050
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Judul Skripsi : Evaluasi Pelaksanaan Program Keluarga Berencana
Harapan Di Desa Mekar Jaya Kecamatan Kampar Kiri
Tengah Kabupaten Kampar
Persentase Plagiasi : 17%
Jumlah Halaman : **119 (Abstrak s/d Daftar Pustaka)**
Status : **Lulus**

Adalah benar-benar sudah lulus pengecekan plagiasi dari Naskah Publikasi Skripsi,
dengan menggunakan aplikasi *Turnitin* (terlampir).

Demikianlah surat keterangan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 11 Februari 2021

Hormat Kami,
Wakil Dekan Bid. Akademik

